

Buku Referensi

KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

PEMANFAATAN SUMBER DAYA LOKAL SEBAGAI SOLUSI

Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si.
Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si.
Dr. Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si.
Dr. Danial Ibrahim, S.E., M.M.
Pebriyanto A. Hulinggi, S.A.P., M.AP.
Putri Warsono, S.A.P.



BUKU REFERENSI
KEMANDIRIAN FISIKAL DAERAH
PEMANFAATAN SUMBER DAYA
LOKAL SEBAGAI SOLUSI

Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si.
Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si.
Dr. Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si.
Dr. Danial Ibrahim, S.E., M.M.
Pebriyanto A. Hulinggi, S.A.P., M.AP.
Putri Warsono, S.A.P.



KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH PEMANFAATAN SUMBER DAYA LOKAL SEBAGAI SOLUSI

Ditulis oleh:

Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si.
Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si.
Dr. Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si.
Dr. Danial Ibrahim, S.E., M.M.
Pebriyanto A. Hulinggi, S.A.P., M.AP.
Putri Warsono, S.A.P.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7184-14-6
III + 197 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Maret 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

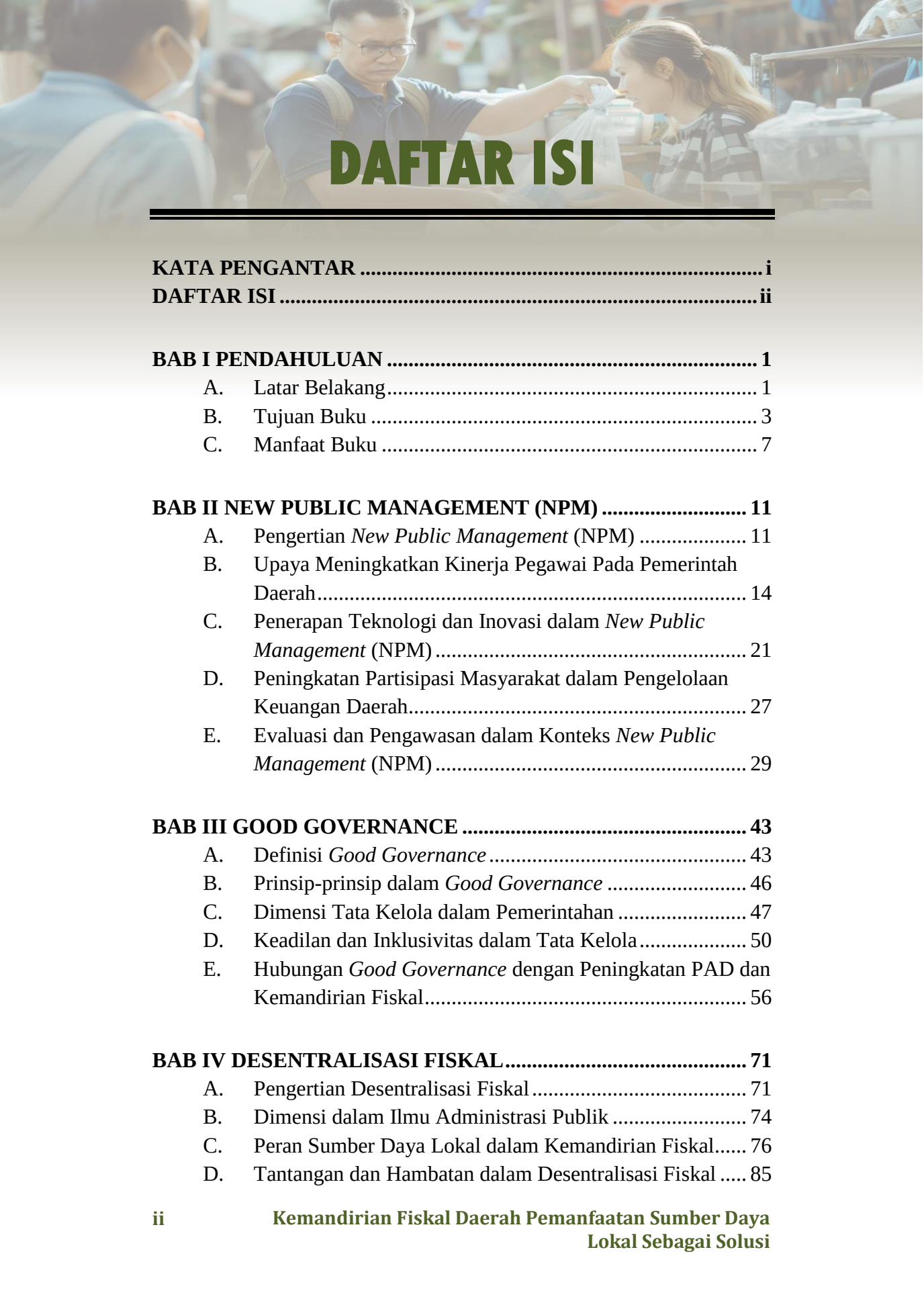
Provinsi Gorontalo, dengan berbagai potensi sumber daya alam dan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi tersebut guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Namun, selama ini, daerah ini masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, penguatan PAD dan peningkatan kemandirian fiskal menjadi sangat penting untuk menciptakan keuangan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Buku referensi ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam proses penyusunan buku ini, berbagai analisis, teori, dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada sumber daya lokal telah disusun untuk memberikan gambaran tentang cara yang tepat dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan potensi lokal, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memperkuat keuangan daerah, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Salam hangat.

PENULIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Buku	3
C. Manfaat Buku	7

BAB II NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM)	11
A. Pengertian <i>New Public Management</i> (NPM)	11
B. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Pemerintah Daerah.....	14
C. Penerapan Teknologi dan Inovasi dalam <i>New Public Management</i> (NPM)	21
D. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	27
E. Evaluasi dan Pengawasan dalam Konteks <i>New Public Management</i> (NPM)	29

BAB III GOOD GOVERNANCE	43
A. Definisi <i>Good Governance</i>	43
B. Prinsip-prinsip dalam <i>Good Governance</i>	46
C. Dimensi Tata Kelola dalam Pemerintahan	47
D. Keadilan dan Inklusivitas dalam Tata Kelola.....	50
E. Hubungan <i>Good Governance</i> dengan Peningkatan PAD dan Kemandirian Fiskal.....	56

BAB IV DESENTRALISASI FISKAL.....	71
A. Pengertian Desentralisasi Fiskal	71
B. Dimensi dalam Ilmu Administrasi Publik	74
C. Peran Sumber Daya Lokal dalam Kemandirian Fiskal.....	76
D. Tantangan dan Hambatan dalam Desentralisasi Fiskal	85

BAB V MANAJEMEN KEUANGAN	97
A. Definisi Manajemen Keuangan	97
B. Fungsi Manajemen Keuangan	99
C. Siklus Anggaran.....	102
D. Pengelolaan Keuangan.....	105
 BAB VI KEMANDIRIAN FISKAL (KEUANGAN DAERAH) ..	115
A. Pengertian Kemandirian Fiskal	115
B. Paradigma Anggaran Daerah.....	116
C. Peran dan Potensi Sumber Daya Lokal	127
D. Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Kemandirian Fiskal	134
 BAB VII STUDI KASUS	143
A. Studi Kasus: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Gorontalo.....	143
B. Tantangan dan Solusi.....	145
C. Pembelajaran dari Studi Kasus	160
 BAB VIII PENUTUP	171
 DAFTAR PUSTAKA	173
GLOSARIUM	191
INDEKS	193
BIOGRAFI PENULIS.....	195



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mencapai kemandirian fiskal, terutama di wilayah seperti Provinsi Gorontalo yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan operasionalnya tanpa harus selalu mengandalkan bantuan dari pusat. Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai tantangan yang menghambat proses menuju kemandirian fiskal, seperti kapasitas fiskal yang rendah, pengelolaan keuangan yang belum optimal, serta tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer. Desentralisasi fiskal, yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan publik, bertujuan memberikan otonomi yang lebih besar bagi daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada pemberian otonomi, tetapi juga pada kapasitas daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Kemandirian fiskal di Provinsi Gorontalo masih tergolong rendah, dengan indeks kemandirian fiskal yang hanya mencapai 0,222 berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2020. Pemetaan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023 menempatkan Gorontalo dalam kategori kapasitas fiskal daerah yang rendah, dengan rasio 1,421. Data ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) masih belum mampu

menutupi kebutuhan belanja daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi kapasitas fiskal yang terbatas, di mana pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi, masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas institusional dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi, mencapai 72,60% dari total pendapatan daerah pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo masih jauh dari kemandirian fiskal. Efisiensi pengeluaran yang rendah juga menjadi tantangan, yang ditunjukkan oleh rendahnya penyerapan anggaran dan tingginya belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal untuk pembangunan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup tahapan perencanaan, ratifikasi, implementasi, pelaporan, dan evaluasi. Setiap tahapan harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik.

Tahap perencanaan adalah langkah awal yang menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan. Dalam tahap ini, pemerintah daerah harus melakukan analisis yang mendalam terhadap potensi pendapatan dan kebutuhan belanja. Perencanaan yang baik akan menghasilkan anggaran yang realistis dan dapat direalisasikan. Setelah perencanaan, anggaran harus melalui proses ratifikasi oleh legislatif daerah. Proses ini harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa anggaran yang disetujui sesuai dengan kebutuhan daerah. Implementasi anggaran harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk kegiatan yang telah direncanakan, dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan. Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan aturan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Provinsi Gorontalo memiliki kearifan lokal yang dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu konsep Tininggila. Konsep ini menekankan pada keberlanjutan dan kesinambungan dalam pengelolaan sumber daya, termasuk keuangan. Dengan mengadopsi

konsep ini, pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang. Tininggila dapat diimplementasikan melalui beberapa langkah, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Melibatkan masyarakat dalam proses ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Belajar dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang berhasil dalam pengelolaan keuangannya, dapat memberikan wawasan bagi Provinsi Gorontalo. Negara-negara tersebut telah menerapkan berbagai strategi, seperti ketentuan anggaran yang ketat, kebijakan moneter yang efektif, dan pengelolaan utang yang cermat, juga menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah menuju kemandirian fiskal di Provinsi Gorontalo memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kapasitas fiskal, mengurangi ketergantungan pada dana transfer, dan meningkatkan efisiensi pengeluaran, Provinsi Gorontalo dapat mencapai kemandirian fiskal yang diharapkan. Konsep Tininggila yang berakar pada kearifan lokal dapat menjadi panduan dalam mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo.

B. Tujuan Buku

Buku ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal di Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian fiskal. Beberapa tujuan spesifik dari buku ini meliputi:

1. Analisis Kemandirian Fiskal

Analisis kemandirian fiskal di Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya beberapa tantangan utama yang menghambat tercapainya kemandirian fiskal yang optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah

ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagian besar pendapatan daerah Provinsi Gorontalo berasal dari transfer ini, yang membuat keuangan daerah sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat dan fluktuasi anggaran nasional. Ketergantungan ini mengurangi fleksibilitas fiskal daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan jangka panjang, karena sebagian besar anggaran tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah.

Kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo juga relatif rendah. Pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digali, seperti pajak dan retribusi, masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor ini membuat provinsi tersebut kesulitan untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya. Kurangnya sumber daya yang dapat dikelola sendiri membuat provinsi ini terus bergantung pada transfer pusat, yang berisiko mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya secara mandiri. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan strategi diversifikasi sumber pendapatan, menggali potensi PAD yang belum dimanfaatkan, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah agar lebih mandiri secara fiskal.

2. Strategi Pengelolaan Keuangan

Strategi pengelolaan keuangan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah dikelola dengan efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah pertama dalam strategi ini adalah perencanaan anggaran yang matang, yang harus dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja. Setiap program dan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas serta indikator kinerja yang terukur untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perencanaan anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan potensi pendapatan daerah yang realistis dan seimbang dengan proyeksi pengeluaran.

Setelah perencanaan, tahap implementasi anggaran memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana. Di sini, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Pemerintah daerah harus menyediakan informasi anggaran yang dapat diakses oleh publik, misalnya melalui situs web

resmi atau forum diskusi publik, agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran. Selain itu, perlu dilakukan audit internal yang rutin dan audit independen untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.

Evaluasi juga merupakan bagian integral dari strategi pengelolaan keuangan. Setelah implementasi, evaluasi perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana program-program yang dibiayai anggaran memberikan dampak yang diharapkan. Evaluasi ini akan memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan kebijakan di masa depan, serta membantu pemerintah daerah untuk menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan strategi ini, pengelolaan keuangan daerah akan lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah.

3. Penerapan Kearifan Lokal

Penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat dan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Salah satu konsep kearifan lokal yang dapat diintegrasikan adalah Tininggila, yang mengandung prinsip kebersamaan, saling menghormati, dan keberlanjutan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, prinsip ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan sumber daya secara bijaksana dan adil, serta memastikan bahwa hasil pengelolaan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak keseimbangan ekosistem dan nilai sosial.

Dengan mengintegrasikan kearifan lokal seperti Tininggila, pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang sesuai dengan prinsip gotong royong dan keberlanjutan. Dalam praktiknya, penerapan Tininggila dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong penggunaan anggaran untuk program-program yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Integrasi kearifan lokal ini juga dapat memperkuat daya dukung sosial terhadap kebijakan pemerintah, karena masyarakat merasa memiliki keterikatan emosional dengan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, penerapan kearifan lokal seperti Tininggila dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah tidak hanya akan meningkatkan keberhasilan program-program pembangunan, tetapi juga memastikan kesinambungan pembangunan yang berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat.

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran merupakan langkah krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pengelolaan keuangan daerah. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam merencanakan anggaran, dapat menyuarakan kebutuhan, prioritas, dan harapannya, yang sering kali tidak tercermin dalam kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mengakomodasi kepentingan publik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan bersama.

Untuk mendorong partisipasi yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengadakan forum-forum diskusi, konsultasi publik, atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan mengakses informasi terkait anggaran. Proses ini harus dilakukan secara transparan, dengan memberikan informasi yang cukup mengenai alokasi anggaran dan program yang akan dijalankan. Ketika masyarakat merasa memiliki suara dalam keputusan anggaran, cenderung lebih mendukung kebijakan yang diambil dan lebih aktif dalam mengawasi implementasi kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat juga meningkatkan akuntabilitas, karena setiap pengeluaran anggaran dapat dipantau oleh warga. Pemerintah yang terbuka terhadap masukan dan kritik masyarakat akan lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dan tepat sasaran. Dengan meningkatkan partisipasi, pemerintah daerah tidak hanya menciptakan anggaran yang lebih baik dan lebih adil, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan ikatan yang lebih solid dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

C. Manfaat Buku

Buku ini memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi pembaca, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian fiskal di Provinsi Gorontalo. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari buku ini:

1. Peningkatan Pemahaman

Buku ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai konsep kemandirian fiskal dan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo dalam mencapai kemandirian tersebut. Salah satu masalah utama yang dibahas adalah ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang sering kali mengurangi fleksibilitas fiskal daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Buku ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketergantungan ini, seperti keterbatasan potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan ini, pembaca dapat melihat betapa pentingnya bagi Provinsi Gorontalo untuk menciptakan sumber pendapatan daerah yang lebih mandiri, serta mengurangi ketergantungan pada transfer dana.

Buku ini juga menggali lebih dalam mengenai upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, termasuk menggali potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan pemahaman tentang kemandirian fiskal ini penting agar pembaca, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dapat lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil untuk memperkuat basis fiskal daerah. Buku ini juga membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan, mulai dari peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, hingga pemanfaatan potensi lokal yang belum terkelola dengan baik. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, pembaca dapat memahami urgensi pengelolaan keuangan yang lebih berkelanjutan dan berfokus pada pencapaian kemandirian fiskal yang lebih baik bagi Provinsi Gorontalo.

2. Strategi Pengelolaan Keuangan

Buku ini menawarkan strategi konkret untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien, dengan penekanan pada tiga aspek utama: perencanaan, implementasi, dan evaluasi anggaran. Dalam hal perencanaan, pemerintah daerah harus menyusun anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja, yang menekankan pada pencapaian hasil yang terukur dan dampak positif bagi masyarakat. Perencanaan yang baik melibatkan identifikasi prioritas kebutuhan masyarakat serta potensi pendapatan daerah yang dapat digali secara maksimal.

Pada tahap implementasi, strategi pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik. Implementasi yang efektif juga mencakup penggunaan teknologi dalam pelaporan keuangan, yang mempermudah akses informasi bagi masyarakat.

Evaluasi anggaran secara rutin merupakan bagian integral dari strategi ini. Dengan evaluasi yang berkesinambungan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi ini harus dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur, untuk memastikan bahwa program-program yang dibiayai memberikan dampak positif yang signifikan. Melalui strategi yang komprehensif ini, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Buku ini menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai perannya dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran publik. Dengan memahami pentingnya partisipasinya, masyarakat dapat lebih aktif

dalam memberi kontribusi pada tahap penyusunan anggaran, memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan.

Penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan mekanisme partisipatif yang inklusif, di mana masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dalam perencanaan anggaran. Ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi, konsultasi publik, atau platform digital yang memungkinkan warga untuk memberikan pendapat dan usulan terkait prioritas pengeluaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, seperti melalui laporan masyarakat atau kelompok pengawas independen, akan membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Edukasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami proses pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana dapat berpartisipasi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan semakin banyak masyarakat yang terlibat, akan terwujud suatu pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

4. Referensi untuk Penelitian dan Kebijakan

Buku ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik pada isu-isu pengelolaan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, buku ini memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan solusi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dapat diadaptasi untuk daerah lain dengan kondisi serupa. Peneliti dan akademisi dapat menggunakan analisis yang terdapat dalam buku ini sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut, baik itu mengenai model-model desentralisasi fiskal, implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, atau dampak kebijakan terhadap kemandirian fiskal daerah.

Buku ini juga memberikan perspektif yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih tepat sasaran. Dengan merujuk pada pembelajaran yang ada, pembuat

kebijakan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian fiskal daerah. Buku ini memberikan landasan teoritis dan praktis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan pemerintahan yang lebih baik.

Sebagai referensi untuk kebijakan, buku ini juga membahas berbagai solusi yang telah terbukti efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan keuangan daerah. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kondisi keuangan Provinsi Gorontalo, tetapi juga menyediakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik.



BAB II

NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM)

New Public Management (NPM) adalah pendekatan dalam manajemen sektor publik yang berkembang pada akhir abad ke-20, yang berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajerial dari sektor swasta, NPM bertujuan untuk membawa perubahan dalam cara pemerintah beroperasi, dengan lebih mengutamakan hasil, kualitas layanan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya penerapan elemen-elemen pasar, seperti kompetisi, pengukuran kinerja, dan transparansi, untuk memperbaiki pengelolaan sektor publik. Meskipun NPM menawarkan inovasi dalam pengelolaan pemerintahan, ia juga menghadapi kritik terkait penerapannya yang kadang-kadang mengurangi nilai-nilai publik dan memperburuk ketidaksetaraan dalam layanan publik.

A. Pengertian *New Public Management* (NPM)

Kajian *New Public Management* akan diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut, sebagaimana dikemukakan oleh Hood (1991) memberikan definisi yang berpengaruh mengenai tujuh fitur inti dari reformasi NPM, yaitu:

1. Manajemen profesional yang turun tangan
2. Standar dan ukuran kinerja yang eksplisit
3. Penekanan yang lebih besar pada kontrol berbasis hasil (karena hasil sekarang lebih penting daripada proses)
4. Pemilahan unit-unit di sektor publik
5. Lebih banyak kompetisi di dalam sektor publik itu sendiri

6. Lebih banyak praktik manajemen bergaya sektor swasta (termasuk manajemen sumber daya manusia yang fleksibel)
7. Mengejar efisiensi dan "melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit. (Ferlie, 2017:3).

Istilah "*New Public Management*" (NPM) mengacu pada perubahan paradigma dalam tata kelola sektor publik yang telah mengalami perkembangan yang signifikan di beberapa negara. NPM muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian layanan publik. Hal ini terutama terlihat pada tahun 1980-an dan 1990-an, ketika sejumlah negara, terutama di wilayah Barat, mulai menerapkan prinsip-prinsip NPM dalam reformasi administrasi publik. *When such traditional institutions are perceived to be under threat, however, as is the case in Great Britain, concern for accountability has intensified, much more so than in France and Germany, where the influence of New Public Management has been diffuse* (Lynn, 2006:136). Pendapat tersebut menggambarkan bahwa ketika institusi-institusi tradisional dianggap terancam, kekhawatiran terhadap akuntabilitas telah meningkat, lebih kuat dimana pengaruh *New Public Management* telah tersebar. Kekhawatiran terhadap akuntabilitas diperkuat karena institusi-institusi tradisional menghadapi tekanan dan perubahan yang signifikan.

Manajemen publik baru atau NPM juga membahas mengenai pengelolaan keuangan yang bersifat moderen, teori *New Public Management* (NPM) sebagaimana dikemukakan oleh Osborne (2010) *states that "the New Public Management (NPM) era was actually relatively short and temporary", and notes the natural shift of governance from the traditional bureaucratic model to the market-based NPM model and then to the pluralist NPG (New Public Government) model* (Chornovol et al., 2020:392). Maksud dari pendapat yang telah dikemukakan bahwa era *New Public Management* (NPM) sangat singkat dan sementara, selama periode ini terjadi pergeseran alami dalam tata kelola pemerintahan yang beralih dari model birokrasi konvensional ke model NPM berbasis pasar, sebelum kembali ke model *Government and Governance* (GPN) yang lebih pluralis. Perkembangan ini telah dijelaskan oleh pergeseran dari Manajemen Publik Baru (NPM) ke Manajemen Publik Baru (NPG), atau akronim serupa. Pergeseran ini

menunjukkan perubahan besar dalam prinsip reformasi di beberapa negara (Wiesel & Modell, 2014:176).

New Public Management (NPM) adalah pendekatan manajemen yang mengusulkan konsep-konsep bisnis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam sektor publik. Salah satu konsep yang diperkenalkan oleh NPM adalah "wirawanisasi" atau "privatisasi" dalam sektor birokrasi. Menurut Bovaird dan Loeffler (2015), NPM merampingkan sektor publik dan membuat administrasi publik lebih responsif terhadap kebutuhan sipil dan non- sipil dengan memberikan penekanan pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) (Haryani et al., 2023). NPM memperkenalkan konsep penugasan kontrak yang lebih luas antara sektor publik dan swasta. Pemerintah bisa mengontrak perusahaan swasta untuk menyediakan layanan tertentu. Ada juga upaya untuk membangun kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kebijakan reformasi setelah *New Public Management* telah menciptakan iklim yang terbuka di sektor publik untuk menerima saran manajemen dan hampir memunculkan "konsultokrasi" (Hood & Jackson, 1991:224), "layanan publik yang tidak terlihat" (Howlett & Migone, 2014), atau (Guttman & Willner, 1976) pemerintahan bayangan (Galwa & Vogel, 2023:1). Manajemen publik lebih luas yang tidak termasuk dalam analisis karena tata kelola yang efektif tidak berdasar (Ansell et al., 2023).

Irawan, (2021) mengemukakan dalam *new public management*, terdapat karakteristik struktur yang lebih berorientasi horizontal yang memungkinkan atasan dikomunikasikan ke bagian bawah hirarki untuk menyampaikan rasa urgensi dalam konteks penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi serta kurangnya rasa takut dalam konteks meningkatkan efisiensi (Benshlomo, 2023:13). Sebuah gerakan untuk perampingan sektor publik dan membuatnya lebih komparatif, *New Public Management* disebutkan oleh Bovaird & Loffer (2013) dengan tujuan untuk membuat administrasi publik lebih responsif terhadap kebutuhan warga dengan memberikan pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*), fleksibilitas, pilihan, dan transparansi (Firdausijah et al., 2023:72). Ada kemungkinan bahwa pelaksanaan konsep NPM dianggap sebagai modernisasi atau reformasi manajemen

dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, dan desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi.

B. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Pemerintah Daerah

New public management tidak lepas dari upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai pada pemerintah Daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh (Jusdin, 2011:1302) untuk meningkatkan kinerja pegawai di Provinsi Gorontalo dengan perlu menganut prinsip pemberian reward (penghargaan) bagi pegawai yang menunjukkan kinerja dengan baik, sementara pegawai mengalami kinerja yang buruk akan mendapat punishment (hukuman). Adapun Mahmudi, (2015) *New Public Management*, penerapan di sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan penerapan manajemen di sektor publik dalam praktiknya (Jultri et al., 2021). Berdasarkan pendapat yang ada dapat dipahami bahwa *New Public Management* adalah bagian dari manajemen sektor publik yang terinspirasi dari prinsip-prinsip manajemen yang banyak digunakan di sektor swasta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemberian layanan publik. Beberapa prinsip panduan NPM termasuk fokus pada hasil, fokus pada produktivitas, penekanan yang lebih besar pada unit-unit organisasi, dan penggunaan prinsip-prinsip bisnis dalam manajemen publik. Ada beberapa faktor yang mengindikasikan bahwa manajemen di sektor swasta lebih efektif dibandingkan dengan manajemen di sektor publik dalam praktiknya:

1. Insentif Finansial dan Orientasi Laba

Insentif finansial dan orientasi laba merupakan konsep yang sangat relevan dalam menganalisis perbedaan antara sektor swasta dan sektor publik, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi. Di sektor swasta, perusahaan beroperasi dengan tujuan utama untuk menciptakan keuntungan dan menghasilkan laba bagi pemegang saham. Orientasi laba ini menciptakan keuntungan finansial yang kuat bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mencapai hasil yang menguntungkan. Perusahaan swasta cenderung lebih fokus

pada efisiensi biaya dan produktivitas untuk memaksimalkan margin keuntungan, serta berinovasi untuk meningkatkan daya saing di pasar. Hal ini membentuk iklim persaingan yang sangat kompetitif, di mana perusahaan yang berhasil meningkatkan laba dan efisiensi dapat memperoleh keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya.

Pada konteks ini, insentif finansial menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku dan keputusan manajerial. Misalnya, bonus atau kompensasi berbasis kinerja yang sering kali diberikan kepada eksekutif dan manajer di perusahaan swasta dirancang untuk mendorongnya mencapai target laba tertentu. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi, proses produksi yang lebih efisien, dan strategi pemasaran yang lebih baik, guna meningkatkan keuntungan. Selain itu, perusahaan swasta juga cenderung lebih lincah dalam menghadapi perubahan pasar dan menyesuaikan strategi bisnis untuk tetap menguntungkan, karena ada insentif langsung yang berhubungan dengan pencapaian laba.

Situasi di sektor publik jauh lebih kompleks. Meskipun sektor publik juga memerlukan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, tujuan tidak selalu dapat diukur dengan ukuran keuntungan finansial. Pemerintah dan lembaga publik lebih fokus pada penyediaan layanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dalam hal ini, ukuran keberhasilan tidak selalu berupa laba finansial, tetapi lebih pada pencapaian hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, insentif keuangan di sektor publik tidak selalu fokus pada kekayaan keuntungan, tetapi lebih pada efisiensi dalam penggunaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

Sektor publik juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Di sini pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajerial yang dijiwai oleh sektor swasta, seperti pengelolaan anggaran yang efisien, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan, dan orientasi pada hasil. Meskipun insentif finansial langsung seperti di sektor swasta mungkin tidak sepenuhnya berlaku, sektor publik dapat memperkenalkan insentif berbasis kinerja bagi aparat pemerintah, seperti diberikan penghargaan atas pencapaian target pelayanan atau

kinerja keuangan yang baik. Hal ini dapat memotivasi aparatur negara untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan tanpa mengabaikan efisiensi dan penggunaan anggaran yang bijaksana.

2. Fleksibilitas dan Keputusan Cepat

Fleksibilitas dan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat merupakan dua aspek yang sangat penting dalam pengelolaan organisasi, baik di sektor swasta maupun publik. Namun kedua sektor ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal struktur organisasi dan kecepatan pengambilan keputusan, yang berdampak besar pada caranya beroperasi dan merespons perubahan.

Di sektor swasta, struktur organisasi seringkali lebih ramping dan fleksibel. Banyak perusahaan swasta mengadopsi struktur organisasi yang lebih datar, dengan sedikit lapisan manajerial yang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Struktur ini memungkinkan perusahaan merespon perubahan pasar dan kondisi bisnis yang dinamis dengan cepat. Ketika tantangan atau peluang baru muncul, perusahaan swasta dapat dengan cepat mengubah strateginya, memperkenalkan produk baru, atau menyesuaikan layanannya tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Fleksibilitas ini sangat penting dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, dimana kecepatan dalam mengambil keputusan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan. Misalnya, perusahaan teknologi sering kali perlu bergerak cepat untuk mengadopsi tren terkini atau berinovasi pada produknya agar tetap relevan di pasar yang berubah dengan cepat.

Keputusan yang cepat juga sangat didorong oleh insentif keuangan yang kuat di sektor swasta. Ketika keputusan dapat diambil dengan cepat dan akurat, perusahaan mempunyai peluang lebih besar untuk memanfaatkan peluang pasar dan meminimalkan kerugian. Misalnya, perusahaan yang mampu dengan cepat merespons perubahan preferensi konsumen atau perubahan kondisi ekonomi dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan. Di banyak perusahaan, keputusan penting seringkali diambil oleh manajemen puncak atau bahkan individu yang mempunyai wewenang untuk bertindak cepat tanpa harus menunggu persetujuan banyak pihak. Proses ini mendukung efisiensi operasional dan mendorong inovasi yang pada akhirnya dapat menghasilkan keuntungan lebih besar bagi perusahaan.

Struktur organisasi di sektor publik cenderung lebih hierarkis dan birokratis sehingga seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan. Birokrasi ini biasanya melibatkan banyak lapisan pemerintahan, prosedur administrasi, dan persetujuan dari berbagai pihak sehingga dapat membuat pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Meskipun prosedur-prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, prosedur-prosedur ini juga dapat menghambat kemampuan sektor publik untuk merespons situasi yang memerlukan pengambilan keputusan yang cepat. Misalnya, dalam situasi darurat atau ketika terdapat kebutuhan mendesak untuk merespons suatu krisis, proses pengambilan keputusan yang panjang dapat menghambat respons yang cepat dan efektif.

Meski birokrasi dapat memperlambat pengambilan keputusan di sektor publik, bukan berarti sektor tersebut tidak bisa beradaptasi. Beberapa lembaga pemerintah mulai menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel untuk meningkatkan daya tanggap. Misalnya, dalam menghadapi krisis kesehatan atau bencana alam, beberapa negara telah memperkenalkan sistem manajemen darurat yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat bahkan dalam kerangka birokrasi yang rumit. Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi, banyak lembaga publik yang mulai menerapkan sistem berbasis data dan teknologi informasi untuk mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan, namun tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Penilaian Kinerja yang Lebih Jelas

Penilaian kinerja merupakan salah satu aspek yang membedakan sektor swasta dan sektor publik, terutama dalam hal cara mengukur dan menyalakan keberhasilan suatu organisasi. Di sektor swasta, hasil kinerja sering kali dapat diukur dengan jelas dan objektif melalui indikator finansial seperti keuntungan, pertumbuhan pendapatan, dan pangsa pasar. Keberhasilan sebuah perusahaan swasta dapat langsung terlihat dalam laporan keuangan, yang menggambarkan seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Misalnya, laba bersih yang tinggi, peningkatan pendapatan yang konsisten, dan penguasaan pangsa pasar yang lebih besar merupakan indikator utama dari keberhasilan sebuah perusahaan.

Oleh karena itu, penilaian kinerja di sektor swasta cenderung lebih sederhana dan terukur, dengan fokus utama pada pencapaian target finansial yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perusahaan swasta juga sering menggunakan berbagai indikator lain yang terkait dengan efisiensi operasional, seperti rasio profitabilitas, margin keuntungan, dan biaya pengelolaan. Semua indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan data yang tersedia dalam laporan keuangan dan memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif perusahaan dalam menjalankan operasinya. Penilaian kinerja yang objektif ini memungkinkan manajer dan pemilik perusahaan untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan hasil yang terukur. Insentif finansial, seperti bonus dan penghargaan, juga sering dihubungkan langsung dengan pencapaian target kinerja ini, menciptakan dorongan yang kuat bagi individu dan tim untuk bekerja secara maksimal demi meningkatkan hasil yang diinginkan.

Berbeda dengan sektor swasta, penilaian kinerja pada sektor publik jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai indikator yang lebih beragam, termasuk indikator sosial dan ekonomi. Di sektor publik, tujuan utama bukanlah menghasilkan keuntungan, tetapi menyediakan layanan publik yang efektif dan adil kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja tidak hanya dilihat dari segi finansial, tetapi juga berdasarkan dampak sosial dan kualitas layanan yang diberikan. Misalnya, penilaian kinerja di sektor publik dapat mencakup ukuran seperti kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, atau keberhasilan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, kemiskinan, atau ketimpangan sosial.

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja sektor publik seringkali lebih sulit diukur dan lebih subyektif, mengingat tujuan sosial yang lebih luas dan beragam. Misalnya, meskipun pemerintah dapat mengukur efisiensi anggaran dalam proyek pembangunan, sulit untuk mengukur dampak langsung terhadap kualitas hidup tanpa melibatkan survei masyarakat sosial atau analisis dampak jangka panjang. Oleh karena itu, penilaian kinerja sektor publik memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan multidimensi, dengan mempertimbangkan berbagai variabel eksternal yang mempengaruhi hasil yang diinginkan.

Sektor publik juga harus menghadapi tantangan dalam mengukur keberhasilan yang bersifat jangka panjang. Meskipun indikator-indikator

seperti tingkat kemiskinan atau inflasi ekonomi dapat diukur dengan jelas, keberhasilan dalam mencapai tujuan jangka panjang, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat atau pengurangan ketimpangan sosial, seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terlihat. Selain itu, sektor publik harus menghadapi tekanan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pengelolaan sumber daya dengan tanggung jawab sosial, yang terkadang tidak selalu berjalan mulus dengan kinerja finansial yang terlihat langsung.

4. Inovasi dan Persaingan

Inovasi dan persaingan merupakan dua elemen yang sangat mempengaruhi dinamika dalam sektor swasta, yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam mendorong pengembangan produk, layanan, dan efisiensi operasional. Di pasar swasta, persaingan yang ketat antara perusahaan menciptakan dorongan yang kuat bagi masing-masing organisasi untuk terus berinovasi agar dapat mempertahankan posisinya di pasar. Dalam dunia bisnis, inovasi sering kali dianggap sebagai kunci untuk memenangkan persaingan. Perusahaan yang dapat memperkenalkan produk atau layanan baru yang lebih baik atau lebih efisien sering kali dapat menarik lebih banyak pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Misalnya, perusahaan teknologi yang meluncurkan perangkat terbaru atau inovasi dalam platform digital sering kali menciptakan gelombang persaingan baru di pasar, yang memaksa pesaing untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan.

Inovasi juga mendorong efisiensi dalam operasi perusahaan. Ketika perusahaan berusaha mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, cenderung mencari cara baru untuk memperbaiki proses internal, memanfaatkan teknologi baru, atau meningkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, mengoptimalkan pasokan rantai, atau mengadopsi teknologi terbaru yang dapat memberikan keuntungan kompetitif. Semua ini membuat sektor swasta fokus pada peningkatan kinerja berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan perusahaan itu sendiri tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan industri secara keseluruhan.

Di sektor publik, meskipun inovasi dan perubahan tetap penting, persaingan yang ada tidak bersifat licik atau seintensif yang ada di sektor

swasta. Pemerintah dan lembaga publik tidak beroperasi dalam lingkungan pasar yang kompetitif di mana ia harus bersaing untuk menarik pelanggan atau mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, sektor publik cenderung fokus pada penyediaan layanan yang adil, merata, dan berkualitas bagi masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan sosial, bukannya keuntungan finansial. Hal ini membuat motivasi untuk berinovasi menjadi lebih terbatas, karena banyak lembaga publik yang beroperasi dengan anggaran yang terbatas dan tidak memiliki insentif langsung untuk bersaing dalam arti yang sama dengan sektor swasta.

Birokrasi yang ada di sektor publik juga sering kali menjadi penghambat inovasi. Proses panjang untuk menyetujui perubahan atau mengimplementasikan kebijakan baru dapat memperlambat laju inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, sektor publik sering kali menghadapi tantangan dalam merespons dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat atau ekonomi, karena kebijakan dan inisiatif baru harus melalui proses yang melibatkan banyak pihak, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan, dan peraturan yang lebih ketat. Hal ini mengarah pada keputusan yang lebih hati-hati dan lambat, yang terkadang mengurangi kemampuan sektor publik untuk berinovasi.

Sektor publik juga dapat berinovasi, meskipun menghadapi tantangan yang lebih besar. Beberapa lembaga pemerintah dan organisasi publik telah mulai mengadopsi teknologi dan pendekatan manajerial baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Misalnya, pemerintah yang mengadopsi e-governance atau penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi dan memberikan layanan publik lebih cepat adalah bentuk inovasi yang berkembang di sektor publik. Beberapa negara juga mulai menerapkan kebijakan yang lebih terbuka dan inklusif, yang memungkinkan masyarakat dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam solusi pengembangan untuk masalah sosial dan ekonomi.

Hubungan antara sektor swasta dan publik bersifat kompleks dan spesifik. Terlepas dari kenyataan bahwa ada manfaat dari penerapan praktik manajemen yang lebih efisien, sektor publik juga memiliki perspektif yang unik tentang masyarakat, dan tujuannya mungkin lebih ambisius dibandingkan dengan masyarakat umum. Pertimbangan yang matang terhadap nilai-nilai publik, keberlanjutan jangka panjang, dan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam penerapan konsep NPM di sektor publik

C. Penerapan Teknologi dan Inovasi dalam *New Public Management* (NPM)

Penerapan Teknologi dan Inovasi dalam Manajemen Publik Baru (*New Public Management* atau NPM) merupakan elemen kunci dalam mempercepat reformasi sektor publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Teknologi tidak hanya mendukung optimalisasi pelayanan publik tetapi juga mendorong tercapainya tujuan kemandirian fiskal yang lebih baik, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Penerapan teknologi dan inovasi di sektor publik terutama fokus pada digitalisasi pelayanan publik, penggunaan teknologi untuk efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta penerapan e-Government dan sistem manajemen keuangan daerah.

1. Digitalisasi Pelayanan Publik sebagai Bagian dari Reformasi NPM

Digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi *New Public Management* (NPM) berperan penting dalam transformasi sektor publik menuju tata kelola yang lebih efisien, efektif, dan transparan. NPM menekankan penekanan pada hasil, efisiensi, dan pemberian layanan berkualitas kepada masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik. Digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk mempercepat berbagai proses administrasi yang sebelumnya menghabiskan waktu dan tenaga, seperti pengurusan izin, pengajuan dokumen, atau pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan optimalisasi teknologi, pelayanan publik tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih terjangkau dan lebih transparan.

Salah satu manfaat besar dari digitalisasi adalah kemampuan untuk memotong prosedur manual yang sering kali memerlukan waktu lama dan mengandalkan proses birokratis yang rumit. Proses administrasi yang biasanya meliputi pengisian formulir secara fisik,

antrean panjang, dan pemeriksaan dokumen secara manual, kini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis digital. Misalnya, pengajuan izin usaha yang biasanya memerlukan proses yang lama dan melibatkan banyak pihak kini dapat diselesaikan secara online. Begitu juga dengan pengajuan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sebelumnya mengharuskan permohonan untuk hadir langsung di kantor kepolisian, kini dapat dilakukan dengan berani. Hal serupa juga terjadi dalam pengajuan bantuan sosial, di mana masyarakat dapat mengajukan permohonan secara langsung melalui aplikasi berbasis web atau mobile.

Keberhasilan digitalisasi pelayanan publik dalam NPM juga terletak pada kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi otoritas yang berwenang. Setiap proses yang terhubung dengan teknologi dapat dicatat dan dilacak secara digital. Misalnya, dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, setiap laporan atau permintaan dari warga dapat dipantau secara real-time. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merespons lebih cepat, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses pengaduan sesuai dengan prosedur yang ada. Keberadaan catatan digital yang terperinci juga meningkatkan akuntabilitas, karena transaksi atau interaksi yang terjadi dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, seperti lembaga pengawasan atau masyarakat itu sendiri.

Digitalisasi memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga atau instansi pemerintah. Sistem yang terintegrasi secara digital memungkinkan pertukaran data secara lebih efisien, yang pada gilirannya mempercepat pengambilan keputusan dan proses administratif. Dengan adanya sistem berbasis teknologi yang dapat menghubungkan berbagai unit kerja dalam pemerintahan, penyelesaian masalah yang melibatkan banyak instansi, seperti pengajuan izin usaha yang membutuhkan persetujuan dari beberapa lembaga, dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

Digitalisasi juga mendukung penyediaan layanan yang lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Akses terhadap layanan publik tidak lagi terbatas pada jam kerja atau lokasi fisik tertentu. Masyarakat dapat mengakses layanan publik kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet. Ini sangat penting terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan publik karena jarak atau

keterbatasan infrastruktur. Layanan publik berbasis digital memungkinkan untuk mengajukan permohonan atau memperoleh informasi tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke pusat administrasi.

Penerapan digitalisasi pelayanan publik juga berujung pada penghematan biaya bagi pemerintah. Dengan mengurangi kebutuhan ruang kantor fisik, tenaga kerja administratif yang berlebihan, dan prosedur yang rumit, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Misalnya, proses verifikasi data yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dengan sistem verifikasi otomatis, yang tidak hanya mengurangi biaya tenaga kerja tetapi juga meningkatkan akurasi data yang diproses. Meskipun demikian, untuk memastikan keberhasilan digitalisasi dalam pelayanan publik, pemerintah perlu memperhatikan beberapa tantangan, seperti penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan keterampilan digital bagi pegawai pemerintah, serta perlindungan data pribadi. Peningkatan akses teknologi di seluruh lapisan masyarakat juga harus menjadi prioritas, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses internet terbatas.

2. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting di era digital ini. Teknologi berperan strategis dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengalokasian anggaran, hingga pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan anggaran daerah tidak hanya memberikan efisiensi dalam operasional, tetapi juga meningkatkan akurasi, transparansi, dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu bentuk aplikasi teknologi yang paling signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengelolaan anggaran secara otomatis dan real-time, yang mengintegrasikan berbagai jenis data dan sumber informasi terkait. Dengan adanya sistem informasi ini, pemerintah daerah dapat memonitor pengeluaran dan pemasukan anggaran secara terus-menerus, yang memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid dan terkini. Misalnya,

pengalokasian anggaran dapat dilakukan dengan lebih tepat, karena data yang ada lebih akurat dan terbaru. Hal ini mengurangi risiko kesalahan perencanaan yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, yang sering terjadi dalam sistem manual.

Keunggulan lain dari sistem ini adalah kemampuannya untuk mengurangi kesalahan manusia dalam proses penghitungan, pelaporan, dan pengalokasian anggaran. Sebelumnya, banyak kesalahan yang terjadi akibat kesalahan dalam proses input data atau perhitungan manual, yang dapat menimbulkan dampak yang serius, seperti alokasi anggaran yang tidak tepat atau bahkan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Dengan sistem berbasis teknologi, proses ini dilakukan secara otomatis, yang mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain itu, penggunaan teknologi juga meningkatkan akuntabilitas karena setiap proses dan transaksi keuangan dapat dicatat secara digital, dan dapat dilacak dengan mudah oleh pengawasan internal maupun eksternal.

Teknologi juga berperan yang sangat penting dalam pengumpulan PAD, yang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah daerah. Salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan PAD adalah sistem pembayaran elektronik. Pemerintah daerah kini memanfaatkan aplikasi berbasis mobile atau sistem pembayaran online untuk memfasilitasi wajib pajak dalam membayar pajak atau retribusi. Sistem ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kantor pemerintahan, tetapi juga dapat mengurangi antrian panjang di loket pembayaran yang sering terjadi di kantor pajak atau tempat retribusi lainnya. Proses pembayaran pun menjadi cepat, aman, dan efisien, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, selama ada akses internet.

Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih baik. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat mengawasi pembayaran pajak secara real-time, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta mendeteksi ketidaknormalan atau penyelewengan dalam proses pengumpulan PAD. Pengawasan yang lebih ketat dan transparan ini pada akhirnya mendorong pemenuhan wajib pajak, karena tahu bahwa setiap transaksi dapat dilacak dengan mudah oleh pihak yang berwenang.

Teknologi juga membantu pemerintah daerah dalam pendataan dan pemetaan sumber daya daerah, yang sangat penting dalam mengoptimalkan potensi PAD. Sistem pemetaan berbasis teknologi, seperti Sistem Informasi Geografis (GIS), memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam, aset daerah, atau sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pendapatan yang belum tergali dengan baik. Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan dan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pusat.

Teknologi juga memberikan dampak positif pada efisiensi dalam hal pelaporan keuangan. Pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual, memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk memproses dokumen fisik dan melakukan verifikasi data, kini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak keuangan yang terintegrasi. Pelaporan yang lebih cepat dan transparan memungkinkan masyarakat dan pihak yang berwenang untuk menyusun anggaran pengelolaan secara lebih jelas dan mudah dipahami. Sistem pelaporan keuangan yang terotomatisasi ini mengurangi potensi manipulasi data, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah.

3. Implementasi e-Government dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Implementasi e-Government dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD) merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM). e-Government memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan, serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Penerapan e-Government di tingkat daerah memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih cepat, murah, dan efisien, yang berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal.

Salah satu contoh penerapan e-Government yang signifikan dalam sektor keuangan publik adalah penggunaan Sistem Informasi

Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD). SIMKD mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pengalokasian dana, pelaporan, hingga audit keuangan. Dengan adanya SIMKD, seluruh transaksi keuangan dapat dipantau secara langsung dan dicatat secara elektronik, yang memungkinkan setiap langkah dalam proses keuangan daerah diaudit dan pengoperasian dengan mudah. Hal ini mengurangi potensi terjadinya konseptualisasi anggaran, korupsi, atau ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan, karena seluruh aliran dana terkait dapat diakses dengan cepat dan jelas.

Keuntungan lainnya dari penerapan SIMKD adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Sebelum adanya sistem ini, pengelolaan keuangan daerah cenderung dilakukan secara manual, yang mengakibatkan terhambatnya pelaporan dan terhambatnya akses bagi masyarakat atau pihak-pihak terkait terhadap informasi anggaran. Dengan SIMKD, data terkait anggaran daerah dapat diakses secara real-time oleh pihak yang berwenang, termasuk masyarakat umum, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai alokasi anggaran, penggunaan dana, serta hasil dari berbagai program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran daerah, yang pada gilirannya mendorong akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Sistem ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Data keuangan yang tersedia secara langsung dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai indikator yang relevan, sehingga pemerintah daerah dapat lebih cepat dalam merespons perubahan situasi keuangan dan merencanakan langkah-langkah yang lebih efektif. Penggunaan data secara otomatis dan real-time memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti dan tidak bergantung pada data manual yang rawan kesalahan.

SIMKD juga berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses perencanaan anggaran dan pengalokasian dana. Dengan sistem ini, setiap unit kerja di pemerintahan daerah dapat mengajukan permintaan anggaran secara online, yang kemudian dapat diproses dan disetujui dengan lebih cepat. Proses persetujuan yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama dan melibatkan banyak prosedur

administratif kini dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, tanpa mengurangi kualitas dan membatasi alokasi anggaran. Selain itu, SIMKD membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu, yang memungkinkan pihak-pihak terkait, seperti badan pengawas keuangan, untuk melakukan audit secara lebih efektif dan efisien.

D. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dari penerapan prinsip *New Public Management* (NPM), yang menekankan pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Salah satu tujuan utama NPM adalah untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menjadikan sektor publik lebih responsif terhadap kebutuhan warga, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya daerah, dan memperkuat kemandirian fiskal.

Penerapan prinsip NPM dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah dengan mengintegrasikan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait anggaran daerah. Melalui pendekatan berbasis partisipasi, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kebutuhannya dalam proses perencanaan anggaran daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum konsultasi publik, rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, atau mekanisme umpan balik lainnya yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat secara langsung.

Salah satu cara untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah adalah dengan menerapkan kebijakan berbasis partisipatif. Kebijakan ini mengutamakan keterlibatan warga dalam setiap tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pengalokasian anggaran, hingga evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan kebijakan berbasis

partisipatif memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami alokasi anggaran dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat juga dapat memberikan rekomendasi atau mengidentifikasi prioritas yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.

Salah satu bentuk partisipasi yang semakin berkembang adalah dalam penyusunan dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai potensi sumber daya daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, dalam sektor pajak daerah, masyarakat dapat dilibatkan dalam sosialisasi kebijakan pajak, memonitor pembayaran, atau mengidentifikasi potensi pajak yang dapat dikembangkan. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat kesadaran dan hadirnya pajak di kalangan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal. Melalui kemitraan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal yang mungkin kurang terkelola dengan baik. Pemerintah dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat, organisasi masyarakat sipil, atau sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam, sektor pertanian, atau pariwisata. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang menguntungkan semua pihak dan berkelanjutan. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat dapat dilibatkan dalam pemantauan penggunaan sumber daya, serta dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan yang mempengaruhi lingkungan dan kesejahteraan.

Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat akan lebih mudah membesar-besarkan dan cenderung menjalankan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah meningkat, dan potensi kebijaksanaan atau korupsi dapat diminimalkan. Pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan juga dapat lebih cepat mengetahui

apakah ada masalah atau ketidaksesuaian antara kebijakan yang dijalankan dengan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas sosial. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah akan merasa bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai, lebih termotivasi untuk mendukung kebijakan yang telah disepakati bersama dan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada lembaga legislatif atau pihak-pihak lain, tetapi juga kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

E. Evaluasi dan Pengawasan dalam Konteks *New Public Management* (NPM)

Evaluasi dan pengawasan merupakan elemen penting dalam penerapan prinsip *New Public Management* (NPM), khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Dalam konteks NPM, pengawasan tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien dan efektif, tetapi juga untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Oleh karena itu, sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip NPM dapat diterapkan dengan baik dalam pengelolaan anggaran daerah.

1. Pentingnya Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal

Sistem pengawasan merupakan salah satu aspek fundamental dalam memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel. Pengawasan yang baik, baik secara internal maupun eksternal, merupakan elemen kunci dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan publik dan meminimalisir potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks *New Public Management* (NPM), pengawasan berperan penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah digunakan dengan tepat, memberikan hasil yang optimal, dan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sistem pengawasan internal dan

eksternal yang efektif menjadi sangat vital dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, bertanggung jawab, dan berdaya saing.

a. Pengawasan Internal dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Pengawasan internal merupakan mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memonitor dan mengendalikan seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan anggaran dalam organisasi pemerintah. Tujuan utama pengawasan internal adalah untuk memastikan bahwa anggaran yang dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik yang dapat merugikan masyarakat dan merusak reputasi pemerintah daerah. Pengawasan internal juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendorong transparansi dalam setiap tahap pengelolaan anggaran.

Ada beberapa elemen utama dalam pengawasan internal yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan administratif, yang mencakup pengawasan terhadap prosedur administrasi yang diikuti dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Hal ini termasuk pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi anggaran yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat secara akurat dan transparan, yang memungkinkan pengawasan lebih lanjut terhadap penggunaan dana publik.

Pemantauan kinerja adalah bagian penting dari pengawasan internal. Pemerintah daerah harus dapat mengukur kinerja setiap program dan kegiatan yang dibiayai menggunakan anggaran daerah. Pemantauan ini tidak hanya fokus pada penggunaan dana, tetapi juga pada hasil yang tercapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang digunakan untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, pemantauan kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam pengelolaan

anggaran guna meningkatkan dampak program-program yang dijalankan.

Audit internal yang dilakukan secara rutin dan berkala juga menjadi bagian integral dari pengawasan internal. Audit internal bertujuan untuk memverifikasi apakah pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, apakah anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, dan apakah ada potensi penyalahgunaan anggaran. Audit ini dilakukan oleh auditor yang bekerja di dalam organisasi pemerintah daerah, yang akan memberikan penilaian objektif terhadap keakuratan dan keabsahan penggunaan anggaran.

Sistem pengawasan internal yang baik harus disertai dengan kebijakan yang jelas dan mekanisme pelaporan yang transparan. Setiap hasil audit, temuan, dan rekomendasi perbaikan harus ditindaklanjuti dengan segera oleh pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, pengawasan internal juga berfungsi untuk memperkuat integritas dan profesionalisme di dalam organisasi pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

b. Pengawasan Eksternal dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Sementara pengawasan internal merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memantau pengelolaan anggaran dari dalam, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak-pihak di luar pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk menilai kinerja pengelolaan anggaran. Pengawasan eksternal ini memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik.

Salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan eksternal adalah lembaga legislatif. Di tingkat daerah, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki peran sentral dalam pengawasan anggaran daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan mengesahkan anggaran daerah, serta memastikan bahwa anggaran yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, DPRD juga berperan dalam mengawasi implementasi anggaran dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara

efisien dan akuntabel. DPRD dapat meminta penjelasan atau klarifikasi dari eksekutif mengenai penggunaan anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan atau tujuan yang telah disepakati.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memiliki peran penting dalam pengawasan eksternal. BPK sebagai lembaga negara yang independen bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk penggunaan anggaran. Audit eksternal yang dilakukan oleh BPK memberikan penilaian objektif terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan hasil audit ini dipublikasikan untuk diketahui oleh masyarakat. Hasil audit BPK juga menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, BPK akan memberikan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Masyarakat juga memegang peran penting dalam pengawasan eksternal, terutama dalam konteks pengawasan sosial. Sebagai pihak yang langsung menerima dampak dari kebijakan anggaran, masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi kesejahteraan mereka. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti forum konsultasi publik, penyuluhan, atau menggunakan media sosial untuk mengungkapkan potensi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran yang mereka temui. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mendorong transparansi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan.

c. Integrasi Pengawasan Internal dan Eksternal untuk Meningkatkan Akuntabilitas

Untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan efisien, pengawasan internal dan eksternal harus saling melengkapi dan berkoordinasi dengan baik. Pengawasan internal yang kuat akan memberikan dasar yang kokoh bagi pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, sementara

pengawasan eksternal akan memberikan penilaian objektif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sinergi antara pengawasan internal dan eksternal ini akan meningkatkan kualitas tata kelola anggaran dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik.

Pengawasan yang efektif akan mendorong pemerintah daerah untuk selalu berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana publik, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan berorientasi pada hasil yang maksimal. Akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta meningkatkan legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

2. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran Daerah

Pengelolaan anggaran daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan, karena berhubungan langsung dengan pengelolaan dana publik yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam New Public Management (NPM) adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Oleh karena itu, selain pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengawasan eksternal oleh lembaga-lembaga terkait, peran masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah juga sangat penting. Masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari anggaran daerah berhak untuk mengetahui, mengakses, dan memantau bagaimana dana publik digunakan. Dalam kerangka ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang menerima hasil pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai subjek yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan penggunaan dana publik tersebut.

a. Masyarakat sebagai Mitra Pengawasan

Sebagai penerima manfaat dari anggaran daerah, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memantau penggunaan dana yang mereka percayakan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, pengawasan masyarakat menjadi elemen

yang sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran. Masyarakat dapat berperan sebagai mitra pengawasan yang memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, penyalahgunaan dana, dan pengelolaan yang tidak efisien. Sebagai contoh, jika masyarakat mengetahui adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan atau jika ada anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal, mereka bisa melaporkan temuan tersebut kepada pihak yang berwenang, baik kepada pemerintah daerah, lembaga legislatif, maupun instansi pengawasan lainnya.

Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai "*watchdog*" atau pengawas pasif, tetapi mereka juga dapat menjadi agen perubahan yang mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menggunakan dana publik. Melalui pengawasan ini, masyarakat berperan dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi mereka.

b. Transparansi Anggaran sebagai Landasan Partisipasi

Salah satu cara yang paling efektif untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah adalah dengan menciptakan transparansi anggaran. Pemerintah daerah harus menyediakan saluran informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh publik terkait dengan perencanaan, pengalokasian, serta penggunaan anggaran daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempublikasikan laporan anggaran yang terperinci dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat akan mengetahui secara jelas berapa banyak dana yang dialokasikan untuk masing-masing sektor, program, atau kegiatan, serta sejauh mana dana tersebut digunakan.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti situs web pemerintah daerah dan aplikasi berbasis daring, dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi anggaran.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengadakan forum-forum konsultasi publik secara berkala untuk membahas anggaran yang direncanakan dan yang telah dilaksanakan. Dalam forum ini, masyarakat bisa memberikan tanggapan atau bertanya langsung mengenai program-program yang dibiayai oleh anggaran daerah. Diskusi terbuka semacam ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami prioritas pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah dan memberi kesempatan bagi mereka untuk memberikan masukan yang dapat memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran.

Dengan adanya transparansi anggaran, masyarakat dapat lebih mudah memantau bagaimana anggaran digunakan, apakah sesuai dengan rencana, dan apakah penggunaan anggaran memberi manfaat maksimal bagi kepentingan umum. Transparansi ini juga membantu menciptakan budaya pengawasan yang partisipatif dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

c. Forum Partisipasi Masyarakat untuk Pengawasan Anggaran

Pemerintah daerah juga harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan forum-forum konsultasi publik yang rutin, di mana masyarakat dapat menyampaikan pandangannya mengenai prioritas belanja daerah dan penggunaan anggaran. Forum semacam ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan aspirasi dan harapan mereka, tetapi juga memberi kesempatan kepada mereka untuk mengevaluasi apakah program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengawasan anggaran, seperti dengan membentuk kelompok-kelompok pengawasan berbasis masyarakat atau bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kapasitas untuk mengawasi pengelolaan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam forum-forum ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

mengenai anggaran daerah serta memberi kesempatan bagi mereka untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi anggaran.

d. Peran Media dalam Pengawasan Anggaran Daerah

Media juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengawasan anggaran daerah. Sebagai saluran informasi yang dapat menjangkau publik secara luas, media dapat berfungsi sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan anggaran daerah. Melalui laporan dan pemberitaan yang objektif dan mendalam, media dapat memberikan informasi yang transparan tentang bagaimana anggaran digunakan dan sejauh mana anggaran tersebut memberi manfaat kepada masyarakat.

Media juga dapat memfasilitasi proses pengawasan dengan melaporkan temuan-temuan terkait dengan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran. Ketika masyarakat menemukan adanya penyalahgunaan anggaran atau program yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, media dapat menjadi saluran bagi mereka untuk menyuarakan hal tersebut. Dalam hal ini, media berperan sebagai penyampai informasi yang objektif dan transparan yang akan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

e. Pengawasan Masyarakat dalam Konteks NPM

Pada konteks *New Public Management* (NPM), peran serta masyarakat dalam pengawasan anggaran sangat relevan, karena NPM menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. NPM mengedepankan pemberian layanan publik yang lebih berkualitas, responsif, dan efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pihak yang menerima layanan memiliki hak untuk mengawasi bagaimana dana publik digunakan untuk mendukung pelayanan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah memperkuat prinsip-prinsip NPM tersebut dengan memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efisien, efektif,

dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama.

Dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah akan semakin termotivasi untuk memperbaiki pengelolaan anggaran, tidak hanya dalam hal pemenuhan angka-angka anggaran, tetapi juga dalam hal pencapaian hasil yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

3. Evaluasi Kebijakan Fiskal untuk Menjamin Keselarasan dengan Prinsip NPM

Evaluasi kebijakan fiskal merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM). NPM, yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik, mengharuskan adanya evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan fiskal untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Evaluasi kebijakan fiskal ini sangat penting tidak hanya untuk menilai keberhasilan kebijakan yang telah diimplementasikan, tetapi juga untuk memperbaiki dan merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik di masa depan.

a. Pentingnya Evaluasi Kebijakan Fiskal

Evaluasi kebijakan fiskal adalah proses penilaian terhadap dampak dan hasil dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan apakah penggunaan anggaran telah efektif dan efisien. Dalam konteks NPM, kebijakan fiskal tidak hanya diukur berdasarkan anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Oleh karena

itu, evaluasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penilaian terhadap efektivitas program yang didanai, pengelolaan pajak daerah, hingga sejauh mana kebijakan fiskal berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.

Evaluasi yang tepat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi apakah kebijakan fiskal yang diambil efektif dalam memenuhi tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Tanpa evaluasi yang tepat, kebijakan fiskal dapat berisiko menjadi tidak tepat sasaran atau kurang memberikan dampak yang diinginkan. Evaluasi ini juga akan membantu dalam proses perbaikan kebijakan yang berkelanjutan, sehingga kebijakan fiskal dapat selalu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan daerah dan tujuan jangka panjang.

b. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan yang Dibiayai Anggaran Daerah

Salah satu aspek penting dalam evaluasi kebijakan fiskal adalah mengevaluasi kinerja dari program atau kegiatan yang didanai oleh anggaran daerah. Program yang efektif dan efisien harus dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks NPM, pengelolaan anggaran harus dilaksanakan dengan prinsip *value for money*, di mana anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Evaluasi program yang didanai anggaran harus mencakup analisis mengenai sejauh mana anggaran digunakan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, serta apakah program tersebut berjalan dengan efisien.

Evaluasi ini harus melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek penting seperti hasil yang tercapai dibandingkan dengan rencana awal, penggunaan anggaran yang rasional, dan efektivitas penerapan kebijakan yang diambil. Misalnya, jika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur, maka evaluasi akan melihat sejauh mana proyek tersebut telah selesai sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, apakah proyek tersebut bermanfaat bagi masyarakat, dan apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Evaluasi juga harus melibatkan pengukuran efektivitas dari kebijakan pajak daerah. Evaluasi pajak daerah penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan pajak mampu meningkatkan pendapatan daerah tanpa memberatkan masyarakat. Evaluasi ini juga akan mengidentifikasi potensi pengurangan pajak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan pajak.

c. Evaluasi Kebijakan Fiskal untuk Peningkatan PAD dan Kemandirian Fiskal

Salah satu tujuan utama dari evaluasi kebijakan fiskal adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD dan kemandirian fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup akan memberikan pemerintah daerah kemandirian dalam mengelola dan membiayai berbagai program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan fiskal harus memperhitungkan sejauh mana kebijakan tersebut mendukung peningkatan PAD dan berkontribusi pada tercapainya kemandirian fiskal.

Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap berbagai kebijakan yang berhubungan dengan potensi sumber daya lokal, termasuk pajak daerah, retribusi, dan sektor-sektor ekonomi lain yang dapat menyumbang kepada pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi sejauh mana kebijakan-kebijakan fiskal yang diterapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Misalnya, kebijakan penguatan pajak daerah dan pengelolaan sumber daya alam harus dievaluasi untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut meningkatkan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PAD.

Kemandirian fiskal yang kuat akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat dan mendorong daerah untuk mencari sumber pendapatan yang lebih mandiri. Evaluasi kebijakan fiskal yang berfokus pada PAD dan kemandirian fiskal ini akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu

mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Evaluasi Penggunaan Dana Secara Efisien

Salah satu prinsip penting dalam *New Public Management* adalah efisiensi dalam penggunaan anggaran. Evaluasi kebijakan fiskal harus memastikan bahwa penggunaan dana daerah dilakukan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana yang efisien berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk program atau kegiatan tertentu dapat menghasilkan output yang optimal dengan biaya yang minimal. Evaluasi penggunaan dana ini juga melibatkan penilaian terhadap pemborosan anggaran, ketidakefisienan, atau penyimpangan yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana publik.

Evaluasi terhadap penggunaan dana juga akan menilai apakah alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas telah dilaksanakan dengan baik dan apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa dana digunakan untuk program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya cukup, tetapi juga tepat sasaran.

e. Indikator Kinerja dalam Evaluasi Kebijakan Fiskal

Evaluasi kebijakan fiskal harus dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang terukur untuk memantau pencapaian hasil. Indikator ini harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai apakah kebijakan fiskal yang diterapkan telah berhasil atau tidak. Beberapa indikator yang penting dalam evaluasi kebijakan fiskal adalah peningkatan penerimaan daerah, penurunan defisit anggaran, keberhasilan dalam mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan peningkatan kualitas layanan publik yang didanai oleh anggaran daerah. Indikator kinerja ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas dan efisiensi kebijakan fiskal yang diterapkan. Evaluasi berdasarkan indikator kinerja ini memungkinkan perbaikan yang lebih terstruktur dalam

pengelolaan anggaran daerah dan memberikan dasar bagi kebijakan fiskal yang lebih baik di masa depan.

f. Evaluasi Berkelanjutan untuk Perbaikan Kebijakan Fiskal

Evaluasi kebijakan fiskal harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tetap relevan dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Proses evaluasi ini harus bersifat dinamis dan adaptif, agar dapat memberikan solusi yang tepat atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran daerah. Evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan akan membantu pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.



BAB III

GOOD GOVERNANCE

Good governance merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik dalam pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, responsif, adil, dan partisipatif. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses pemerintahan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien. *Good governance* juga mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik.

A. Definisi *Good Governance*

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang sangat penting dalam dunia pemerintahan modern. Konsep ini merujuk pada cara-cara pemerintah menjalankan tugasnya dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. *Good governance* berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil serta proses pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan warga negara. Transparansi adalah salah satu pilar utama *good governance*. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memahami proses pengambilan keputusan dan mengetahui bagaimana sumber daya publik digunakan. Transparansi membantu mencegah praktik korupsi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Akuntabilitas juga merupakan komponen kunci dari *good governance*. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah dan pejabat publik

bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui mekanisme pelaporan, audit, dan pengawasan yang efektif. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku, serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Efisiensi dalam tata kelola pemerintahan berarti bahwa pemerintah harus menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang paling produktif dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi mencakup pengelolaan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia secara optimal untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah yang efisien dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat adalah aspek lain dari *good governance*. Responsivitas berarti bahwa pemerintah harus tanggap terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat, serta mampu memberikan solusi yang tepat waktu dan efektif. Responsivitas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam *good governance*. Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, berkontribusi dalam penyusunan kebijakan, dan memantau pelaksanaan program pemerintah. Dengan partisipasi yang luas, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rule of law atau supremasi hukum adalah prinsip lain yang mendukung *good governance*. Supremasi hukum berarti bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dan tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum. Supremasi hukum menjamin keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah yang mematuhi prinsip supremasi hukum akan lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Pemerintahan yang baik juga harus memiliki visi jangka panjang dan kebijakan yang berkelanjutan. Visi jangka panjang memungkinkan pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan

kebijakan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Kebijakan yang berkelanjutan memastikan bahwa sumber daya yang ada dikelola dengan bijaksana untuk kepentingan generasi mendatang.

Keadilan dan inklusi sosial adalah elemen penting dalam *good governance*. Keadilan mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial. Inklusi sosial berarti bahwa semua kelompok dalam masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah. Keadilan dan inklusi sosial memperkuat kohesi sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Pengelolaan sumber daya publik yang efektif juga merupakan aspek penting dari *good governance*. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya publik, seperti anggaran dan aset negara, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang efektif mencakup perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang terus-menerus. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Good governance juga melibatkan pengembangan kapasitas institusi pemerintah. Pemerintah yang baik harus memiliki kapasitas yang memadai untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyediakan layanan publik, dan menanggapi tantangan yang muncul. Pengembangan kapasitas mencakup pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sistem manajemen, dan penguatan kerangka hukum dan regulasi. Dengan kapasitas yang kuat, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Dalam konteks global, *good governance* memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang stabil dan damai. Pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat hubungan internasional. Sebaliknya, pemerintahan yang buruk dapat menyebabkan ketidakstabilan, korupsi, dan kemiskinan.

Untuk mewujudkan *good governance*, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap aspek pemerintahan. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dan mengawasi kinerja pemerintah. Sektor swasta harus mendukung pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pembangunan. *Good governance* bukanlah tujuan yang mudah dicapai, tetapi merupakan proses yang terus-menerus. Pemerintah harus terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, serta berupaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik antara semua pihak, *good governance* dapat terwujud dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat.

B. Prinsip-prinsip dalam *Good Governance*

Prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan mengacu pada praktik-praktik yang diterapkan oleh pemerintah, organisasi, atau entitas lain dalam mengatur serta mengendalikan segi keuangan dengan memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa dana dan sumber daya finansial digunakan dengan cermat dan demi tujuan yang sah. Perlu adanya sinergi antara birokrasi dan politik mutlak untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Ishak et al., 2020). Tata kelola yang baik dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan dan menyeimbangkan hasilnya di era digital (Marwan & Bonfigli, 2022). Adapun untuk mewujudkan gagasan tata kelola pemerintahan yang baik, prosesnya merupakan kombinasi unik antara tata kelola pemerintahan yang baik dan kearifan lokal sebagaimana dikemukakan oleh (Susiatiningsih et al., 2021). Selain itu perlu juga memperhatikan pemerintahan lokal sebagaimana dikemukakan oleh Wantu, (2023:1) bahwa arus Tata Dunia Baru (*New Worl Order*) yang banyak melahirkan tantangan-tantangan yang berta terutama bagi negara bekas sosialis atau komunis dan negara-negara dunia ketiga (negara berkembang) yang banyak menghadapi persoalan global, baik ekonomi, politik, maupun sosial.

Adapun partisipan yang mempersepsikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan responsif memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap Pemerintah merupakan bagian dari pencapaian *good governance* (Beshi & Kaur, 2020). Penelitian oleh (Zaitul et al., 2023) terdapat enam prinsip tata kelola pemerintahan, yakni:

1. Keadilan dan kapabilitas
2. Inklusivitas
3. Legitimasi dan arahan
4. Partisipasi
5. Kinerja dan informasi,
6. Transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan (Chien & Thanh, 2022) membahas dampak *good governance* terhadap kepuasan masyarakat mengenai pelayanan administrasi dengan menggunakan beberapa variabel skala SIPAS, yaitu:

1. Variabel dependen, yang terdiri dari aksesibilitas; prosedur administratif; etika dan kapasitas pegawai negeri sipil; hasil prosedur penyelesaian; penerimaan dan penanganan komentar, umpan balik, dan rekomendasi;
2. Variabel independen yaitu kepuasan masyarakat untuk menambah bukti penelitian sebelumnya dan memperkaya literatur penelitian. Selain itu yang menghalangi tercapainya pemerintahan yang baik di Indonesia sendiri aparat penegak hukum yang korup dan elit politik yang tidak bertanggung jawab (Prakasa et al., 2022).

C. Dimensi Tata Kelola dalam Pemerintahan

Kurangnya tata kelola parlementer merupakan sumber dari buruknya tata kelola pemerintahan yang disertai dengan masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial di suatu negara (Jaja & Aditya, 2022). Kurangnya tata kelola parlementer mengacu pada situasi dalam sistem pemerintahan di mana fungsi legislatif, yang terdiri dari parlemen atau badan legislatif, tidak beroperasi dengan efektif atau tidak mampu menjalankan perannya secara efisien dalam pengawasan dan pengendalian pemerintah eksekutif. Kelemahan atau ketidakefektifan sistem tata kelola parlementer ini dapat menjadi akar penyebab sejumlah masalah dalam pemerintahan suatu negara, termasuk tantangan di bidang

politik, ekonomi, dan sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cárcaba et al. (2022), terdapat tiga dimensi utama tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kota: akuntabilitas, efisiensi pemerintah, dan pengendalian korupsi. Dimensi-dimensi ini berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintahan kota dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan warganya.

1. Akuntabilitas dalam konteks tata kelola pemerintahan mengacu pada kewajiban pemerintah dan pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada masyarakat. Ini melibatkan mekanisme pelaporan yang transparan dan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pemerintah dapat diawasi oleh publik. Akuntabilitas membantu menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Efisiensi pemerintah adalah dimensi kedua yang disebutkan oleh Cárcaba et al. (2022). Efisiensi di sini mengacu pada kemampuan pemerintah kota untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang paling efektif dan produktif untuk memberikan layanan publik. Ini mencakup pengelolaan anggaran yang cermat, optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah yang efisien dapat memberikan layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat maksimal bagi warga kota.
3. Pengendalian korupsi adalah dimensi ketiga yang menjadi fokus penelitian Cárcaba et al. (2022). Pengendalian korupsi melibatkan upaya untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi dalam pemerintahan kota. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kota untuk memiliki kebijakan dan mekanisme yang kuat untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak kasus korupsi. Ini termasuk transparansi dalam proses pengadaan, perlindungan bagi pelapor pelanggaran, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.

Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan bersama-sama membentuk kerangka kerja yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kota. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan pengendalian korupsi, pemerintah kota dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kota juga dapat berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Penelitian Cárcaba et al. (2022) membahas pentingnya evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap dimensi-dimensi tata kelola ini untuk memastikan bahwa pemerintah kota terus meningkatkan kinerjanya. Dengan melakukan evaluasi yang rutin, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik. Sebagai hasilnya, kota-kota yang berhasil menerapkan tata kelola yang baik dapat menjadi model bagi kota lain dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warganya. Dengan mengutamakan aspek-aspek ini, pemerintah kota dapat memastikan bahwa ia dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada warga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Kondisi sosial untuk proses tata kelola pemerintahan yang baik di Polandia sendiri terdapat rendahnya efektivitas tindakan kolektif, jaringan hubungan informal yang padat, dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik (Knieć & Goszczyński, 2022). Pembangunan manusia di suatu negara lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi regional daripada oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Radaideh, 2022). Dalam pembangunan manusia, kondisi regional lebih berpengaruh daripada kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya, faktor-faktor regional memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan tingkat pembangunan manusia suatu negara daripada sejauh mana pemerintahan beroperasi secara efisien dan transparan.

Pada organisasi sektor privat memiliki faktor yang mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan, termasuk manajemen yang efisien, strategi bisnis yang tepat, dan kondisi ekonomi (Indrati &

Handayani, 2022). Menurut (Jatmiko & Amalia, 2022) bahwa sistem keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan good governance. Sistem keuangan daerah yang baik bukan hanya tentang mengelola anggaran dengan efisien, tetapi juga tentang menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik secara keseluruhan. Adapun penelitian yang dilakukan (Aneta & Podungge, 2021) bahwa pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui seluruh proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, program dan kegiatan, hingga evaluasi tinjauan audit, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien membantu menciptakan dasar yang kuat untuk good governance, yang mencakup aspek-aspek seperti akuntabilitas, partisipasi, dan integritas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

D. Keadilan dan Inklusivitas dalam Tata Kelola

Keadilan sosial dan inklusivitas adalah dua pilar fundamental dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Keadilan sosial tekanan pada distribusi yang adil dari sumber daya dan layanan publik di antara semua anggota masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau karakteristik pribadi lainnya. Inklusivitas, di sisi lain, menuntut keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara-suara dari berbagai lapisan masyarakat didengar dan diperhitungkan. Distribusi sumber daya yang adil adalah tantangan besar di banyak wilayah, terutama di daerah-daerah dengan disparitas ekonomi yang tinggi. Di Provinsi Gorontalo, tantangan ini mungkin lebih terasa mengingat karakteristik demografi dan geografisnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi sumber daya seperti anggaran, program sosial, dan infrastruktur tidak hanya terfokus pada pusat-pusat kota, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Pada praktiknya, mendorong keadilan sosial memerlukan langkah-langkah konkret seperti memetakan kebutuhan masyarakat, alokasi anggaran yang berkeadilan, dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui pendekatan partisipatif, dimana masyarakat terlibat langsung

dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan di kalangan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

1. Kebijakan Inklusif untuk Mendukung Kelompok Rentan di Gorontalo

Kebijakan inklusif untuk mendukung kelompok rentan di Gorontalo merupakan langkah krusial dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas, sering menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses layanan publik dan manfaat pembangunan. Hambatan-hambatan ini dapat berupa keterbatasan ekonomi, diskriminasi sosial, atau kurangnya infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan inklusif yang tidak hanya menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memberdayakan kelompok-kelompok ini untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Di Gorontalo, program perlindungan sosial yang mencakup bantuan langsung tunai, subsidi kesehatan, dan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin telah menjadi langkah awal yang efektif. Bantuan langsung tunai, misalnya, dapat memberikan dukungan finansial langsung kepada keluarga yang paling membutuhkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Subsidi kesehatan memungkinkan akses yang lebih terjangkau ke layanan medis, yang sangat penting untuk mencegah dan mengobati penyakit. Pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin memastikan bahwa ia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Kebijakan perlindungan sosial ini harus disertai dengan upaya yang lebih luas untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha yang dapat membantu kelompok rentan meningkatkan kemandirian ekonomi. Program pelatihan keterampilan adalah salah satu inisiatif yang dapat memberikan dampak signifikan. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai keterampilan, mulai dari keterampilan teknis seperti menjahit, memasak, atau reparasi, hingga keterampilan digital seperti

pemrograman atau desain grafis. Dengan keterampilan yang relevan, individu dari kelompok rentan dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja atau bahkan memulai usaha sendiri.

Akses ke modal usaha juga merupakan komponen penting dari kebijakan inklusif. Banyak kelompok rentan yang memiliki ide bisnis tetapi tidak memiliki modal untuk memulai. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan pinjaman dengan bunga rendah atau bahkan hibah bagi wirausaha dari kelompok rentan. Selain itu, pengembangan jaringan pasar adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh kelompok rentan memiliki akses ke pasar yang lebih luas. Ini dapat mencakup pembukaan pasar lokal, promosi produk melalui platform digital, atau kemitraan dengan perusahaan besar yang dapat membantu distribusi produk.

Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Pembangunan infrastruktur yang ramah penyandang disabilitas adalah salah satu wujud nyata dari kebijakan inklusif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Fasilitas yang ramah disabilitas mencakup jalur khusus kursi roda, elevator dengan tanda Braille, dan toilet yang dapat diakses oleh semua orang. Dengan memastikan bahwa fasilitas publik dapat diakses oleh semua, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua warga.

Pendidikan inklusif adalah komponen penting dari kebijakan ini. Sekolah-sekolah di Gorontalo harus dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya yang memungkinkan anak-anak penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan anak-anak lainnya. Ini termasuk guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif, bahan ajar yang disesuaikan, dan dukungan teknologi seperti perangkat bantu dengar atau perangkat lunak pembelajaran yang interaktif. Pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak penyandang disabilitas, tetapi juga bagi anak-anak lainnya, karena belajar untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan semua orang, terlepas dari kemampuannya.

Di sektor kesehatan, pelayanan kesehatan yang inklusif berarti memastikan bahwa semua individu, termasuk yang berasal dari kelompok rentan, memiliki akses yang setara ke layanan kesehatan yang berkualitas. Ini dapat mencakup klinik keliling untuk daerah terpencil, pelatihan bagi tenaga medis tentang penanganan pasien dengan kebutuhan khusus, dan kampanye kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan. Misalnya, kampanye kesehatan tentang pencegahan penyakit menular harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan mencakup informasi yang relevan bagi semua kelompok masyarakat.

Pada upaya untuk memberdayakan perempuan, kebijakan inklusif harus mencakup program-program yang mendukung kesetaraan gender. Ini termasuk akses yang setara ke pendidikan dan pelatihan, peluang kerja yang adil, serta perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender. Program pemberdayaan perempuan juga harus mencakup dukungan bagi perempuan wirausaha, seperti pelatihan manajemen bisnis, akses ke pasar, dan pendanaan. Dengan memberdayakan perempuan, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat perekonomian secara keseluruhan, karena perempuan yang mandiri secara ekonomi cenderung menginvestasikan pendapatannya kembali ke keluarga dan komunitas.

Evaluasi dan pemantauan adalah komponen kunci dari kebijakan inklusif. Pemerintah daerah perlu mengembangkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur sejauh mana kebijakan ini berhasil. Indikator ini dapat mencakup tingkat partisipasi kelompok rentan dalam program pemerintah, peningkatan akses ke layanan dasar, dan perubahan dalam indikator kesejahteraan seperti pendapatan rata-rata dan tingkat kemiskinan. Dengan melakukan evaluasi yang rutin, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan.

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal juga penting dalam pelaksanaan kebijakan inklusif. Organisasi masyarakat sipil dapat memberikan perspektif yang berharga tentang kebutuhan kelompok rentan dan membantu dalam pelaksanaan program di lapangan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung kelompok

rentan. Komunitas lokal, sebagai penerima manfaat utama, harus dilibatkan dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasinya. Dengan menerapkan kebijakan inklusif yang komprehensif, Gorontalo dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan stabilitas ekonomi. Dalam jangka panjang, kebijakan inklusif akan membantu Gorontalo mencapai pembangunan yang berkelanjutan, di mana semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan meraih manfaat dari kemajuan ekonomi dan sosial.

2. Evaluasi Dampak Keadilan dan Inklusivitas pada Kemandirian Fiskal

Evaluasi terhadap dampak kebijakan keadilan dan inklusivitas sangat penting dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam menciptakan tata kelola yang adil dan efektif. Kemandirian fiskal, sebagai indikator utama keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri, sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah mengelola keadilan sosial dan inklusivitas. Dalam konteks ini, keadilan sosial mengacu pada upaya untuk memastikan distribusi sumber daya yang merata di seluruh lapisan masyarakat, sementara inklusivitas fokus pada keterlibatan semua kelompok, termasuk kelompok rentan, dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pelaksanaan.

Pemerintah daerah yang mampu menciptakan keadilan sosial dan inklusivitas cenderung memiliki masyarakat yang lebih produktif dan stabil. Masyarakat yang merasa diakui dan didukung cenderung memiliki kepercayaan lebih besar terhadap pemerintah, yang pada akhirnya mendorong partisipasinya dalam kegiatan ekonomi formal. Partisipasi ini penting karena dapat meningkatkan basis pajak daerah, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD). Dengan meningkatkan PAD, daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal.

Untuk memastikan kebijakan keadilan dan inklusivitas benar-benar memberikan kontribusi pada kemandirian fiskal, diperlukan

mekanisme evaluasi yang kuat dan sistematis. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Misalnya, tingkat partisipasi ekonomi dari kelompok rentan, peningkatan akses ke layanan dasar, dan perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap pemerintah dapat menjadi indikator yang relevan.

Indikator kinerja yang dapat digunakan dalam evaluasi mencakup berbagai aspek. Pertama, tingkat partisipasi kelompok rentan dalam program-program pemerintah dapat menunjukkan seberapa inklusif kebijakan tersebut. Kedua, peningkatan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan dapat menjadi indikator keadilan sosial. Ketiga, perubahan dalam indikator kesejahteraan seperti pendapatan rata-rata, tingkat kemiskinan, dan tingkat kemiskinan di antara kelompok rentan juga dapat mencerminkan dampak kebijakan tersebut. Selain indikator kuantitatif, evaluasi juga harus mempertimbangkan aspek kualitatif, seperti perubahan persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan tingkat kepuasan terhadap layanan publik. Persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkatkan partisipasinya dalam membayar pajak dan retribusi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kemandirian fiskal. Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak adil atau tidak inklusif, mungkin enggan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

Evaluasi juga harus mencakup analisis potensi dampak jangka panjang dari kebijakan keadilan dan inklusivitas. Misalnya, kebijakan yang fokus pada pendidikan inklusif dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan dapat memiliki dampak jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas ini dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, evaluasi harus mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan ini dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, evaluasi dampak keadilan dan inklusivitas pada fiskal juga harus memperhatikan keinginan keuangan dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang membutuhkan anggaran besar namun tidak memberikan dampak yang signifikan pada pengurangan ketimpangan sosial atau peningkatan PAD mungkin perlu dikaji ulang.

Sebaliknya, kebijakan yang mampu menciptakan efek multiplikatif dalam perekonomian lokal, seperti peningkatan peluang kerja dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada kemandirian fiskal.

Untuk memastikan bahwa evaluasi ini berjalan dengan baik, pemerintah daerah perlu membangun kapasitas institusional yang memadai. Hal ini meliputi pelatihan bagi pejabat dan staf pemerintah dalam melakukan evaluasi kebijakan, pengembangan sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif, serta kolaborasi dengan pakar dan lembaga penelitian untuk mendapatkan analisis yang mendalam dan objektif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan kebutuhan dan aspirasinya.

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal juga penting dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan keadilan dan inklusivitas. Organisasi masyarakat sipil dapat memberikan perspektif yang berharga tentang kebutuhan kelompok rentan dan membantu dalam pelaksanaan program di lapangan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung kelompok rentan. Komunitas lokal, sebagai penerima manfaat utama, harus dilibatkan dalam setiap tahap evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasinya.

Pada jangka panjang, evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan terhadap dampak keadilan dan inklusivitas pada kemandirian fiskal dapat membantu pemerintah daerah di Gorontalo untuk menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan mandiri secara fiskal, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warga negara.

E. Hubungan *Good Governance* dengan Peningkatan PAD dan Kemandirian Fiskal

Penerapan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal di daerah, termasuk di Provinsi Gorontalo. Prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas, memainkan peran kunci dalam pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks penguatan PAD dan kemandirian fiskal, penerapan tata kelola yang baik tidak hanya berfokus pada pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan kapasitas ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal.

1. Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang memegang peranan sangat penting dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah daerah dalam menyusun, mengalokasikan, dan melaporkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan layanan publik. Sebuah pemerintahan yang transparan memungkinkan masyarakat, lembaga legislatif, dan auditor untuk dengan mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan dana publik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana.

Proses transparansi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya berhenti pada pelaporan anggaran secara formal, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan dan evaluasi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah daerah yang terbuka dalam setiap tahap pengelolaan anggaran akan mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif. Melalui forum publik, konsultasi warga, dan penggunaan teknologi informasi yang memadai, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dana anggaran digunakan dan untuk kepentingan apa saja anggaran tersebut dialokasikan.

Keuntungan utama dari transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah adalah pengurangan potensi penyalahgunaan dana. Dengan adanya akses yang terbuka terhadap informasi keuangan, potensi untuk melakukan penggelembungan anggaran, korupsi, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi dapat diminimalisir. Transparansi juga

memastikan bahwa kebijakan yang diambil dalam pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, lembaga legislatif, maupun pihak-pihak yang berwenang.

Transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Masyarakat yang mengetahui dengan jelas bagaimana dana anggaran digunakan akan lebih termotivasi untuk mendukung kebijakan pajak daerah dan berperan aktif dalam pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini sangat penting, karena masyarakat adalah pihak yang paling langsung merasakan dampak dari kebijakan fiskal yang diterapkan. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengawasan, mereka lebih cenderung membayar pajak dan retribusi daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Transparansi juga mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Ketika pemerintah daerah terbuka mengenai prioritas anggaran dan distribusi sumber daya, ini memungkinkan pemeriksaan terhadap sejauh mana dana digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Masyarakat dan auditor dapat memberikan masukan terkait dengan alokasi anggaran yang lebih baik atau penghapusan anggaran yang tidak efisien, sehingga dana publik dapat digunakan secara lebih optimal.

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang sangat berperan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal. Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan daerah mengacu pada kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam praktiknya, akuntabilitas mencakup beberapa hal penting, seperti pelaporan yang jelas, penggunaan anggaran yang efisien, serta adanya mekanisme evaluasi dan audit yang rutin.

Salah satu aspek utama dari akuntabilitas adalah pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah harus

menyusun laporan keuangan yang akurat dan mudah dipahami, sehingga masyarakat, lembaga legislatif, serta pihak-pihak terkait lainnya dapat memantau dengan jelas penggunaan anggaran daerah. Laporan keuangan yang transparan juga mencakup pencatatan yang terperinci mengenai pendapatan daerah, pengeluaran, serta penerimaan dan pengeluaran lainnya yang berasal dari pajak daerah, retribusi, maupun sumber daya lokal lainnya. Dengan adanya pelaporan yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat melihat apakah anggaran digunakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas juga menuntut adanya penggunaan anggaran yang efisien. Penggunaan anggaran yang efisien berarti setiap alokasi dana harus memberikan nilai yang optimal dengan biaya yang minimal. Pemerintah daerah harus mampu memprioritaskan program-program yang memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, serta memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya menghindari pemborosan, tetapi juga memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan manfaat langsung kepada publik. Salah satu cara untuk mencapai efisiensi adalah dengan melakukan perencanaan anggaran yang matang dan terukur, serta memastikan bahwa implementasi program-program pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Akuntabilitas juga mencakup adanya mekanisme evaluasi dan audit yang rutin. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dapat tercapai dengan baik, serta apakah penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang diinginkan. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor eksternal lainnya memberikan penilaian objektif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk apakah ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Mekanisme evaluasi dan audit ini penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah tidak hanya dikelola dengan baik, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan sistem akuntabilitas yang baik, pemerintah daerah akan dapat memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh, baik dari pajak daerah, retribusi, atau sumber daya lainnya, benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat ketika mereka

melihat adanya pelaporan yang jelas, penggunaan anggaran yang efisien, serta adanya pengawasan yang ketat melalui evaluasi dan audit. Kepercayaan ini akan mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi daerah, termasuk membayar pajak daerah dan mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam prinsip *good governance*, yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuka saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, seperti forum konsultasi publik dan pelaporan anggaran yang transparan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas dan mitra dalam pengelolaan dana publik.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Salah satunya adalah melalui forum konsultasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, atau bahkan melaporkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah juga dapat menyediakan akses informasi yang mudah dipahami terkait perencanaan anggaran, pengalokasian dana, serta realisasi penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan anggaran yang transparan juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan cara yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan anggaran akan lebih kritis terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Partisipasi masyarakat juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi penyimpangan anggaran, seperti penyalahgunaan dana atau penggelembungan anggaran, sehingga potensi kerugian publik dapat diminimalisir.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat meningkatkan dukungan terhadap kebijakan pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat yang merasa memiliki andil dalam pengelolaan anggaran akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan pajak daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan mengurangi resistensi terhadap pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini juga berkontribusi pada pencapaian target PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang merupakan salah satu indikator kemandirian fiskal.

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, maka pengelolaan keuangan daerah akan lebih berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi publik. Ini tidak hanya menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya lokal. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat menciptakan iklim yang lebih sehat dalam tata kelola pemerintahan daerah, yang mengarah pada penguatan kemandirian fiskal dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam good governance sangat penting dalam pengelolaan anggaran daerah untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan dengan cara yang tepat guna dan berdaya guna. Efisiensi mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dengan biaya yang minimal, sementara efektivitas menilai sejauh mana penggunaan anggaran tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan kedua prinsip ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah, sehingga dapat mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.

Pemerintah daerah perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap alokasi anggaran untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan hasil yang maksimal. Pengelolaan anggaran yang efisien melibatkan identifikasi sektor-sektor yang memerlukan pembiayaan lebih banyak dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Selain

itu, prinsip efisiensi juga mengharuskan pemerintah untuk mengurangi pemborosan dan meminimalkan biaya administrasi yang tidak perlu. Melalui alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa anggaran digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Penerapan prinsip efisiensi juga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Efektivitas berfokus pada hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran, yaitu sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran dapat tercapai. Dalam konteks daerah, tujuan-tujuan ini bisa berupa peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dengan alokasi anggaran yang efisien, program-program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Misalnya, sektor pendidikan dan kesehatan yang mendapatkan alokasi anggaran lebih besar, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas layanan di kedua sektor tersebut, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pembangunan manusia dan daya saing daerah.

Salah satu contoh konkret dari penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas adalah optimalisasi sumber daya lokal dan penerapan kebijakan fiskal yang tepat. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya lokal lainnya untuk meningkatkan PAD secara signifikan. Misalnya, pengelolaan potensi wisata lokal, pertanian, atau industri kreatif yang lebih efisien dan berbasis pada potensi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal, pemerintah daerah yang mengelola anggaran secara efektif akan dapat mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan, serta dapat merencanakan pengeluaran dengan lebih hati-hati dan terukur.

Efektivitas penggunaan anggaran tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga pada kemandirian fiskal daerah. Sebuah daerah yang berhasil mengelola anggarannya secara efektif akan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan lebih bergantung pada sumber pendanaan lokal. Hal ini akan memperkuat posisi fiskal daerah, menciptakan stabilitas ekonomi, serta

memungkinkan pemerintah daerah untuk berinvestasi lebih banyak dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kemandirian fiskal, pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang lebih berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada anggaran pusat.

5. Optimalisasi Sumber Daya Lokal

Optimalisasi sumber daya lokal merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan *good governance*, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal di Provinsi Gorontalo. Provinsi ini memiliki potensi besar dalam berbagai sektor yang dapat digali lebih dalam untuk memperkuat ekonomi daerah dan menciptakan keberlanjutan fiskal. Pemanfaatan yang optimal terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi lainnya sangat penting dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pada konteks Provinsi Gorontalo, sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Pengelolaan yang baik terhadap sektor pertanian, misalnya, dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil pertanian, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil perikanan yang kaya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor, yang berpotensi menghasilkan PAD yang lebih tinggi. Begitu juga dengan sektor pariwisata yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional, jika dikelola dengan baik. Melalui kebijakan yang mendukung pengelolaan sektor-sektor tersebut, pemerintah daerah dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi ekonomi daerah.

Salah satu kunci untuk mencapai optimalisasi sumber daya lokal adalah melalui pengembangan kebijakan yang tepat dan dukungan terhadap sektor-sektor unggulan. Misalnya, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di sektor pertanian dan perikanan, seperti penyediaan fasilitas penyimpanan hasil pertanian, pengolahan produk perikanan, dan jaringan distribusi yang efisien. Hal ini dapat mengurangi pemborosan dan memperpanjang umur simpan produk,

sehingga meningkatkan daya saing produk daerah di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, sektor pariwisata dapat didorong melalui pengembangan destinasi wisata yang lebih menarik dan promosi yang efektif, serta peningkatan fasilitas pendukung bagi wisatawan.

Dengan tata kelola yang baik, pemerintah daerah juga dapat mengidentifikasi potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan riset dan pengembangan (R&D) untuk menemukan cara-cara inovatif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi dalam pertanian atau perikanan yang lebih ramah lingkungan. Dukungan terhadap UMKM yang bergerak di sektor lokal juga akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, yang pada akhirnya memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan PAD.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal juga sangat penting. Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan dengan masyarakat lokal dan sektor swasta untuk memastikan bahwa potensi lokal dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan pariwisata melalui pemberdayaan dalam bentuk usaha homestay, pemandu wisata lokal, atau produk kerajinan khas daerah yang dapat dipasarkan kepada wisatawan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung penguatan PAD melalui sektor-sektor yang langsung melibatkan masyarakat.

Optimalisasi sumber daya lokal yang berbasis pada *good governance* akan menghasilkan keberlanjutan ekonomi daerah yang menjadi dasar bagi kemandirian fiskal jangka panjang. Dengan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, daerah akan memiliki lebih banyak kebebasan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan meningkatnya kontribusi sektor lokal terhadap PAD, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak dana untuk mengelola kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan yang efisien dan optimal

terhadap sumber daya lokal adalah kunci dalam mencapai tujuan kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

6. Mengurangi Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat

Penerapan prinsip *good governance* berperan sangat penting dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang sering kali menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan daerah. Ketergantungan ini dapat membatasi fleksibilitas fiskal dan kebebasan pemerintah daerah dalam merencanakan serta melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pengurangan ketergantungan pada dana pusat menjadi sangat penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi lokal yang ada di sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan sumber daya alam, untuk meningkatkan kontribusi PAD. Pengelolaan yang baik terhadap sektor-sektor ini tidak hanya akan memperbesar penerimaan daerah tetapi juga menciptakan keberlanjutan ekonomi yang lebih stabil dan mandiri. Sebagai contoh, optimalisasi potensi pariwisata yang belum tergarap dengan baik dapat mendatangkan pendapatan signifikan melalui pajak daerah dan retribusi yang langsung diterima oleh pemerintah daerah. Hal yang sama berlaku untuk sektor pertanian dan perikanan, yang jika dikelola dengan efisien, dapat menghasilkan pendapatan yang meningkatkan PAD.

Dengan meningkatnya PAD yang bersumber dari sektor-sektor lokal, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai program pembangunan daerah tanpa harus bergantung pada dana alokasi umum (DAU) atau dana perimbangan lainnya dari pusat. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari sumber daya lokal lebih mudah dikendalikan dan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan daerah, dibandingkan dengan dana pusat yang sering kali memiliki ketentuan yang mengikat dan proses administrasi yang rumit. Ini akan memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan

kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak positif langsung bagi masyarakat.

Peningkatan kemandirian fiskal juga memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola anggaran dan merencanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan visi jangka panjang daerah. Kemandirian fiskal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari solusi untuk membiayai pembangunan, termasuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta atau menggali potensi lain yang sebelumnya belum tergarap. Secara lebih luas, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat juga akan memperkuat posisi tawar pemerintah daerah dalam negosiasi dengan pemerintah pusat. Ketika daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup, mereka dapat lebih fleksibel dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini pada gilirannya akan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tidak tergantung pada aliran dana eksternal.

7. Dampak Positif Penerapan *Good Governance* terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang efektif di Provinsi Gorontalo dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara khusus, beberapa dampak positif yang dihasilkan dari penerapan tata kelola yang baik ini mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan penciptaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Setiap aspek ini memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo.

a. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Penerapan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah dapat memaksimalkan potensi sumber daya lokal dan meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu faktor utama yang berperan dalam peningkatan PAD adalah kebijakan pajak daerah yang lebih adil dan efektif. Pemerintah daerah yang transparan dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan

akan lebih mudah mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Selain itu, dengan adanya sistem yang efisien dalam pengelolaan sumber daya daerah, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan, pendapatan yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut dapat dimaksimalkan.

Dengan kebijakan yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah juga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka. Kejelasan mengenai penggunaan dana publik akan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meminimalisir ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peningkatan PAD ini tidak hanya berfungsi untuk mendanai kegiatan operasional pemerintah, tetapi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan proyek-proyek pembangunan yang lebih luas, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Kemandirian Fiskal

Penerapan *good governance* yang baik di Provinsi Gorontalo juga akan mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah. Salah satu tujuan utama dari *good governance* adalah mengurangi ketergantungan pada dana alokasi umum (DAU) dan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan meningkatkan PAD melalui pengelolaan sumber daya lokal yang optimal, pemerintah daerah akan mampu mengurangi ketergantungan ini dan menciptakan sistem fiskal yang lebih mandiri.

Optimalisasi sumber daya lokal sangat penting dalam menciptakan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Misalnya, pengelolaan sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Ketika pemerintah daerah mengoptimalkan potensi daerah, mereka akan memiliki lebih banyak kebebasan fiskal untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa harus bergantung pada aliran dana dari pusat. Kemandirian fiskal yang lebih tinggi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merespons

perubahan ekonomi dan menciptakan kebijakan yang lebih efisien.

c. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Penerapan *good governance* yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan lebih cenderung mendukung kebijakan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat membantu mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki kendali atas bagaimana anggaran digunakan dan dapat melihat dampaknya, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak dan retribusi. Peningkatan kepercayaan ini juga dapat memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan fiskal dan mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

d. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* memungkinkan terciptanya pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, pemerintah daerah dapat fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan baik akan lebih mampu mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang mendukung pembangunan jangka panjang.

Sebagai contoh pemerintah daerah dapat memprioritaskan alokasi anggaran untuk proyek-proyek yang

mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan lokal, seperti pertanian yang ramah lingkungan, pariwisata berkelanjutan, dan perikanan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat direncanakan secara lebih strategis, dengan perhatian yang lebih besar terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan *good governance* yang menciptakan pembangunan yang berkelanjutan juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, baik domestik maupun asing. Ketika pemerintah daerah dapat memberikan kepastian hukum, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan kemudahan dalam perizinan, sektor swasta akan lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB IV

DESENTRALISASI FISKAL

Desentralisasi fiskal merujuk pada pemindahan sebagian besar wewenang dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, dan responsivitas dalam penyediaan layanan publik. Proses ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki lebih banyak kendali atas sumber daya keuangan, termasuk pengumpulan pajak dan pengelolaan anggaran, sehingga dapat menyesuaikan kebijakan fiskalnya dengan kebutuhan lokal.

A. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi negara-bangsa telah menjadi salah satu tren politik global yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sebagaimana diungkapkan oleh Matsui (2002) dan Kimura (2006). Fenomena ini mencerminkan upaya berbagai negara, baik yang berkembang maupun maju, untuk mengalihkan sebagian kewenangan pengelolaan administratif dan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Proses desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki layanan publik, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di berbagai wilayah. Dukungan dari organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menunjukkan adanya pengakuan terhadap potensi manfaat desentralisasi di Indonesia, yang meliputi bantuan teknis, saran kebijakan, dan dukungan keuangan untuk memperlancar implementasinya (Saito, 2008).

Dukungan internasional ini mencerminkan keyakinan bahwa desentralisasi mampu membawa perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan publik, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mendorong pembangunan yang inklusif. Namun,

meskipun desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal, Malley (2003) mengungkapkan bahwa, berdasarkan bukti anekdot, proses ini di Indonesia cenderung dikuasai oleh kelompok elit lokal, yang lebih berorientasi pada kepentingannya daripada mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat umum. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam memastikan bahwa desentralisasi tidak hanya menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan elit, tetapi juga benar-benar memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal menjadi aspek penting dalam mendukung kapasitas otonomi daerah. Keuangan daerah, yang merupakan sumber daya utama dalam otonomi daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran secara mandiri (Yulianadewi et al., 2022). Dewi dkk. (2021) menekankan pentingnya berbagai rasio kinerja keuangan, seperti rasio derajat desentralisasi dan rasio efektivitas, yang terus mengalami peningkatan dan kontribusi pada kemandirian daerah. Dengan pengelolaan keuangan secara lebih otonom, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan dan strategi keuangan yang lebih efektif untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hubungan antara fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik di tingkat daerah dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada konteks administrasi publik, Simon mengartikan administrasi sebagai kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi, yang merupakan bagian dari ilmu organisasi, melibatkan upaya kolaboratif yang memiliki tingkat rasionalitas tinggi (Waldo dalam Nasution, 2016). Administrasi publik melibatkan kerjasama orang-orang dalam organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti yang dijelaskan oleh Luther Gulick bahwa administrasi berkaitan dengan menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditentukan (Syafii, 2006). Administrasi publik berperan penting dalam pelaksanaan desentralisasi, karena pemerintah daerah perlu mengembangkan kapasitas administratif untuk mengelola otonomi secara efektif.

Manaf (2016) membahas pentingnya praktik berbagi pengetahuan manajerial yang implisit (pengetahuan tacit) dan peran

kepribadian individu dalam kinerja kerja di otoritas lokal. Pengalaman manajerial ini penting dalam konteks desentralisasi, karena pemerintah daerah memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang mampu untuk mengelola tugas-tugas baru yang menjadi tanggung jawab. Administrasi publik yang efektif menjadi landasan untuk pelaksanaan desentralisasi yang sukses, karena pemerintah daerah perlu memastikan bahwa ia memiliki struktur dan proses yang tepat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi di Indonesia memberikan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, memperbaiki layanan publik, dan memperkuat partisipasi dalam proses pemerintahan. Di sisi lain, desentralisasi juga berisiko memperkuat kekuasaan elit lokal dan menciptakan ketimpangan baru jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memadukan dan mengadakan pelaksanaan desentralisasi, memastikan bahwa tujuan-tujuan awal desentralisasi, seperti peningkatan efisiensi dan keadilan sosial, dapat tercapai.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung kapasitas administrasi dan keuangan pemerintah daerah. Hal ini termasuk pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah, peningkatan sistem akuntabilitas, dan penciptaan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dengan memperkuat kapasitas administrasi publik, desentralisasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata di Indonesia.

Desentralisasi juga menuntut adanya koordinasi yang baik antara berbagai tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat perlu memberikan panduan dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam mengelola otonomi. Selain itu, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan kebijakan pelaksanaan pengawasan. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa desentralisasi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk sekelompok elit lokal.

B. Dimensi dalam Ilmu Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik merupakan bidang yang kompleks dan multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Terdapat enam dimensi utama dalam administrasi publik yang harus dipahami untuk memperoleh gambaran lengkap tentang bagaimana administrasi publik beroperasi dan bagaimana efektivitasnya dapat ditingkatkan. Dimensi-dimensi ini meliputi kebijakan, struktur organisasi, etika, lingkungan, kinerja, dan manajemen, yang masing-masing berperan penting dalam keberhasilan sebuah organisasi publik.

1. **Dimensi Kebijakan:** Dimensi ini fokus pada keputusan-keputusan yang diambil mengenai apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi publik. Kebijakan publik mencerminkan arah dan prioritas pemerintah dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Dalam proses ini, berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum, berkontribusi untuk menentukan langkah-langkah strategi yang akan diambil. Dimensi kebijakan penting karena menentukan apa yang akan menjadi fokus perhatian organisasi publik dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan untuk mencapainya.
2. **Dimensi Struktur Organisasi:** Dimensi ini mengacu pada pengaturan dan pembagian tugas dalam suatu organisasi publik. Struktur organisasi menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah diputuskan. Ini mencakup pembagian kerja, hierarki, dan mekanisme yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Struktur organisasi yang baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, koordinasi yang lebih baik antara berbagai unit, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya.
3. **Dimensi Etika:** Etika dalam administrasi publik adalah pedoman moral yang mengarahkan perilaku pegawai publik. Dimensi ini dianggap sebagai sistem sensor karena membantu organisasi dalam memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan standar moral dan hukum yang berlaku. Etika berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah. Dengan etika yang kuat, organisasi publik dapat mencegah korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar bertujuan untuk kepentingan publik.

4. Dimensi Lingkungan: Administrasi publik tidak beroperasi dalam vakum; Hal ini sangat dipengaruhi oleh dimensi lingkungan yang mencakup faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lingkungan eksternal dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan, serta bagaimana organisasi publik bereaksi terhadap perubahan. Dinamika lingkungan ini menuntut organisasi masyarakat untuk tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan agar tetap relevan dan efektif dalam melayani masyarakat. Perubahan kebijakan, tekanan politik, dan perubahan sosial dapat mempengaruhi bagaimana organisasi masyarakat menjalankannya.
5. Dimensi Kinerja: Kinerja organisasi publik sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimensi ini berkaitan dengan evaluasi hasil dari berbagai kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Melalui evaluasi kinerja, organisasi dapat menilai apakah kebijakan yang diterapkan efektif dan apakah sumber daya telah digunakan secara efisien. Kinerja yang baik mencerminkan bahwa organisasi publik mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara yang efisien dan efektif, sementara kinerja yang buruk mungkin menunjukkan perlunya revisi kebijakan atau perbaikan dalam implementasi.
6. Dimensi Manajemen: Dimensi ini fokus pada bagaimana prinsip-prinsip manajemen diterapkan dalam implementasi kebijakan publik. Manajemen dalam administrasi publik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Fungsi manajemen keuangan, misalnya, adalah tanggung jawab utama seorang pemimpin dalam organisasi sektor publik, meskipun operasionalnya ditangani oleh departemen keuangan atau dinas terkait. Manajemen yang efektif memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, bahwa sumber daya digunakan secara efisien, dan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.

Pada konteks pengelolaan keuangan daerah, dimensi manajemen menjadi sangat relevan. Manajemen keuangan yang baik di tingkat daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih efisien, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa pengeluaran sejalan dengan kebijakan prioritas. Fungsi manajemen keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, pengendalian biaya, pengumpulan pendapatan, dan pelaporan keuangan, yang semuanya harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keinginan fiskal.

Dengan memahami keenam dimensi ini, organisasi publik dapat lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang efektif, serta memastikan bahwa ia tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dimensi-dimensi ini saling terkait dan saling mempengaruhi; Keberhasilan dalam satu dimensi dapat meningkatkan efektivitas di dimensi lain. Misalnya, struktur organisasi yang jelas dan etika yang kuat dapat mendukung kinerja yang lebih baik, sementara manajemen yang efektif dapat membantu dalam pengelolaan lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dalam administrasi publik yang memperhatikan semua dimensi ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

C. Peran Sumber Daya Lokal dalam Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal menjadi tujuan utama banyak daerah di Indonesia dalam era desentralisasi, termasuk Provinsi Gorontalo. Kemandirian fiskal berarti kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan dan pembangunan daerahnya sendiri tanpa ketergantungan besar pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam upaya mencapai kemandirian fiskal, optimalisasi sumber daya lokal merupakan kunci utama. Sumber daya lokal yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.

1. Identifikasi Potensi Sumber Daya Lokal di Gorontalo

Provinsi Gorontalo, yang terletak di wilayah Sulawesi, Indonesia, memiliki beragam potensi sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Kemandirian

fiskal mengacu pada kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri guna membiayai pembangunan dan operasional tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Identifikasi dan optimalisasi sumber daya lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi sumber daya lokal di Gorontalo dapat dimasukkan ke dalam tiga kategori utama: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya Budaya.

a. Sumber Daya Alam (SDA)

Perikanan Gorontalo memiliki garis pantai yang panjang dan perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Potensi ini menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Perikanan tangkap dan budidaya ikan menjadi dua subsektor utama yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Beberapa jenis ikan laut seperti tuna, cakalang, dan kerapu memiliki nilai ekonomi tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Untuk memaksimalkan potensi perikanan, pemerintah daerah dapat memperkuat infrastruktur pelabuhan dan pasar ikan, meningkatkan akses terhadap teknologi perikanan modern, serta mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk pengolahan hasil perikanan. Selain itu, budidaya rumput laut juga memiliki prospek cerah sebagai komoditas ekspor.

Pertanian dan Perkebunan Sektor pertanian dan perkebunan di Gorontalo memiliki potensi besar, terutama dengan komoditas unggulan seperti jagung, kelapa, dan cengkih. Gorontalo dikenal sebagai salah satu produsen jagung terbesar di Indonesia, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Optimalisasi sektor pertanian dapat dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, penggunaan bibit unggul, serta penerapan teknologi pertanian modern. Diversifikasi produk pertanian menjadi bahan olahan seperti minyak kelapa, pati jagung, dan olahan rempah-rempah dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal.

Pariwisata Alam Gorontalo memiliki kekayaan alam yang mempesona, yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Pantai Olele dengan keindahan bawah

lautnya menjadi magnet bagi wisatawan yang menyukai snorkeling dan diving. Danau Limboto, dengan keunikan ekosistemnya, juga menjadi destinasi yang menarik bagi ekowisata dan penelitian lingkungan. Untuk mengembangkan sektor pariwisata, perlu adanya investasi dalam pengembangan infrastruktur pariwisata seperti akses jalan, fasilitas penginapan, dan informasi pusat wisata. Selain itu, promosi wisata berbasis digital dan kolaborasi dengan agen perjalanan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterampilan Lokal Penduduk Gorontalo memiliki berbagai keterampilan tradisional yang dapat diberdayakan, seperti pembuatan kerajinan tangan dari anyaman, tenun, dan kerajinan logam. Keterampilan ini dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan industri kreatif lokal yang berorientasi pada pasar nasional dan internasional. Pemerintah daerah dapat mendukung pengembangan keterampilan lokal melalui pelatihan kewirausahaan, penyediaan modal usaha, serta fasilitas akses ke pasar. Dengan mengangkat nilai-nilai budaya lokal dalam produk kerajinan, Gorontalo dapat menciptakan merek lokal yang khas dan kompetitif.

Wirausaha Lokal Potensi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gorontalo sangat besar, terutama yang berfokus pada produk lokal. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti makanan olahan, fesyen berbasis kain tradisional, dan produk kreatif lainnya. Dukungan terhadap wirausaha lokal dapat dilakukan dengan membangun ekosistem bisnis yang kondusif, menyediakan akses ke pembiayaan, serta mengadakan pameran dan festival produk lokal untuk memperluas jaringan pemasaran. Inkubator bisnis juga dapat menjadi wadah untuk mengembangkan dan mengembangkan inovasi di kalangan wirausaha muda.

c. Sumber Daya Budaya

Budaya dan Tradisi Budaya Gorontalo yang kaya dan beragam dapat menjadi aset penting dalam pengembangan sektor pariwisata budaya. Tradisi musik seperti karambangan dan tari-tarian lokal seperti Tari Polopalo dapat menjadi daya tarik wisata

yang unik. Selain itu, ritual adat dan upacara tradisional juga memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan domestik dan internasional. Pengembangan sektor ini dapat dilakukan dengan mengadakan festival budaya tahunan, membangun pusat kebudayaan, serta melibatkan komunitas lokal dalam pelestarian dan promosi budaya. Edukasi tentang pentingnya pelestarian budaya kepada generasi muda juga penting untuk menjaga kelestarian warisan budaya.

Pariwisata Budaya Pariwisata berbasis budaya dapat menjadi salah satu penggerak utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal Gorontalo. Dengan mengembangkan paket wisata yang menggabungkan wisata alam dan budaya, daerah ini dapat menawarkan pengalaman wisata yang beragam dan mendalam. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata dapat memperkuat promosi wisata budaya. Pengembangan desa wisata yang menonjolkan kehidupan tradisional dan produk budaya lokal juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

d. Strategi Optimalisasi Sumber Daya Lokal

Untuk mewujudkan optimalisasi sumber daya lokal dan kemandirian fiskal, Gorontalo perlu mengadopsi strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategi yang dapat diambil antara lain:

- 1) Pemetaan dan Penilaian Sumber Daya Melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap potensi sumber daya lokal yang dimiliki serta menilai kapasitas dan daya saingnya di pasar. Hal ini akan membantu dalam penyusunan kebijakan yang berbasis data dan fokus pada prioritas sektor-sektor.
- 2) Pengembangan Infrastruktur Investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas komunikasi akan mendukung pengembangan sektor-sektor berbasis sumber daya lokal. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas.
- 3) Kemitraan dan Kolaborasi Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan sumber

daya lokal. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pemanfaatan sumber daya lokal.

- 4) Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan akan memperkuat daya saing lokal. Program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal akan membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing.
- 5) Promosi dan Branding Membuat strategi promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk dan destinasi wisata lokal ke pasar yang lebih luas. Branding daerah yang kuat akan meningkatkan daya tarik investasi dan kunjungan wisatawan.

Dengan strategi yang tepat, potensi sumber daya lokal di Gorontalo dapat dioptimalkan untuk mendukung kemandirian fiskal, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

Pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah di Gorontalo adalah langkah strategis yang krusial dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, pemerintah daerah dapat memperkuat perekonomian lokal melalui pengembangan industri berbasis lokal, promosi pariwisata berkelanjutan, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan sumber daya lokal.

Pengembangan industri berbasis lokal merupakan salah satu langkah penting dalam memanfaatkan sumber daya alam Gorontalo. Sebagai salah satu produsen jagung terbesar di Indonesia, Gorontalo memiliki peluang besar untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian. Pengolahan jagung menjadi berbagai produk seperti tepung jagung, pakan ternak, dan makanan olahan lainnya dapat meningkatkan nilai tambah produk tersebut sebelum dipasarkan. Selain jagung, sektor perikanan juga memiliki potensi besar dengan hasil laut yang melimpah. Pendirian pabrik pengolahan ikan untuk memproduksi produk beku atau

kaleng dapat mendukung ekspor dan memperluas pasar. Untuk mendukung pengembangan ini, pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan kepada masyarakat lokal tentang teknologi pengolahan modern, pengemasan, dan standar kualitas internasional. Kerja sama dengan sektor swasta juga menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan industri pengolahan berbasis lokal.

Di sektor pariwisata, Gorontalo memiliki destinasi wisata unggulan seperti Pantai Olele dan Danau Limboto yang menarik wisatawan dengan keindahan alamnya. Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti peningkatan akses transportasi, penyediaan akomodasi yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya sangat penting untuk mendukung sektor ini. Kampanye promosi wisata yang menonjolkan keunikan alam dan budaya Gorontalo, baik di tingkat nasional maupun internasional, perlu dilakukan secara intensif. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dapat meningkatkan visibilitas destinasi wisata Gorontalo. Selain itu, penyelenggaraan festival budaya tahunan yang menampilkan tradisi musik dan tari lokal dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya daerah.

Dukungan terhadap UMKM juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. UMKM di Gorontalo memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk-produk lokal yang kompetitif di pasar nasional, seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan fesyen berbasis kain tradisional. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Selain itu, pelatihan manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran juga perlu diberikan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha lokal. Partisipasi UMKM dalam pameran nasional dan internasional dapat membuka peluang pasar baru dan meningkatkan eksposur produk-produk lokal Gorontalo.

Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan sumber daya lokal adalah langkah strategi lain yang perlu dilakukan. Pemerintah daerah harus mengembangkan kebijakan investasi yang menarik bagi strategi sektor-sektor berbasis sumber daya lokal. Pemberian insentif investasi seperti pengurangan pajak dan kemudahan perizinan bagi investor dapat mendorong investasi di

Gorontalo. Selain itu, penyederhanaan proses perizinan usaha, pengurangan biaya birokrasi, dan dukungan hukum yang kuat bagi pelaku usaha lokal perlu diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Implementasi langkah-langkah ini harus dilakukan secara bertahap dengan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan program dan memastikan semua sektor yang terlibat bekerja secara sinergis. Evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk menilai dampak program terhadap peningkatan pendapatan daerah dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dengan langkah-langkah strategi yang tepat, Gorontalo dapat memanfaatkan sumber daya lokalnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Peningkatan pendapatan dari sektor-sektor ini tidak hanya akan memperkuat perekonomian daerah tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan mewujudkan Gorontalo menjadi daerah yang mandiri secara fiskal dan berdaya saing tinggi.

3. Studi Kasus atau Contoh Sukses Optimalisasi Sumber Daya Lokal

Optimalisasi sumber daya lokal merupakan strategi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kemandirian fiskal di Gorontalo. Beberapa studi kasus sukses berikut menggambarkan bagaimana pemanfaatan potensi lokal telah membawa perubahan signifikan dalam perekonomian daerah.

a. Studi Kasus 1: Pengembangan Jagung di Gorontalo

Gorontalo dikenal sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia, dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai inisiatif untuk memaksimalkan potensi ini. Salah satu langkah penting adalah melalui Program Intensifikasi Pertanian. Program ini fokus pada peningkatan hasil panen jagung dengan memperkenalkan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan benih unggul, sistem irigasi yang lebih efisien, dan pelatihan teknik pertanian terbaru bagi petani lokal. Hasilnya,

produktivitas lahan pertanian meningkat signifikan, dan petani memperoleh hasil panen yang lebih baik.

Kemitraan dengan perusahaan swasta juga berperan kunci. Pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan pengolah hasil pertanian untuk menjamin penyerapan hasil panen petani. Kemitraan ini memberikan jaminan harga yang stabil, sehingga petani tidak lagi terjebak dalam kemacetan harga pasar yang merugikan. Perusahaan swasta yang terlibat juga membantu dalam pemasaran produk, baik di pasar domestik maupun ekspor, yang secara keseluruhan meningkatkan daya saing jagung Gorontalo. Upaya pengolahan jagung menjadi produk turunan seperti pakan ternak dan minyak jagung mulai dikembangkan, memberikan nilai tambah pada komoditas lokal. Dengan adanya industri pengolahan ini, tidak hanya pendapatan petani yang meningkat, tetapi juga tercipta lapangan kerja baru di sektor industri.

b. Studi Kasus 2: Wisata Bahari di Olele

Pantai Olele adalah salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal di Gorontalo, terutama karena keindahan bawah lautnya yang mempesona. Untuk mengoptimalkan potensi wisata ini, pemerintah daerah menerapkan strategi pengembangan ekowisata. Pendekatan ini melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan pantai dan laut. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penjaga lingkungan tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari aktivitas wisata.

Pelatihan pemandu wisata juga diberikan kepada penduduk setempat untuk meningkatkan kualitas layanan wisata. Pelatihan ini meliputi pengetahuan tentang ekosistem laut, teknik pemanduan, dan keterampilan komunikasi dengan wisatawan. Pemandu wisata lokal yang berlatarbelakang mampu memberikan pengalaman yang lebih menarik dan edukatif kepada pengunjung, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi destinasi wisata tersebut. Di era digital, promosi melalui media sosial dan situs pariwisata resmi menjadi kunci dalam menarik wisatawan domestik dan internasional. Kampanye digital yang menonjolkan keindahan bawah laut Pantai Olele serta aktivitas wisata seperti

snorkeling dan diving berhasil meningkatkan jumlah kunjungan. Selain itu, kolaborasi dengan influencer dan travel blogger memperluas jangkauan promosi, membuat Pantai Olele semakin dikenal di berbagai kalangan.

c. Studi Kasus 3: Kerajinan Tangan dan Batik Gorontalo

Kerajinan tangan dan batik khas Gorontalo adalah potensi lokal lainnya yang berhasil dioptimalkan. Pemerintah daerah mendukung pengembangan sektor ini melalui inkubator bisnis yang menyediakan ruang kerja, pelatihan, dan pemasaran bagi pelaku UMKM di bidang kerajinan. Inkubator ini membantu pengrajin lokal dalam meningkatkan kualitas produk, memperbaiki desain, dan menemukan pasar baru untuk produknya.

Festival budaya tahunan juga menjadi platform penting dalam mempromosikan kerajinan lokal. Festival ini tidak hanya menampilkan produk-produk kerajinan tangan dan batik, tetapi juga budaya dan tradisi Gorontalo, seperti tarian dan musik tradisional. Dengan menarik perhatian wisatawan dan pembeli dari berbagai daerah, festival ini meningkatkan visibilitas dan penjualan produk lokal. Selain itu, kolaborasi dengan desainer dan pelaku industri fashion membantu memperkenalkan batik Gorontalo ke panggung nasional dan internasional. Produk-produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi pasar lokal tetapi juga bersaing di pasar yang lebih luas, membawa pengakuan dan apresiasi terhadap warisan budaya Gorontalo.

d. Kunci Sukses dalam Optimalisasi Sumber Daya Lokal

Keberhasilan Gorontalo dalam mengoptimalkan sumber daya lokalnya dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama:

- 1) Pendekatan Berbasis Komunitas: Inisiatif yang melibatkan komunitas lokal dalam setiap tahap pengembangan memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap sumber daya. Partisipasi aktif masyarakat lokal memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dimanfaatkan secara luas dan berkelanjutan.
- 2) Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Kemitraan dengan perusahaan swasta membantu dalam menyediakan sumber daya, keanggotaan, dan pasar bagi produk lokal. Ini

memperkuat rantai nilai lokal dan menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis.

- 3) Kebijakan yang Mendukung: Kebijakan daerah yang proaktif dalam mendukung pengembangan strategi sektor-sektor berbasis sumber daya lokal memberikan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Insentif investasi, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur menjadi pendorong utama dalam menarik investasi dan memfasilitasi pengembangan usaha lokal.
- 4) Inovasi dan Diversifikasi: Upaya untuk mengembangkan produk baru, memanfaatkan teknologi, dan memperluas pasar menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Diversifikasi produk memastikan bahwa perekonomian daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor atau komoditas saja.

Dengan upaya-upaya ini, Gorontalo telah menunjukkan bagaimana pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan PAD dan mendukung kemandirian fiskal. Dengan terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi, Gorontalo dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

D. Tantangan dan Hambatan dalam Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal, yang bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan sumber dayanya, menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Tantangan yang dihadapi meliputi aspek administrasi, kapasitas sumber daya manusia, serta regulasi dan kebijakan.

1. Tantangan Administrasi dan Manajemen dalam Pengelolaan Fiskal

Tantangan administrasi dan manajemen dalam pengelolaan fiskal menjadi salah satu aspek krusial dalam konteks desentralisasi fiskal yang bertujuan memperkuat otonomi daerah. Kompleksitas sistem administrasi keuangan daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan koordinasi antarlembaga adalah tiga pilar tantangan utama yang

memerlukan perhatian serius untuk memastikan pengelolaan fiskal yang efektif dan berkelanjutan.

a. Kompleksitas Sistem Administrasi Keuangan Daerah

Pengelolaan fiskal yang terdesentralisasi memerlukan sistem administrasi keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, banyak pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam membangun dan mengoperasikan sistem keuangan yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Sistem administrasi keuangan daerah sering kali dibebani oleh proses yang rumit dan birokrasi yang kaku. Proses penganggaran, pelaporan, dan akuntabilitas, yang seharusnya menjadi alat untuk transparansi dan efisiensi, justru menjadi penghambat karena banyaknya lapisan birokrasi yang harus dilalui. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, pengalokasian anggaran yang tidak optimal, dan potensi penyalahgunaan dana.

Di banyak daerah, mekanisme penganggaran tidak sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan lokal, sehingga alokasi anggaran tidak mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Pelaporan keuangan juga sering mengalami keterlambatan karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam manajemen keuangan modern. Akuntabilitas fiskal menjadi tantangan, terutama dalam hal transparansi pengeluaran dan pelaporan hasil program pembangunan. Ketidakmampuan untuk menjalankan proses administrasi keuangan yang kompleks dengan baik berdampak negatif pada kemampuan daerah untuk mengelola dana secara efisien dan mencapai tujuan pembangunan.

b. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Salah satu hambatan besar dalam administrasi fiskal di tingkat daerah adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Pengelolaan keuangan modern sangat bergantung pada teknologi untuk pelaporan keuangan yang real-time, pemantauan anggaran, dan pengumpulan pajak yang efisien. Namun, banyak daerah di Indonesia masih belum memiliki sistem teknologi yang memadai untuk mendukung kebutuhan ini. Infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan berbagai

masalah, mulai dari keterlambatan dalam pelaporan keuangan hingga inefisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Ketiadaan sistem digital yang terintegrasi membuat banyak proses administrasi fiskal dilakukan secara manual, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga rentan terhadap kesalahan manusia. Selain itu, kurangnya sistem pemantauan anggaran yang dapat diakses secara real-time membuat pemerintah daerah kesulitan dalam memantau pengeluaran dan mengidentifikasi potensi penyimpangan anggaran. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dan berisiko pada akuntabilitas fiskal.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang canggih dan mudah diakses. Penerapan sistem informasi keuangan daerah (SISKUID) yang terintegrasi dapat membantu dalam menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi pelaporan, dan mempercepat pengambilan keputusan keuangan. Selain itu, pelatihan bagi staf administrasi keuangan tentang penggunaan teknologi modern sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

c. Koordinasi Antarlembaga

Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarinstansi di tingkat daerah, adalah elemen kunci dalam keberhasilan desentralisasi fiskal. Namun, koordinasi antarlembaga seringkali menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ketidaksinkronan antara berbagai tingkat pemerintahan dan antarinstansi dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal dapat menyebabkan kebingungan, inefisiensi, dan bahkan konflik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, sering kali terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, dalam pelaksanaan program pembangunan daerah,

koordinasi yang buruk antarinstansi daerah dapat menyebabkan duplikasi program, pemborosan anggaran, dan hasil yang tidak optimal.

Untuk memperbaiki koordinasi antarlembaga, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih baik dan forum koordinasi yang efektif antara berbagai tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat perlu memberikan panduan yang jelas dan mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah dapat membantu dalam menyinkronkan data keuangan dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data.

2. Masalah Kapasitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Daerah

Permasalahan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah menjadi salah satu tantangan signifikan dalam pengelolaan fiskal yang efektif, terutama dalam konteks sentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Tantangan ini meliputi keterbatasan kompetensi SDM, kekurangan tenaga ahli, dan tingginya rotasi pegawai, yang semuanya berkontribusi pada ketidakefektifan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan fiskal.

a. Keterbatasan Kompetensi SDM

Keterbatasan kompetensi SDM di tingkat daerah merupakan hambatan utama dalam pengelolaan fiskal yang baik. Banyak pegawai pemerintah daerah yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam manajemen keuangan, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan proyek pembangunan. Ketika pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah tidak memiliki kompetensi yang mumpuni, maka akan sulit untuk mengelola anggaran secara efisien dan efektif. Ketiadaan pelatihan yang berkelanjutan dan program pengembangan keterampilan menyebabkan banyak pegawai tetap stagnan dalam kapasitas, yang berakibat pada rendahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pelatihan dan pengembangan SDM seringkali tidak merata dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan fiskal yang kompleks. Program pelatihan yang ada terkadang tidak relevan dengan kebutuhan spesifik daerah, dan tidak semua pegawai memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang disediakan. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan keterampilan antara pegawai yang sudah mengikuti pelatihan dan belum. Selain itu, banyak daerah yang belum memiliki mekanisme yang efektif untuk menyalakan dan meningkatkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.

b. Kekurangan Tenaga Ahli

Kurangnya tenaga ahli di bidang keuangan dan ekonomi di tingkat daerah juga menjadi masalah krusial. Banyak daerah yang kekurangan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perencanaan keuangan, analisis ekonomi, dan pengelolaan anggaran. Kurangnya tenaga ahli ini membuat daerah sulit menyusun perencanaan anggaran yang realistis dan berorientasi pada hasil, serta dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal yang efektif.

Ketergantungan pada tenaga kerja yang kurang terampil sering kali menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak efektif dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, tanpa adanya tenaga ahli, daerah mungkin akan kesulitan dalam melakukan analisis risiko keuangan, mengelola utang daerah, atau mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kurangnya tenaga ahli juga dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menarik investasi, mengelola proyek pembangunan, dan mencapai target-target pembangunan jangka panjang.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli, pemerintah daerah perlu membuat strategi rekrutmen yang lebih baik dan menciptakan insentif untuk menarik tenaga profesional di daerah. Selain itu, perlu juga ada upaya untuk membangun kapasitas internal melalui program beasiswa, pelatihan, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi serta lembaga pelatihan profesional.

c. **Tingginya Rotasi Pegawai**

Tingginya tingkat rotasi atau utilitas pegawai di tingkat daerah menjadi hambatan lain dalam pengelolaan fiskal. Rotasi yang sering terjadi menyebabkan gangguan dalam kontinuitas program dan kebijakan yang sedang berjalan. Ketika pegawai yang sudah berpengalaman dan memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan daerah dipindahkan ke posisi lain atau ke daerah lain, pengetahuan dan keterampilan yang telah dikembangkan bisa hilang. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk pelaksanaan kebijakan fiskal yang efektif.

Rotasi yang tinggi juga dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas, karena pegawai yang baru pindah ke posisi tertentu mungkin belum sepenuhnya memahami tanggung jawabnya dan kebijakan yang sedang berjalan. Akibatnya, proses pengelolaan keuangan menjadi tidak efisien dan bisa mengarah pada pengambilan keputusan yang salah. Tingginya rotasi juga dapat menyebabkan disorientasi dalam tim kerja, yang mempengaruhi moral pegawai dan produktivitas secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan manajemen SDM yang lebih stabil dan berkelanjutan. Menetapkan periode kerja minimum pada posisi tertentu sebelum rotasi dapat membantu memastikan bahwa pegawai memiliki cukup waktu untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan program yang berorientasi dan pelatihan bagi pegawai yang baru untuk mempercepat adaptasi dalam posisi baru.

3. Hambatan Regulasi dan Kebijakan dalam Penerapan Desentralisasi Fiskal

Hambatan regulasi dan kebijakan dalam penerapan desentralisasi fiskal merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri dan efektif. Desentralisasi fiskal, yang bertujuan memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, seringkali terhambat oleh berbagai masalah regulasi dan kebijakan yang

kurang mendukung. Hambatan ini mencakup ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kewenangan fiskal, ketidaksesuaian alokasi dana, serta hambatan dalam pengumpulan pendapatan lokal.

a. Ketidakjelasan Regulasi

Salah satu hambatan utama dalam penerapan desentralisasi fiskal adalah ketidakjelasan regulasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur desentralisasi fiskal seringkali tidak jelas, tumpang tindih, dan tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Ketidakjelasan ini menyulitkan pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan kebijakan fiskal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, ketidakjelasan dalam peraturan tentang pengelolaan dana transfer dari pusat ke daerah dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda di setiap daerah, yang berujung pada ketidakefektifan dalam alokasi dan penggunaan dana.

Perubahan regulasi yang sering terjadi tanpa sosialisasi yang memadai kepada pemerintah daerah menambah kerumitan dalam pelaksanaannya. Ketika regulasi berubah dengan cepat dan tanpa pemberitahuan atau pelatihan yang memadai, pegawai pemerintah daerah kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, serta meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketidakjelasan regulasi ini juga menciptakan ruang untuk praktik-praktik yang tidak transparan dan dapat memicu korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Keterbatasan Kewenangan Fiskal

Meskipun desentralisasi fiskal bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, kenyataannya banyak daerah masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan pusat yang terlalu ketat dan kontrol yang kuat atas alokasi dana transfer dari pusat ke daerah membatasi kebebasan daerah dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan lokal. Banyak keputusan penting terkait anggaran yang masih ditentukan oleh pemerintah pusat, yang membatasi fleksibilitas daerah dalam mengelola keuangan secara efektif.

Keterbatasan kewenangan fiskal ini membuat pemerintah daerah sulit untuk merespons kebutuhan dan prioritas lokal dengan cepat. Misalnya, ketika ada kebutuhan mendesak untuk pembangunan infrastruktur di daerah tertentu, pemerintah daerah mungkin tidak dapat dengan cepat mengalokasikan dana karena harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini menghambat kemampuan daerah untuk menjadi lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterbatasan kewenangan ini juga dapat menurunkan motivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja fiskal, karena merasa tidak memiliki kontrol penuh atas keuangannya.

c. Ketidaksesuaian Alokasi Dana

Ketidaksesuaian alokasi dana transfer dari pemerintah pusat merupakan hambatan lain dalam desentralisasi fiskal. Dana yang dialokasikan seringkali tidak mencerminkan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Distribusi yang tidak adil dan tidak merata menyebabkan ketimpangan fiskal antar daerah, di mana daerah yang lebih kaya cenderung mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih miskin. Hal ini berkontribusi pada ketidaksetaraan pembangunan dan kesejahteraan antar daerah.

Ketidaksesuaian alokasi dana ini membuat daerah yang membutuhkan lebih banyak bantuan, seperti daerah terpencil atau tertinggal, justru mendapatkan alokasi dana yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang sudah maju. Padahal, daerah yang kurang berkembang biasanya memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketimpangan ini dapat memperparah disparitas regional dan menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang merata dan inklusif.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam mekanisme alokasi dana transfer agar lebih mencerminkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Pendekatan berbasis kebutuhan dan kinerja dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

d. Hambatan dalam Pengumpulan Pendapatan

Hambatan dalam pengumpulan pendapatan lokal juga menjadi tantangan besar dalam desentralisasi fiskal. Peraturan daerah yang membatasi ruang lingkup dan tarif pajak lokal menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jenis pajak dan retribusi yang dapat diterapkan, sehingga bergantung pada transfer dana dari pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan lemahnya penegakan hukum perpajakan di tingkat lokal semakin melemahkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan. Banyak wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, yang tidak patuh dalam membayar pajak daerah, sementara pemerintah daerah sering kali tidak memiliki sumber daya atau mekanisme yang memadai untuk menegakkan kepatuhan pajak. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan dalam memaksimalkan potensi pendapatannya dan menjalankan program-program pembangunan yang direncanakan.

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perpajakan lokal, termasuk dengan meningkatkan kapasitas administrasi pajak, memperbaiki sistem pelaporan dan pembayaran pajak, serta memperketat penegakan hukum perpajakan. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah untuk mendukung pembangunan lokal.

4. Solusi Mengatasi Tantangan dan Hambatan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan upaya untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Namun, pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, regulasi yang tidak harmonis, keterbatasan kewenangan fiskal, serta pengawasan

dan akuntabilitas yang lemah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan terintegrasi.

a. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan kapasitas SDM merupakan langkah mendasar dalam mengatasi tantangan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat dan daerah perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, khususnya di bidang keuangan dan manajemen. Program pelatihan berkelanjutan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap daerah akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam merencanakan, mengelola, dan melaporkan keuangan daerah secara efektif.

Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti perencanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, tetapi juga aspek strategis seperti analisis risiko, pengambilan keputusan berbasis data, dan manajemen proyek. Dengan demikian, pegawai pemerintah daerah akan lebih siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan fiskal dan dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran daerah.

b. Pengembangan Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi informasi yang memadai sangat penting dalam mendukung administrasi keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien. Sistem digital yang terintegrasi dapat mempercepat proses pelaporan keuangan, meminimalkan kesalahan manual, dan meningkatkan akuntabilitas fiskal. Teknologi juga memungkinkan pengelolaan data keuangan yang lebih baik, sehingga pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

Pengembangan infrastruktur teknologi ini meliputi penerapan sistem keuangan berbasis elektronik, yang memungkinkan pengawasan dan pelaporan secara real-time. Selain itu, pelatihan untuk pegawai dalam penggunaan teknologi ini juga perlu dilakukan agar dapat memanfaatkan sistem dengan maksimal. Dengan dukungan teknologi yang canggih, proses administrasi keuangan dapat berjalan lebih lancar, transparan, dan akuntabel.

c. Harmonisasi Regulasi

Ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi seringkali menjadi penghalang dalam penerapan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan implementasi kebijakan fiskal. Penyusunan regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami akan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya tanpa keraguan atau kesalahan interpretasi.

Sosialisasi regulasi baru juga penting untuk memastikan pemahaman yang baik di tingkat lokal. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau publikasi yang mudah diakses oleh pegawai pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi, pemerintah daerah akan lebih siap dalam melaksanakan kebijakan fiskal dengan baik.

d. Peningkatan Kewenangan Fiskal

Peningkatan kewenangan fiskal bagi pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam mendukung desentralisasi fiskal yang efektif. Otonomi yang lebih besar memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Dengan kewenangan yang lebih luas, daerah dapat lebih fleksibel dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peningkatan kewenangan fiskal ini juga mencakup kemampuan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan lokal, seperti pajak daerah dan retribusi. Dengan kewenangan ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi pendapatan, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat, dan memperkuat kemandirian fiskal. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat merancang program pembangunan yang lebih sesuai dengan prioritas lokal, sehingga manfaat desentralisasi fiskal dapat dirasakan lebih maksimal.

e. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat. Sistem audit yang independen dan transparan akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Audit ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui rekomendasi perbaikan.

Penguatan pengawasan juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga pengawas lainnya, seperti dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi fiskal. Selain itu, penguatan sistem pelaporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses oleh publik juga akan mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi.



BAB V

MANAJEMEN KEUANGAN

Manajemen keuangan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam konteks pemerintahan, manajemen keuangan menjadi elemen kunci dalam memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

A. Definisi Manajemen Keuangan

Hendriana, et al (2023:1-2) manajemen adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian agar semua sumber daya organisasi atau perusahaan, waktu staf, dan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya material (tanah, sumber daya alam atau material), serta teknologi dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama dari manajemen adalah menggunakan semua sumber daya tersebut secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara efisien dan efektif. Dengan manajemen yang baik, organisasi dapat mencapai hasil yang diinginkan, meningkatkan kinerja dan berhasil mencapai tujuannya juga dalam hal pengelolaan keuangan.

Musthafa (2017) mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah beberapa keputusan yang perlu dibuat, baik itu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan untuk memenuhi kebutuhan keuangan, dan keputusan kebijakan dividen (Sururudin & Fathurohman, 2023:7726). Sementara Sartono (2011) mengemukakan bahwa manajemen keuangan dapat dipahami sebagai manajemen dana yang berkaitan dengan pengalokasian modal dalam bentuk investasi riil

maupun usaha-usaha pengumpulan dana untuk membiayai investasi atau pembelanjaan yang produktif (Verawati et al., 2023:393).

Manajemen keuangan berperan penting dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Keputusan manajemen keuangan yang tepat dapat membantu organisasi untuk sukses secara finansial dan berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Manajemen keuangan sebagai disiplin ilmu dan praktik bisnis telah berkembang seiring berjalannya waktu dan berawal dari sejumlah perkembangan sejarah. Penelitian yang dilakukan oleh (Affes & Jarboui, 2023; Sumedrea, 2020) tata kelola keuangan merupakan konsep yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manajer bisnis. Ada banyak strategi pengelolaan keuangan dilakukan dalam dunia bisnis seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ríos-Ríos et al., 2023) melihat perencanaan strategis menyediakan rencana operasional yang mendukung perusahaan untuk mencapai tujuannya; (Chen et al., 2023) dampak manajemen keuangan ramah lingkungan dan kesadaran lingkungan manajemen puncak; dan penelitian (Murugan & T, 2023) melihat manajemen resiko keuangan. Beberapa literatur yang ada merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dalam dunia bisnis dalam pengelolaan keuangan.

Darsono (2011) bahwa manajemen keuangan adalah tugas pemilik dan meminjam untuk mendapatkan modal seefisien mungkin untuk memperoleh keuntungan. Ada tiga kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan, yaitu pemanfaatan modal, perolehan modal dan pengelolaan aset (Perwira & Melya, 2023). Menurut Utari dkk., (2016) manajemen keuangan adalah mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penggalangan dana dengan biaya yang serendah mungkin dan digunakan secara ekonomis dan efektif untuk kegiatan operasional organisasi (Agla et al., 2023:148). (*Financial management, sometimes called business finance, is the specialty area of finance concerned with financial decision-making within a business entity* (Frank J & Pamela, 2009:5). Keuangan selalu berhubungan dengan bisnis, padahal kita tau bersama bahwa di dalam sector pemerintahan juga sangat memerlukan keahlian dalam mengelolah keuangan untuk mencapai tujuan organisasi lebih baik.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Halim, (2007) keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim & Iqbal, 2019:24). Ketika tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik dan teratur, maka akan mencapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, sehingga bisa dipertanggung jawabkan oleh seorang pimpinan yang memiliki hak penuh atas manajemen keuangan tersebut.

B. Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap perusahaan atau organisasi. Menurut Liow (2023:49-50), fungsi utama manajemen keuangan terbagi menjadi tiga keputusan besar yang saling terkait, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan manajemen aset. Keputusan ketiga ini berperan penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan.

1. Keputusan Investasi (*Investment Decision*)

Keputusan investasi merupakan salah satu keputusan yang paling penting dalam manajemen keuangan, karena berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan mengalokasikan modalnya untuk memperoleh aset yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Dalam konteks manajemen keuangan, keputusan investasi mengacu pada pilihan-pilihan yang diambil oleh perusahaan mengenai proyek atau aset yang akan dibiayai menggunakan modal yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memilih investasi yang dapat memberikan return (keuntungan) yang optimal bagi perusahaan. Pada umumnya, keputusan investasi ini melibatkan evaluasi berbagai proyek atau aset yang dapat memberikan keuntungan dan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan perusahaan. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk menginvestasikan dana dalam pembelian mesin baru untuk meningkatkan produksi, memperluas fasilitas produksi, atau berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk baru.

Keputusan investasi tidak hanya dilihat dari potensi return yang dapat diperoleh, tetapi juga risiko yang terkait. Oleh karena itu, penting

bagi perusahaan untuk melakukan analisis kelayakan investasi yang meliputi perhitungan nilai sekarang bersih (NPV), tingkat pengembalian internal (IRR), dan periode pengembalian modal (*payback period*). Analisis ini membantu perusahaan untuk memilih proyek yang memberikan imbal hasil yang memadai dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima. Keputusan investasi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk berkembang dan mencapai tujuannya. Sebaliknya, keputusan investasi yang buruk dapat mengarah pada pemborosan sumber daya dan mengancam kesehatan finansial perusahaan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan investasi harus dilakukan dengan hati-hati dan berbasis pada data dan analisis yang akurat.

2. Keputusan Pendanaan (*Financing Decision*)

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berfokus pada bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai berbagai kegiatan operasional dan investasi. Keputusan ini melibatkan pemilihan sumber modal yang akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek investasi dan memastikan keseimbangan pembiayaan yang optimal. Struktur modal yang optimal adalah titik di mana perusahaan memiliki kombinasi antara ekuitas (modal sendiri) dan utang (modal asing) yang memberikan biaya modal terendah dan risiko yang dapat diterima. Dalam praktiknya, keputusan pendanaan mencakup pertimbangan berbagai pilihan sumber dana yang tersedia, seperti penerbitan saham baru, pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau pendanaan internal melalui laba ditahan.

Setiap sumber pembiayaan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya, penerbitan saham baru dapat memberikan modal yang tidak perlu dibayar kembali, namun dapat menyebabkan dilusi kepemilikan. Sementara itu, pinjaman bank atau obligasi dapat memberikan dana yang dibutuhkan, tetapi akan menambah beban bunga dan meningkatkan risiko finansial perusahaan. Tujuan dari keputusan pendanaan adalah untuk mencari keseimbangan terbaik antara sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, dengan mempertimbangkan biaya, risiko, dan fleksibilitas. Struktur modal yang optimal akan memberikan perusahaan sumber daya yang cukup untuk berkembang, sambil menjaga agar beban finansialnya tetap terkendali. Keputusan pendanaan yang

baik akan membantu perusahaan mengelola risiko keuangan, meningkatkan profitabilitas, dan mencapai tujuan jangka panjangnya.

3. Keputusan Manajemen Aset (*Assets Management Decision*)

Keputusan manajemen aset berfokus pada pengelolaan dan penggunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset-aset ini dapat berupa aset fisik seperti tanah, bangunan, dan peralatan, aset keuangan seperti investasi dan surat berharga, serta aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual (paten, merek dagang, dan hak cipta). Keputusan manajemen aset melibatkan pengelolaan sumber daya ini agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja perusahaan. Salah satu tantangan utama dalam manajemen aset adalah bagaimana mengelola aset dengan cara yang efisien dan efektif. Ungkapan "lebih mudah membangun daripada mengelola" mencerminkan kenyataan bahwa perusahaan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengelola aset yang telah dimilikinya. Misalnya, membangun pabrik atau membeli peralatan baru bisa jadi relatif mudah, namun untuk menjaga agar aset tersebut berfungsi secara optimal dan memberikan nilai tambah dalam jangka panjang, dibutuhkan pengelolaan yang cermat.

Keputusan manajemen aset juga mencakup keputusan tentang pengalokasian aset dalam kegiatan operasional perusahaan. Ini berarti mengelola aliran kas, memutuskan kapan harus membeli atau menjual aset, serta menentukan bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan aset yang ada. Misalnya, dalam kasus aset real estat, perusahaan harus memutuskan apakah akan mempertahankan aset tersebut untuk operasional jangka panjang atau menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Keputusan manajemen aset yang buruk dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan bahkan merugikan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus memantau kinerja aset dan membuat keputusan yang dapat memaksimalkan nilai dari aset tersebut. Ini juga mencakup pemeliharaan dan perawatan aset secara berkala untuk memastikan bahwa aset tetap berfungsi secara efisien dan efektif.

C. Siklus Anggaran

Siklus anggaran merupakan salah satu proses penting dalam manajemen keuangan daerah, yang melibatkan serangkaian tahapan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Mardiasmo (2018), siklus anggaran terdiri dari empat tahapan utama, yaitu perencanaan dan persiapan anggaran (*Budget Planning and Preparation*), pengesahan anggaran (*Budget Ratification*), pelaksanaan anggaran (*Budget Implementation*), serta pelaporan dan evaluasi anggaran (*Budget Reporting and Evaluation*). Setiap tahapan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa anggaran yang direncanakan dan dilaksanakan memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1. *Budget Planning and Preparation*

Perencanaan anggaran adalah tahap pertama dalam siklus anggaran yang melibatkan proses perumusan estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk periode yang akan datang. Dalam tahap ini, pemerintah daerah melakukan analisis terhadap perkembangan anggaran dan taksiran pendapatan yang tersedia. Proses perencanaan anggaran ini dimulai dengan mengidentifikasi prioritas kebutuhan pembangunan daerah yang harus didanai, serta estimasi pendapatan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, dan bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Ayu (2020), perencanaan keuangan adalah suatu proses di mana individu atau organisasi menetapkan target keuangan dan kemudian merencanakan langkah-langkah keuangan yang komprehensif untuk mencapainya. Hal ini juga berlaku dalam konteks anggaran pemerintah daerah, yang memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara efisien sesuai dengan prioritas pembangunan. Menurut Darma (2014), peningkatan daya serap anggaran dapat dicapai melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga pemerintah daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efektif.

Tahap perencanaan anggaran juga mencakup proses estimasi pengeluaran yang didasarkan pada proyeksi pendapatan yang ada. Hal

ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), yang menyatakan bahwa pada fase persiapan dan penyusunan anggaran, pemerintah daerah melakukan estimasi pengeluaran berdasarkan proyeksi pendapatan yang ada. Dengan demikian, tahap perencanaan anggaran harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2. *Budget Ratification*

Tahap berikutnya adalah pengesahan anggaran atau ratifikasi anggaran. Tahap ini merupakan proses di mana anggaran yang telah disusun akan dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam tahap ini, terjadi dinamika politik yang sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil akhir pengesahan anggaran. Pimpinan eksekutif, seperti kepala daerah, diharapkan memiliki kemampuan manajerial yang baik, serta keterampilan politik yang memadai untuk meyakinkan legislatif tentang pentingnya alokasi anggaran yang diajukan.

Menurut Mardiasmo (2002), dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus memiliki kapabilitas untuk merespons pertanyaan dan perbedaan pendapat yang muncul dari pihak legislatif. Hal ini memerlukan tidak hanya keterampilan manajerial, tetapi juga kemampuan untuk menjual ide, membentuk koalisi, dan menjalin komunikasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif. Integritas dan ketangguhan mental pimpinan eksekutif juga sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam proses ini.

Sari (2010) menambahkan bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting dalam tahap ini. Agar proses pengesahan anggaran berjalan dengan efektif, anggota DPRD harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hak, tugas, dan wewenang, serta mampu menerapkannya secara kompeten. Selain itu, tingkat pendidikan dan pengalaman dalam bidang politik dan pemerintahan juga menjadi faktor pendukung yang signifikan untuk memastikan pengesahan anggaran berjalan sesuai dengan harapan.

3. Budget Implementation

Tahap pelaksanaan anggaran (*budget implementation*) adalah tahap yang melibatkan penggunaan anggaran yang telah disahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam tahap ini, manajer keuangan daerah harus memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam tahap ini adalah penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dan sistem pengendalian manajemen yang efektif.

Menurut Setiawan et al. (2023), keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah akan berdampak positif bagi pemerintah daerah, seperti peningkatan efisiensi penggunaan dana publik, akurasi pelaporan keuangan, dan transparansi dalam aktivitas keuangan. Semua hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan membantu pemerintah daerah mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik. Sistem pengendalian manajemen juga sangat penting dalam tahap ini, karena berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan dana dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian yang efektif akan membantu mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan keuangan daerah.

4. Budget Reporting and Evaluation

Tahap terakhir dalam siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Pada tahap ini, manajer keuangan daerah harus menyusun laporan keuangan yang mencerminkan hasil dari pelaksanaan anggaran. Laporan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat waktu dan dengan mutu yang sesuai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siahaya, Asnawi, & Layuk (2018), untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan berjalan efektif, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan.

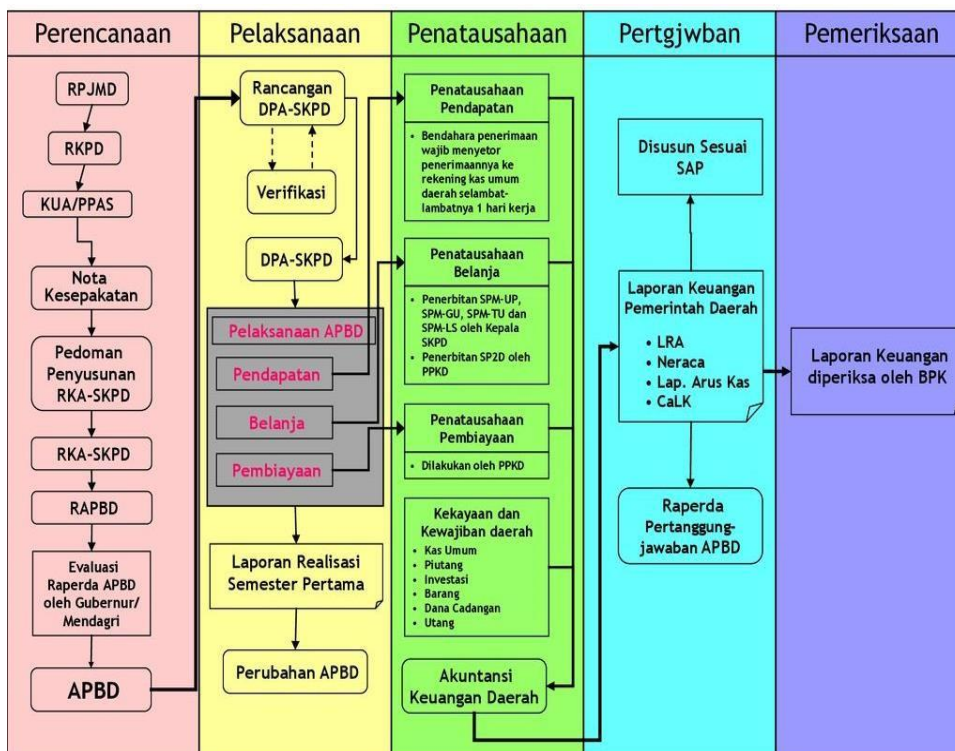
Chosiah et al. (2019) menekankan pentingnya kebijakan pendanaan, kebijakan investasi, dan kebijakan dividen dalam mempengaruhi aliran kas bebas, yang merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini,

evaluasi anggaran harus dilakukan dengan jelas dan transparan, dengan menggunakan indikator kinerja (*performance indicators*) yang relevan untuk menilai pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan anggaran. Proses evaluasi anggaran ini penting untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan anggaran pada tahun berikutnya. Evaluasi yang baik juga memungkinkan pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan anggaran, sehingga siklus anggaran berikutnya dapat berjalan lebih baik dan lebih efektif.

D. Pengelolaan Keuangan

Adapun faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan dengan melihat Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber penerimaan daerah, efisiensi, prioritas alokasi belanja daerah, dan Pengembangan transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme pengelolaan keuangan (Anggara, 2016:335). Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi. Diversifikasi pendapatan dimana Pemerintah daerah harus mencari cara- cara baru untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti mengembangkan sektor ekonomi lokal, investasi atau sumber pendapatan lain yang berkelanjutan dan beragam. Di Indonesia sendiri pemerintah sudah menetapkan pengelolaan keuangan dengan tujuan agar pengelolaan bisa mencapai kesejahteraan masyarakat dan mampu dipertanggungjawabkan oleh stakeholder terkait. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa peraturan terkait keuangan yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan keuangan negara, anggaran, serta kebijakan keuangan lainnya.

Beberapa peraturan pemerintah yang relevan di bidang keuangan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1, sebagaimana dapat disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Pengeolaan Keuangan Daerah (PP 12 2019, Pasal 1)

Pengelolaan keuangan merupakan proses yang penting bagi organisasi, perusahaan, atau instansi untuk mengelola dan memonitor penggunaan dan aliran dana secara efektif dan efisien. Pada tahapan perencanaan memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi. Tahapan pelaksanaan mengumpulkan dana dari sumber-sumber yang telah direncanakan, seperti pendapatan operasional, pinjaman, atau modal sendiri. Tahapan penatausahaan berhubungan dengan pencatatan transaksi, pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Pada tahapan pertanggungjawaban dimana perivikasi dan rekonsiliasi. Tahapan pemeriksaan berhubungan dengan audit eksternal dan evaluasi kinerja. Berikut akan diuraikan proses pengelolaan keuangan daerah:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan daerah adalah tahap pertama dalam siklus anggaran yang sangat krusial bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tahap ini menyusun rencana anggaran yang mencakup penetapan sasaran, program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang

diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Perencanaan keuangan daerah bukan hanya tentang memproyeksikan jumlah dana yang dibutuhkan, tetapi juga merencanakan bagaimana alokasi dana tersebut dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, investasi, dan pembangunan dengan fokus pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sebagaimana diungkapkan oleh Sulistiawan dkk. (2019:149), yang menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, ekonomi, dan efektivitas dalam perencanaan keuangan daerah.

Pentingnya transparansi dalam perencanaan keuangan daerah tidak dapat dipandang sebelah mata. Ketika proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan akuntabel, masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana pemerintah daerah menggunakan dana publik dan apa yang diharapkan dari setiap alokasi dana tersebut. Hal ini akan membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mendukung partisipasi aktif dalam proses perencanaan. Selain itu, efisiensi dalam penggunaan dana juga harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan keuangan daerah. Pengelolaan anggaran yang efisien memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat menghasilkan hasil yang maksimal, baik dalam bentuk infrastruktur pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, maupun dalam pencapaian tujuan jangka panjang daerah.

Susetyo (2008) menjelaskan bahwa perencanaan anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan APBD, memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai alat pendukung dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah, yaitu dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan. Kedua, sebagai instrumen untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Dengan perencanaan anggaran yang jelas dan terstruktur, masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan anggaran juga berfungsi sebagai sarana koordinasi bagi semua unit kerja di dalam pemerintahan daerah. Hal ini penting karena koordinasi yang baik antara berbagai instansi di pemerintahan daerah akan memastikan bahwa alokasi dana dan pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prioritas yang telah disepakati.

Perencanaan keuangan daerah juga harus bersifat partisipatif, artinya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari program pemerintah, tetapi juga subjek yang memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kebutuhan rakyat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dengan kondisi di lapangan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap kritis dalam siklus anggaran setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui. Pada tahap ini, alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBD digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Proses pelaksanaan anggaran tidak hanya melibatkan pengeluaran dana, tetapi juga mencakup pemantauan anggaran dan penarikan dana sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan tujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahap pelaksanaan anggaran berfungsi untuk mengubah rencana keuangan yang telah disusun dalam tahap perencanaan menjadi tindakan nyata yang dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara hati-hati dan terorganisir dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan anggaran adalah pengeluaran dana. Pengeluaran ini harus dilakukan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD, yang mencakup berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, pengeluaran harus didasarkan pada prioritas yang telah ditentukan sebelumnya, dengan fokus pada sektor-

sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemantauan anggaran juga merupakan bagian integral dari tahap pelaksanaan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Pemantauan yang baik dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, sehingga langkah korektif dapat diambil secara cepat untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana.

Penarikan dana juga menjadi bagian dari tahap pelaksanaan yang perlu diperhatikan dengan seksama. Penarikan dana harus dilakukan berdasarkan kebutuhan yang ada, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam APBD. Proses ini perlu dikelola dengan efisien untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Ketepatan waktu dalam penarikan dana juga sangat penting untuk mendukung kelancaran proyek atau kegiatan yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan anggaran yang efektif tidak hanya bergantung pada pengeluaran dan penarikan dana, tetapi juga pada sistem pengendalian yang ada. Sistem pengendalian yang baik akan memastikan bahwa semua langkah dalam pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan dana. Dalam hal ini, pengawasan internal dan eksternal berperan penting dalam menjaga integritas pelaksanaan anggaran.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan melibatkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang tepat dan terbuka. Ini mencakup pembuatan laporan keuangan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan keuangan daerah meliputi elemen-elemen berikut: (a) prinsip-prinsip dasar penatausahaan keuangan daerah; (b) pelaksanaan proses penatausahaan keuangan daerah; (c) pengelolaan penerimaan; dan (d) pengelolaan pengeluaran (Amelia, 2023:2). Elemen-elemen yang tercakup dalam penatausahaan keuangan daerah, seperti dijelaskan oleh Amelia (2023), adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip-Prinsip Dasar Penatausahaan Keuangan Daerah Merupakan panduan etika dan pedoman dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup prinsip-prinsip seperti prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, penghindaran konflik kepentingan, dan tata kelola yang baik.
- b. Pelaksanaan Proses Penatausahaan Keuangan Daerah ini meliputi langkah-langkah operasional yang dilakukan dalam mengelola keuangan daerah, seperti penyusunan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan audit keuangan. Proses ini harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan menjaga integritas data keuangan.
- c. Pengelolaan Penerimaan merupakan manajemen terkait penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini mencakup pengelolaan berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak, retribusi, dan dana perolehan lainnya. Proses ini memastikan bahwa penerimaan dicatat secara akurat dan dikelola dengan efisien.
- d. Pengelolaan Pengeluaran melibatkan pengendalian dan pemantauan atas pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini mencakup pengeluaran untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, serta program-program pembangunan. Tujuan dari pengelolaan pengeluaran adalah untuk menghindari pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dana.

4. Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah aspek yang sangat penting dalam siklus keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berperan utama dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan APBD, sementara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui digunakan secara tepat, efisien, dan akuntabel, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan

daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Natision dkk. (2022), kejujuran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara memiliki dampak positif terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Jika aparat pemerintah daerah, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, mematuhi peraturan dan menjalankan pengelolaan keuangan dengan jujur, hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Kejujuran dalam pelaporan keuangan daerah penting untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah juga tidak dapat diabaikan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan dana publik, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Ini termasuk menjelaskan bagaimana dana digunakan untuk program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas ini dapat terwujud melalui pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk legislatif, badan pengawasan, dan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah daerah, dalam hal ini, harus memiliki kemampuan untuk memberikan akses yang mudah bagi para pengguna laporan keuangan, termasuk lembaga legislatif dan badan pengawasan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ananda (2023), yang menekankan pentingnya aksesibilitas laporan keuangan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi anggaran. Dengan memberikan akses yang mudah, pemerintah daerah tidak hanya memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang mudah diakses dan dipahami akan memungkinkan berbagai pihak untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran dan memastikan bahwa alokasi dana telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. Dengan sistem

pertanggungjawaban yang jelas dan rinci, penyimpangan dalam penggunaan anggaran dapat terdeteksi lebih dini, sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Kejelasan dan ketepatan dalam pelaporan keuangan akan memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, baik kepada publik maupun kepada lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu tahap yang krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun dengan benar dan mencerminkan kewajaran serta kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya. Sebagai lembaga yang independen, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, termasuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta laporan-laporan lain yang relevan dengan kegiatan keuangan daerah.

Tujuan utama dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pendapat tersebut meliputi apakah laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apakah pengelolaan keuangan daerah sudah memadai, dan apakah seluruh kegiatan keuangan tersebut telah dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, pemeriksaan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipercaya dan memberikan informasi yang jelas serta akurat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak hanya terbatas pada audit laporan keuangan, tetapi juga mencakup pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan kinerja berfokus pada penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD. Dalam hal ini, BPK mengevaluasi apakah program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta apakah anggaran yang dikeluarkan telah memberikan dampak yang signifikan

terhadap pembangunan daerah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, di sisi lain, dilakukan untuk mengevaluasi apakah ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya penyalahgunaan anggaran atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hidayat et al. (2023), pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif merupakan elemen penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik, terutama dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan kewajibannya dalam mengelola dana publik dengan penuh tanggung jawab. BPK bertugas untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan anggaran atau ketidaksesuaian lainnya yang mungkin terjadi selama proses pengelolaan keuangan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang ada.

Pada konteks pengelolaan keuangan di Gorontalo dan daerah lainnya di Indonesia, peran BPK menjadi semakin vital untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak hanya membantu mendeteksi potensi kesalahan atau penyalahgunaan anggaran, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan hasil pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan fakta, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.



BAB VI

KEMANDIRIAN FISKAL

(KEUANGAN DAERAH)

Kemandirian fiskal adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri melalui potensi pendapatan asli daerah (PAD), tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal sangat penting untuk menciptakan ketahanan keuangan daerah yang stabil dan mendorong pembangunan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.

A. Pengertian Kemandirian Fiskal

Masalah umum dalam manajemen keuangan daerah dan anggaran daerah sudah cukup memadai kemandirian fiskal mengindikasikan masih terpengaruh oleh intervensi pemerintah pusat dalam proses pembangunan daerah. Adanya ketergantungan terhadap pajak yang sangat cenderung kurang optimal ketika transfer dari pemerintah pusat pemerintah daerah tidak terserap dengan baik, yang ironisnya membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat pasif pasif dalam penggunaan resep lokal (Digdowiseiso et al., 2023).

Menurut Mutiah, 2019 “*The financial independence of the region is the ability of local governments to fund their government activities, developments and services to communities that have paid taxes and fees as a source of revenue that the need area*”. Kemandirian keuangan dimaksud merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan operasional pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan menggunakan pendapatan dari pajak dan retribusi yang dipungut oleh penduduk atau operator di daerah. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Beetsma et al., 2022) bahwa adanya guncangan ekonomi yang bersifat regional dan dalam skala zona euro

cenderung memerlukan tingkat stabilisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan guncangan yang lebih spesifik pada tingkat negara rata-rata.

Penelitian oleh (Iritani & Tamaoka, 2005) melihat evaluasi sistem redistribusi fiskal di Jepang dengan menggunakan data yang diberikan periode setelah Perang Dunia II. Jepang menonjol karena skala redistribusi antar wilayahnya dan insentif politik-ekonomi (Dewit & Steinmo, 2002). Hasil penelitian ini berguna untuk memahami dinamika redistribusi ekonomi di Jepang yang menjadi salah satu karakteristik utama dalam sistem fiskal negara tersebut. Selain itu di Jepang sendiri sudah ada dukungan kemandirian fiskal melalui pendekatan kurikulum untuk mendukung sumber daya manusia (Jehan, 2021).

Adapun disebutkan dalam penelitian Chen et al., (2019) (*A lower ratio indicates that the degree of land financial dependence is weaker and the regional financial competition is smaller*). Bahwa yang disebutkan dapat mengacu pada rasio keuangan tertentu yang terkait dengan tanah atau real estat di area atau wilayah tertentu. Koefisien keuangan yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan keuangan yang lebih rendah pada sektor tanah. Artinya bahwa pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan aset pemerintah selain lahan untuk bisa memperoleh pendapatan sehingga bisa memperoleh kemandirian fiskal. Adapun dalam penelitian Eka Pala & Miftahul, (2020) *for this reason, regional finances must be managed in an orderly manner, obeying the laws and regulation ions, efficiently, economically, effectively, transparently, and responsibly with due regard to justice, propriety and benefits for the community*. Dalam mengelola keuangan daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sehingga bisa memperoleh kemandirian fiskal.

B. Paradigma Anggaran Daerah

Mardiasmo (2004:106) mengemukakan bahwa paradigma anggaran daerah yang efektif harus mencakup beberapa prinsip utama yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang

transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil yang optimal. Paradigma ini tidak hanya berfokus pada aspek administrasi anggaran, tetapi juga pada pencapaian tujuan yang lebih besar dalam hal pembangunan daerah dan pelayanan publik. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai enam prinsip paradigma anggaran daerah menurut Mardiasmo, yang dirancang untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

1. Anggaran Daerah Harus Bertumpu pada Kepentingan Publik

Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, sebuah prinsip fundamental yang mengarahkan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Setiap langkah dalam penyusunan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran harus bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai entitas yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif untuk sektor-sektor yang paling mendesak dan memberi manfaat langsung kepada warga.

Proses penyusunan anggaran daerah tidak hanya berfokus pada prosedur administratif atau keuangan semata, melainkan harus didasarkan pada hasil analisis yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang harus dibiayai, serta memastikan bahwa pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Sebagai contoh, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua aspek yang sangat vital dalam pembangunan daerah karena keduanya memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup penduduk. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor ini harus dapat memperbaiki infrastruktur pendidikan dan kesehatan, memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Anggaran daerah juga harus mendukung pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan sistem pengairan, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai juga dapat menciptakan kesempatan kerja, memperbaiki konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu,

prioritas anggaran harus mencerminkan tujuan jangka panjang daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengelolaan anggaran daerah yang berfokus pada kepentingan publik juga harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan untuk apa alokasi anggaran tersebut. Untuk itu, penyusunan anggaran harus melibatkan konsultasi dengan masyarakat agar prioritas anggaran benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Partisipasi publik dalam perencanaan anggaran bukan hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat merasa memiliki dan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, anggaran daerah yang bertumpu pada kepentingan publik menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola keuangan, tetapi juga sebagai fasilitator bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran yang tepat dan transparan akan memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah yang lebih merata.

2. Anggaran Daerah Harus Dikelola dengan Hasil yang Baik dan Biaya Rendah (*Work Better and Cost Less*)

Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah, yang menjadi prinsip kedua dalam paradigma pengelolaan anggaran daerah. Prinsip ini mengharuskan pemerintah daerah untuk memprioritaskan efisiensi dalam penggunaan dana publik, agar hasil yang diperoleh dapat maksimal meskipun dengan alokasi anggaran yang terbatas. Pengelolaan anggaran yang efisien bukan hanya tentang mengurangi pengeluaran, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi ini sangat penting agar anggaran daerah yang terbatas dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan anggaran, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan yang matang dan

mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan dana. Setiap alokasi anggaran harus didasarkan pada prioritas yang jelas dan hasil yang ingin dicapai. Pengelolaan anggaran yang efisien juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini akan mencegah pemborosan dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Penerapan teknologi informasi dan manajemen modern dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi kunci dalam mewujudkan efisiensi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengawasi penggunaan anggaran secara lebih transparan dan tepat waktu. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat lebih mudah melacak pengeluaran anggaran, mengidentifikasi pemborosan, dan mengambil langkah korektif jika diperlukan. Sistem informasi yang baik juga memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Evaluasi yang ketat terhadap setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah juga sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan memberikan hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Proses evaluasi harus mencakup penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak dari setiap program atau proyek yang didanai. Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan secara rutin untuk mengidentifikasi apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil yang dicapai tidak memadai, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penggunaan anggaran di masa depan.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga harus mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan proses administrasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran memiliki kapasitas dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, proses administrasi yang tidak efisien atau birokratis dapat menghambat pencapaian tujuan anggaran. Oleh karena itu, perbaikan dalam proses administrasi dan

pengurangan prosedur yang berbelit-belit juga merupakan bagian dari upaya mencapai pengelolaan anggaran yang efisien.

Pentingnya prinsip "*work better and cost less*" dalam pengelolaan anggaran daerah adalah agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Efisiensi ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengelola dana publik, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dengan baik. Pada akhirnya, pengelolaan anggaran yang efisien akan memperkuat daya saing daerah, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Anggaran Daerah Harus Mampu Memberikan Transparansi dan Akuntabilitas Secara Rasional untuk Seluruh Siklus Anggaran

Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk seluruh siklus anggaran, yang menjadi prinsip ketiga dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya proses pengelolaan anggaran yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap tahap, mulai dari perencanaan, pengalokasian dana, hingga pelaporan penggunaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas merupakan landasan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih responsif dan efisien.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah memungkinkan masyarakat, lembaga legislatif, dan badan pengawasan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana anggaran daerah dialokasikan dan digunakan. Informasi yang transparan memberi masyarakat kesempatan untuk mengetahui prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta sektor-sektor yang mendapatkan porsi anggaran lebih besar. Selain itu, dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memahami rencana-rencana pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini juga membantu dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah memastikan bahwa setiap alokasi dana dan pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus siap memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan anggaran, termasuk bagaimana dan untuk apa dana tersebut digunakan. Akuntabilitas bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk menjelaskan secara rasional setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan yang akuntabel memberi gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, serta sejauh mana kebijakan anggaran yang diterapkan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Proses pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel juga harus melibatkan mekanisme pengawasan yang kuat. Salah satu aspek penting dalam memastikan akuntabilitas adalah melibatkan lembaga legislatif dan badan pengawasan independen untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap penggunaan anggaran. Pemerintah daerah perlu menyediakan data dan informasi yang cukup kepada lembaga-lembaga ini agar dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Audit independen secara rutin akan membantu mendeteksi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas juga mencakup penyusunan dan penyebarluasan laporan keuangan yang mudah diakses oleh publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa laporan anggaran dan keuangan disusun dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik. Laporan tersebut harus mencakup informasi tentang alokasi anggaran, pengeluaran, serta realisasi anggaran yang menunjukkan apakah program-program yang telah dicanangkan dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah juga harus membuka akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau pertanyaan terkait penggunaan anggaran melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial dan situs web resmi.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah berfungsi untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Kepercayaan ini sangat

penting untuk memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas, masyarakat tidak hanya merasa dilibatkan dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, prinsip ini menjadi fondasi yang kokoh bagi pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Anggaran Daerah Harus Dikelola dengan Pendekatan Kinerja (*Performance Oriented*) untuk Seluruh Jenis Pengeluaran Maupun Pendapatan

Prinsip keempat dalam paradigma pengelolaan anggaran daerah adalah bahwa anggaran harus dikelola dengan pendekatan berbasis kinerja (*performance-oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan. Pendekatan ini tidak hanya melihat anggaran sebagai dokumen administratif yang berisi daftar pengeluaran dan penerimaan, tetapi lebih sebagai alat strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar. Dalam kerangka ini, setiap jenis pengeluaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang dapat digunakan untuk menilai apakah anggaran tersebut memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendekatan berbasis kinerja ini menekankan pentingnya mengukur dampak dari setiap program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran daerah. Dengan demikian, pengelolaan anggaran bukan hanya tentang alokasi dana, tetapi juga tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk mencapai hasil yang terukur dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Misalnya, jika anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, maka kinerja proyek dapat diukur berdasarkan kemajuan yang tercapai dalam pembangunan fisik, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti kemudahan akses transportasi, pengurangan kemacetan, dan peningkatan perekonomian lokal.

Pada pendekatan ini, penting untuk tidak hanya fokus pada output atau jumlah dana yang dikeluarkan, tetapi juga pada outcome atau hasil

yang tercapai. Dalam konteks anggaran daerah, ini berarti bahwa setiap pengeluaran harus benar-benar memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, apabila anggaran dialokasikan untuk sektor pendidikan, kinerja dapat diukur melalui indikator seperti peningkatan kualitas pendidikan, tingkat kelulusan, dan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan. Dengan demikian, hasil yang dicapai akan lebih relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Penerapan pendekatan berbasis kinerja dalam pengelolaan anggaran juga mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana publik. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan memberikan hasil yang optimal, dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah tetap berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang diinginkan. Evaluasi ini juga berguna untuk mengetahui apakah alokasi anggaran sudah tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Pendekatan berbasis kinerja juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di lapangan. Dengan adanya evaluasi yang teratur, pemerintah dapat segera mengidentifikasi masalah yang muncul selama pelaksanaan anggaran dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan. Hal ini akan memastikan bahwa anggaran daerah dapat memberikan hasil yang optimal meskipun kondisi dan tantangan di lapangan dapat berubah seiring waktu.

Keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam pendekatan kinerja ini. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk memantau kinerja program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran. Dengan memberikan informasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat juga dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Anggaran Daerah Harus Mampu Menumbuhkan Profesionalisme Kerja di Setiap Organisasi yang Terkait

Prinsip kelima dalam paradigma pengelolaan anggaran daerah adalah bahwa anggaran harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memberikan hasil yang optimal dan akuntabel. Profesionalisme kerja dalam konteks ini berarti bahwa setiap unit kerja, baik di tingkat daerah maupun instansi terkait, harus memiliki kompetensi yang memadai dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi para aparatur pemerintah menjadi elemen yang sangat krusial dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien.

Peningkatan profesionalisme ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, pelatihan juga dapat fokus pada penguasaan teknologi informasi yang semakin penting dalam perencanaan dan pelaporan anggaran, guna memastikan bahwa pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Pelatihan yang berkelanjutan juga akan membantu meningkatkan kualitas analisis dan perencanaan anggaran, serta memungkinkan pegawai untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kebijakan atau peraturan yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah juga perlu memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi sebagai upaya untuk memotivasi kinerja. Insentif ini bisa berupa penghargaan atau bonus yang diberikan kepada pegawai yang mampu mengelola anggaran dengan baik, mengidentifikasi potensi penghematan, atau berinovasi dalam pencapaian tujuan pembangunan. Insentif ini akan mendorong terciptanya kompetisi yang sehat di antara pegawai dan meningkatkan profesionalisme di lingkungan kerja. Dengan adanya penghargaan terhadap kinerja yang baik, para pegawai akan lebih termotivasi untuk

bekerja dengan lebih baik dan lebih berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal.

Tidak hanya aspek teknis, pemerintah daerah juga harus mendorong agar setiap pejabat pengelola keuangan daerah memiliki integritas yang tinggi. Profesionalisme kerja juga berkaitan dengan kemampuan untuk bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Integritas yang tinggi akan memastikan bahwa setiap pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan tujuan yang baik, yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Para pejabat pengelola keuangan yang memiliki integritas juga akan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa anggaran yang dipercayakan dikelola dengan cara yang tepat dan efektif.

Pengelolaan anggaran daerah yang berkualitas memerlukan tenaga ahli yang mampu melakukan analisis mendalam, perencanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya terampil dalam hal teknis, tetapi juga memiliki wawasan yang luas mengenai ekonomi daerah, kebijakan publik, dan peraturan keuangan yang berlaku. Dengan kemampuan tersebut, para pegawai dan pejabat yang terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah dapat merancang kebijakan yang efisien, mengelola anggaran secara cermat, serta mengawasi pelaksanaan anggaran dengan teliti, agar setiap sumber daya yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya.

6. Anggaran Daerah Harus Dapat Memberikan Keleluasaan Bagi Para Pelaksananya untuk Memaksimalkan Pengelolaan Dananya dengan Memperhatikan Prinsip *Value for Money*

Prinsip terakhir dalam pengelolaan anggaran daerah adalah bahwa anggaran harus memberikan keleluasaan bagi para pelaksana untuk memaksimalkan pengelolaan dana, dengan tetap memperhatikan prinsip *value for money*. Prinsip ini menekankan pentingnya fleksibilitas bagi para pelaksana untuk menyesuaikan cara dan metode pengelolaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, selama tetap menjaga efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks ini, pemberian

keleluasaan berarti bahwa pelaksana anggaran memiliki kebebasan untuk merancang dan melaksanakan program-program dengan cara yang paling sesuai, namun dengan tetap berorientasi pada hasil yang diinginkan.

Sebagai contoh dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, anggaran daerah bisa memberikan fleksibilitas untuk memilih metode konstruksi yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan lokal. Fleksibilitas ini juga memungkinkan pelaksana untuk berinovasi, mencari solusi yang lebih efisien, dan menerapkan teknologi atau metode terbaru yang dapat mengurangi biaya sekaligus meningkatkan kualitas. Misalnya, dalam pembangunan jalan, pelaksana dapat mempertimbangkan penggunaan bahan lokal yang lebih murah dan lebih sesuai dengan kondisi geografis, atau memanfaatkan teknologi digital untuk memonitor kemajuan proyek dengan lebih efisien.

Meskipun diberikan keleluasaan, prinsip *value for money* tetap harus diutamakan. Ini berarti bahwa setiap pengeluaran anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil yang sebanding atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Konsep *value for money* bukan hanya soal mendapatkan harga yang lebih murah, tetapi juga memastikan bahwa kualitas, manfaat, dan hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaksana anggaran tidak hanya dituntut untuk mencari solusi yang lebih murah, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai dari setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.

Prinsip ini juga mendorong adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran. Pelaksana anggaran harus terus-menerus mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana, baik dengan meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa, menggunakan teknologi untuk mempercepat prosedur, atau bahkan dengan melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan untuk menemukan potensi penghematan atau peningkatan kualitas. Hal ini juga mengarah pada budaya perbaikan berkelanjutan dalam setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah, di mana setiap tahapan pelaksanaan anggaran selalu dilakukan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan hasil yang maksimal.

Penerapan prinsip *value for money* juga akan berpengaruh pada akuntabilitas penggunaan anggaran. Pelaksana anggaran harus mampu menjelaskan secara rinci bagaimana setiap dana digunakan dan apa saja hasil yang dicapai, serta membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Untuk itu, evaluasi yang berkala terhadap setiap kegiatan dan program menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana selalu memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik, di mana masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana yang dipercayakan digunakan untuk kepentingannya.

Pada praktiknya, penerapan prinsip ini mengharuskan adanya sistem manajemen yang baik, pengawasan yang ketat, dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme yang memudahkan para pelaksana untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengelolaan anggaran dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, prinsip *value for money* bukan hanya menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai bagian dari budaya kerja yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap pengeluaran anggaran.

C. Peran dan Potensi Sumber Daya Lokal

Peran Sumber Daya Lokal merujuk pada kontribusi aktif yang dapat diberikan oleh berbagai aset dan kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kemandirian fiskal. Sumber daya lokal meliputi semua aset yang ada di wilayah tersebut, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan produk budaya, yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Potensi Sumber Daya Lokal mengacu pada kapasitas dan peluang yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan aset-aset lokalnya untuk menciptakan nilai ekonomi. Potensi ini mencakup segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan, seperti kekayaan alam, sektor pariwisata, industri kreatif, dan keberadaan UMKM yang produktif.

1. Identifikasi Potensi Ekonomi Lokal

Identifikasi potensi ekonomi lokal merupakan langkah awal dan krusial dalam mengembangkan kemandirian fiskal suatu daerah. Potensi ekonomi lokal meliputi semua sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Proses identifikasi ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, budaya dan kearifan lokal, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan komponen vital dalam potensi ekonomi lokal. Kekayaan alam seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata alam memiliki potensi besar untuk dioptimalkan.

- 1) Pertanian: Sektor pertanian sering kali menjadi tulang punggung perekonomian lokal di banyak daerah. Identifikasi potensi pertanian melibatkan analisis jenis tanaman yang cocok dengan kondisi geografis dan iklim setempat. Misalnya, daerah dengan tanah subur dapat fokus pada pertanian pangan, hortikultura, atau perkebunan. Peningkatan teknologi pertanian dan akses ke pasar juga penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
- 2) Perikanan: Daerah yang memiliki akses ke laut atau perairan tawar dapat mengembangkan sektor perikanan. Identifikasi potensi perikanan melibatkan penilaian stok ikan, metode penangkapan, dan potensi budidaya perikanan. Selain itu, pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti ikan asin, kerupuk ikan, atau olahan seafood lainnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.
- 3) Pertambangan: Sumber daya tambang seperti mineral, batubara, atau logam mulia adalah aset berharga bagi daerah yang memiliki potensi ini. Namun, pengelolaan tambang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Identifikasi potensi tambang melibatkan survei geologi dan kajian dampak lingkungan untuk memastikan eksploitasi yang bertanggung jawab.

- 4) Pariwisata Alam: Keindahan alam seperti pegunungan, pantai, hutan, danau, dan air terjun dapat menjadi daya tarik wisata. Identifikasi potensi pariwisata alam melibatkan penilaian aksesibilitas, fasilitas pendukung, dan potensi pengembangan atraksi wisata. Peningkatan infrastruktur pariwisata dan promosi destinasi wisata juga penting untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting dalam pengembangan potensi ekonomi lokal. Kualitas dan keterampilan tenaga kerja lokal berperan besar dalam mendukung berbagai sektor ekonomi.

- 1) Pendidikan dan Pelatihan: Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan formal dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten. Program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal akan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan membuka peluang kerja baru.
- 2) Kewirausahaan: Mendorong semangat kewirausahaan di kalangan penduduk lokal dapat meningkatkan inovasi dan menciptakan lapangan kerja. Dukungan pemerintah dan lembaga keuangan dalam bentuk pelatihan bisnis, akses permodalan, dan bimbingan usaha sangat penting untuk mengembangkan wirausahawan lokal.

c. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal. Infrastruktur meliputi jalan, pelabuhan, fasilitas umum, dan sarana komunikasi.

- 1) Transportasi: Infrastruktur transportasi yang baik, seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan, akan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa. Ini akan membantu UMKM dan sektor lain dalam memperluas pasar.
- 2) Fasilitas Umum: Fasilitas umum seperti pasar, pusat logistik, dan kawasan industri berfungsi sebagai pusat aktivitas

ekonomi. Ketersediaan fasilitas ini akan mendukung kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran produk lokal.

- 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Infrastruktur TIK yang memadai memungkinkan akses ke informasi dan pasar yang lebih luas. Ini penting untuk mendukung perkembangan ekonomi digital dan e-commerce di daerah.

d. Budaya dan Kearifan Lokal

Budaya dan kearifan lokal adalah sumber daya yang unik dan memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik. Produk-produk berbasis budaya lokal dapat menjadi daya tarik wisata dan memiliki nilai jual yang tinggi.

- 1) Kerajinan Tangan: Kerajinan tangan seperti anyaman, tenun, ukiran, dan batik adalah produk khas yang memiliki pasar tersendiri. Identifikasi potensi ini melibatkan penilaian kualitas, keunikan, dan potensi pasar produk-produk tersebut.
- 2) Kuliner Lokal: Makanan khas daerah adalah bagian dari budaya lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan. Pengembangan kuliner lokal melibatkan pelatihan kuliner, peningkatan standar kebersihan dan kualitas, serta promosi makanan khas sebagai daya tarik wisata kuliner.
- 3) Tradisi dan Festival: Tradisi dan festival lokal dapat menjadi daya tarik wisata budaya. Identifikasi potensi ini melibatkan penilaian keunikan tradisi dan festival, serta pengembangan event yang dapat menarik wisatawan.

e. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

- 1) Pelatihan dan Pendampingan: Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM sangat penting untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan teknis. Program pelatihan yang berfokus pada pengelolaan bisnis, pemasaran, dan inovasi produk akan membantu UMKM berkembang.
- 2) Akses Permodalan: Akses ke sumber pembiayaan yang mudah dan terjangkau adalah salah satu tantangan utama bagi UMKM. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan perlu

menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti kredit mikro dan dana hibah.

- 3) Pemasaran dan Promosi: Pemasaran produk UMKM perlu didukung oleh strategi promosi yang efektif. Pemanfaatan teknologi digital, seperti platform e-commerce dan media sosial, akan membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas.

2. Kontribusi Sumber Daya Lokal terhadap Kemandirian Fiskal

Sumber daya lokal yang dikelola dengan baik memiliki potensi besar dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kontribusi ini dapat dilihat melalui beberapa aspek kunci, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi lokal dan asing, penguatan ekosistem ekonomi lokal, dan stimulasi ekonomi berkelanjutan. Berikut penjelasan lengkap mengenai kontribusi masing-masing aspek tersebut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah. PAD mencakup pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber lokal seperti pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sumber daya lokal yang dikelola dengan optimal dapat meningkatkan PAD secara signifikan.

- 1) Pajak Daerah: Pemanfaatan potensi lokal, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian, dapat meningkatkan pendapatan dari pajak. Contohnya, daerah dengan potensi pariwisata yang baik dapat memperoleh pendapatan dari pajak hotel, restoran, dan retribusi masuk objek wisata. Selain itu, daerah yang memiliki industri berbasis sumber daya alam dapat memungut pajak dari hasil produksi dan pengolahan sumber daya tersebut.
- 2) Retribusi Daerah: Retribusi dari layanan publik, seperti pasar tradisional, terminal, dan tempat parkir, juga merupakan sumber pendapatan yang penting. Dengan meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas, pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan dari retribusi ini.

- 3) Pengelolaan Kekayaan Daerah: Kekayaan daerah seperti tanah, bangunan, dan aset lainnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. Pengelolaan yang baik terhadap aset-aset ini, misalnya melalui sewa atau kerja sama dengan pihak swasta, akan memberikan kontribusi tambahan terhadap PAD.

b. Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi adalah strategi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu dengan mengembangkan berbagai sektor lainnya. Dengan diversifikasi ekonomi, daerah dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, terutama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global.

- 1) Pertanian dan Perikanan: Sektor ini dapat menjadi pilar diversifikasi ekonomi, terutama di daerah pedesaan. Pengembangan teknologi pertanian dan perikanan serta diversifikasi produk olahan akan meningkatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi daerah.
- 2) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menawarkan peluang diversifikasi yang besar. Pengembangan destinasi wisata baru dan produk-produk kreatif berbasis budaya lokal dapat menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
- 3) Industri dan Jasa: Peningkatan sektor industri dan jasa, seperti manufaktur ringan, logistik, dan jasa keuangan, akan membantu menciptakan lapangan kerja dan menstabilkan pendapatan daerah.

c. Peningkatan Investasi Lokal dan Asing

Potensi sumber daya lokal yang teridentifikasi dan dipromosikan dengan baik akan menarik investasi dari berbagai pihak, baik lokal maupun asing. Investasi ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

- 1) Promosi Potensi Lokal: Pemerintah daerah perlu aktif mempromosikan potensi lokal kepada investor. Hal ini dapat dilakukan melalui pameran dagang, forum investasi, dan

kampanye promosi yang menonjolkan keunggulan kompetitif daerah.

- 2) Kemudahan Berinvestasi: Penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif investasi akan menarik minat investor. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, daerah dapat meningkatkan arus masuk modal yang akan digunakan untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial.
- 3) Kemitraan Publik-Swasta: Kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya lokal akan memberikan manfaat ganda, yaitu peningkatan PAD dan penciptaan lapangan kerja. Proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, dapat menjadi contoh kemitraan yang sukses.

d. Penguatan Ekosistem Ekonomi Lokal

Pengelolaan sumber daya lokal yang melibatkan masyarakat akan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya meningkatkan rasa memiliki dan mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah.

- 1) Koperasi dan Kelompok Usaha: Pembentukan koperasi dan kelompok usaha berbasis komunitas akan memperkuat ekonomi lokal. Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya secara kolektif, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 2) Pendampingan dan Pelatihan: Pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber daya dan kewirausahaan akan meningkatkan kapasitas dalam menjalankan usaha. Program ini penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
- 3) Dukungan Kebijakan: Kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti pemberian insentif pajak dan akses permodalan, akan memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Pemerintah daerah harus proaktif dalam menciptakan regulasi yang mendorong pertumbuhan usaha lokal.

e. Stimulasi Ekonomi Berkelanjutan

Sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemandirian fiskal daerah. Pengelolaan berkelanjutan berarti bahwa daerah dapat terus memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem atau menguras potensi masa depan.

- 1) Pengelolaan Lingkungan: Sumber daya alam harus dikelola dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Misalnya, praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, dan pengelolaan sampah yang efektif akan memastikan bahwa sumber daya alam tetap produktif untuk generasi mendatang.
- 2) Energi Terbarukan: Investasi dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan air, akan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Daerah yang memiliki potensi energi terbarukan dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan energi lokal dan menjual kelebihan energi ke daerah lain.
- 3) Inovasi Teknologi: Pengembangan teknologi ramah lingkungan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya akan mendorong efisiensi dan produktivitas. Daerah yang mengadopsi teknologi terbaru dalam pengelolaan sumber daya akan memiliki keunggulan kompetitif dan mampu bersaing di pasar global.

D. Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Kemandirian Fiskal

1. Faktor Internal dan Eksternal

Kemandirian fiskal daerah adalah kondisi di mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publiknya melalui pendapatan asli daerah (PAD) tanpa ketergantungan yang besar pada transfer dari pemerintah pusat. Ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk memanfaatkan sumber daya lokalnya secara optimal guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai

kemandirian fiskal, pemerintah daerah harus menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Bab ini akan membahas secara mendalam faktor-faktor tersebut serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut.

a. Faktor Internal

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas SDM yang kompeten sangat penting untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Namun, banyak daerah menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan SDM yang berkualitas. SDM yang tidak kompeten di bidang pengelolaan keuangan daerah sering kali menyebabkan rendahnya efisiensi dan efektivitas dalam mengelola potensi lokal. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD. Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan yang berkelanjutan, rekrutmen tenaga ahli, dan pengembangan program pendidikan khusus di bidang keuangan dan manajemen publik. Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam pengembangan SDM untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.

2) Kelemahan Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai adalah salah satu prasyarat utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya berperan penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan daya tarik investasi. Namun, banyak daerah di Indonesia masih mengalami kelemahan infrastruktur yang signifikan. Investasi dalam pembangunan infrastruktur menjadi solusi utama untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang strategis. Selain itu, pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat dapat diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

3) Birokrasi yang Berbelit

Birokrasi yang panjang dan rumit sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi lokal. Proses perizinan yang lambat dan berbelit-belit dapat menghambat investasi dan pelaksanaan proyek-proyek yang dapat meningkatkan PAD. Efisiensi birokrasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Reformasi birokrasi diperlukan untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan transparansi. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, seperti sistem perizinan online, dapat mempercepat proses dan mengurangi biaya transaksi. Pemerintah daerah juga perlu membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat dan efisien.

4) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan tantangan besar bagi banyak daerah. Ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat sering kali mengurangi motivasi daerah untuk meningkatkan PAD. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membatasi kemampuan daerah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang dapat meningkatkan pendapatan. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien juga diperlukan untuk memastikan alokasi dana yang tepat pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

b. Faktor Eksternal

1) Fluktuasi Ekonomi Global

Ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, seperti ekspor komoditas, membuat daerah rentan terhadap fluktuasi harga global. Perubahan harga komoditas dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mengatasi tantangan ini, daerah perlu mendiversifikasi basis ekonominya dengan mengembangkan sektor-sektor yang kurang rentan terhadap fluktuasi global, seperti pariwisata, industri kreatif, dan jasa. Selain itu, penguatan ketahanan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dapat menjadi strategi untuk mengurangi dampak fluktuasi ekonomi global.

2) Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan fiskal dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sering kali membatasi fleksibilitas daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Misalnya, pembatasan dalam penetapan pajak atau retribusi tertentu dapat mengurangi potensi PAD. Selain itu, kebijakan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat inisiatif daerah dalam mengembangkan potensi lokal. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan yang mendukung kemandirian fiskal daerah. Desentralisasi fiskal yang lebih luas, dengan memberikan keleluasaan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya, dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih sinergis dan mendukung.

3) Persaingan Antar Daerah

Persaingan antar daerah dalam menarik investasi dan wisatawan dapat menjadi tantangan tersendiri. Daerah yang kurang kompetitif dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, dan promosi potensi lokal sering kali kalah bersaing. Persaingan ini dapat menghambat upaya daerah dalam meningkatkan PAD. Kolaborasi antar daerah melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) atau kawasan industri yang melibatkan beberapa daerah dapat menjadi solusi untuk menghadapi persaingan ini. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya promosi potensi lokal melalui berbagai media, serta memperbaiki

pelayanan publik untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor.

4) Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor dapat menghambat aktivitas ekonomi dan mengurangi pendapatan daerah dari sektor-sektor seperti pertanian dan pariwisata. Bencana alam juga dapat merusak infrastruktur dan aset-aset penting lainnya, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja fiskal daerah. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi prioritas untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi pengelolaan risiko bencana yang efektif, termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, investasi dalam teknologi hijau dan energi terbarukan dapat menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

2. Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai kemandirian fiskal, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Berikut beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah:

a. Peningkatan Kapasitas SDM

1) Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah daerah perlu melakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya lokal. Program pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kompetensi dapat membantu meningkatkan keahlian ASN dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Pengembangan SDM yang Kompeten

Dengan meningkatkan kompetensi SDM, pemerintah daerah dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah yang

lebih efektif dan efisien. Hal ini mencakup penguasaan teknologi informasi terbaru untuk manajemen keuangan, pemahaman tentang regulasi keuangan, dan kemampuan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

b. Pengembangan Infrastruktur

1) Peningkatan Infrastruktur Dasar

Investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya adalah kunci untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik investasi. Infrastruktur yang baik akan mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antar daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2) Kerjasama dengan Sektor Swasta

Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan sektor swasta melalui skema *public-private partnership* (PPP). Kerjasama ini memungkinkan pembiayaan proyek infrastruktur tanpa membebani anggaran daerah secara langsung, sekaligus mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta dalam pembangunan daerah.

c. Reformasi Birokrasi

1) Simplifikasi Proses Birokrasi

Proses birokrasi yang panjang dan rumit sering menjadi penghambat pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan proses perizinan dan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis. Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

2) Digitalisasi Layanan

Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik. Sistem e-government dapat digunakan untuk mempercepat proses perizinan, mempermudah akses informasi bagi masyarakat, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

d. Diversifikasi Sumber Pendapatan

1) Pengembangan Sektor Ekonomi Lokal

Pemerintah daerah perlu mengembangkan berbagai sektor ekonomi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja. Sektor pariwisata, agribisnis, dan industri kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi sumber PAD yang baru dan berkelanjutan. Diversifikasi ini akan membuat perekonomian daerah lebih *resilient* terhadap guncangan eksternal.

2) Inovasi dan Kewirausahaan

Mendorong inovasi dan kewirausahaan di tingkat lokal dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Pemerintah daerah dapat menyediakan insentif bagi startup dan usaha kecil menengah (UKM) untuk berkembang, seperti akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran.

e. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

1) Sistem Informasi Keuangan yang Terintegrasi

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran dan memudahkan pelaporan keuangan secara real-time.

2) Partisipasi Publik

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Mekanisme seperti forum konsultasi publik dan laporan kinerja tahunan dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif.

f. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

1) Kemitraan Strategis

Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya lokal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah. Melalui kemitraan strategis, pemerintah daerah dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya swasta untuk proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal.

2) Skema *Public-Private Partnership* (PPP)

Skema PPP memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan proyek. Proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol atau bandara, dapat didanai dan dikelola bersama, sehingga mempercepat realisasi proyek tanpa membebani anggaran daerah.

g. Mitigasi Risiko Perubahan Iklim

1) Strategi Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan iklim membawa tantangan besar bagi perekonomian lokal. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi untuk melindungi sektor-sektor ekonomi yang rentan, seperti pertanian dan pariwisata. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan akan memastikan ketersediaan sumber daya lokal untuk jangka panjang.

2) Pengelolaan Bencana

Meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan bencana alam dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap perekonomian. Ini termasuk penguatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan pelatihan masyarakat dalam tanggap darurat.

h. Promosi Potensi Lokal

1) Promosi Melalui Media Digital

Di era digital, promosi potensi lokal melalui media sosial dan platform online dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan media digital untuk mempromosikan pariwisata, produk lokal, dan peluang investasi.

2) Partisipasi dalam Pameran

Keikutsertaan dalam pameran nasional dan internasional dapat meningkatkan visibilitas potensi lokal. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk memamerkan produk dan layanan unggulan, serta menarik minat investor dan wisatawan.



BAB VII

STUDI KASUS

A. Studi Kasus: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Gorontalo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen rencana keuangan tahunan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal yang bertujuan mencapai tujuan pembangunan tahunan. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, APBD berperan dalam mewujudkan visi "Gorontalo Maju dan Mandiri" yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD ini menjadi panduan operasional bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Visi pembangunan tersebut mencakup dua aspek kunci: Gorontalo Maju dan Gorontalo Mandiri. Gorontalo Maju mencerminkan tekad pemerintah dan masyarakat untuk membangun ekonomi yang tangguh, sumber daya manusia yang unggul, serta sistem pemerintahan yang bersih dan profesional. Sementara itu, Gorontalo Mandiri menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang mampu menghadapi tantangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai visi tersebut, Provinsi Gorontalo menetapkan tiga misi pembangunan: mewujudkan ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat pemerintahan daerah yang amanah. Pada rangka mencapai kemandirian fiskal, studi kasus ini berfokus pada pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik

di tingkat daerah. Dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menarik minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Gorontalo.

Sejarah Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di daerah ini telah mengalami berbagai perubahan sejak zaman kolonial. Pada tahun 1889, Gorontalo mulai menerapkan sistem pemerintahan langsung, dan pada tahun 2000, Provinsi Gorontalo resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Gorontalo, yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi terbesar di Kawasan Teluk Tomini. Dengan jumlah penduduk sekitar 1.192.737 jiwa pada tahun 2022, mayoritas penduduknya adalah Suku Gorontalo.

Kondisi geografis Provinsi Gorontalo sangat beragam, dengan batasan geografis yang jelas antara Laut Sulawesi di utara dan berbagai provinsi lain di sekitarnya. Luas wilayahnya mencapai sekitar 12.215,44 kilometer persegi, mencakup enam kabupaten/kota termasuk Kota Gorontalo. Topografi wilayah ini terdiri dari dataran, perbukitan, dan pegunungan dengan ketinggian bervariasi. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Dari segi perekonomian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo menunjukkan pertumbuhan positif dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2021, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 43.896,37 miliar dengan pertumbuhan sebesar 2,41 persen. Sektor jasa keuangan juga menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 8,97 persen. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk mencapai kemandirian fiskal di Provinsi Gorontalo. Menurut Direktur Pendapatan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pengeluaran anggaran sering kali tidak terarah sehingga melebihi pendapatan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan prioritas dalam pengeluaran anggaran agar dapat menyesuaikan dengan potensi pendapatan yang relatif kecil. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara bertahap. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi konkret untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan antara lain peningkatan kapasitas fiskal melalui regulasi yang mendukung kemandirian fiskal daerah, prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran agar dapat membangun kepercayaan publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, Provinsi Gorontalo tidak hanya akan mampu mengatasi tantangan dalam pengelolaan keuangan tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo merupakan langkah strategis menuju kemandirian fiskal. Dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan anggaran, diharapkan Provinsi Gorontalo dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 serta mewujudkan visi "Gorontalo Maju dan Mandiri".

B. Tantangan dan Solusi

1. Tantangan 1: Ketidakseimbangan antara Pendapatan dan Pengeluaran

Tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo adalah ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, yang merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat berakibat fatal bagi stabilitas fiskal daerah tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan ini adalah kurangnya keterpaduan antara rencana pengeluaran dan potensi pendapatan yang ada di daerah. Banyak

pengeluaran anggaran yang tidak terarah dan tidak memperhitungkan potensi sumber daya yang ada. Akibatnya, pengeluaran yang tidak terkontrol sering kali melebihi pendapatan yang diperoleh, sehingga pemerintah daerah terpaksa mencari sumber pendanaan alternatif, seperti utang. Kondisi ini tentunya sangat berisiko karena akan menambah beban fiskal daerah, mengurangi kemampuan untuk berinovasi, dan dapat mengganggu kemandirian fiskal dalam jangka panjang.

Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran ini sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal. Beberapa sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan sumber daya alam, belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik. Pengelolaan yang kurang optimal ini dapat disebabkan oleh ketidaksiapan aparatur pemerintah dalam hal kebijakan, infrastruktur, maupun sistem pengawasan yang masih lemah. Dampaknya, PAD yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pengeluaran daerah, yang mengarah pada ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman daerah. Ketergantungan ini membuat daerah sulit untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pembangunan dan program-program yang seharusnya dapat dilakukan dengan pendanaan dari dalam daerah itu sendiri.

Pengeluaran daerah yang tidak efisien dan terencana juga berkontribusi pada ketidakseimbangan tersebut. Banyak pengeluaran yang tidak mencerminkan prioritas pembangunan yang seharusnya. Misalnya, pengeluaran untuk belanja pegawai yang besar, pengeluaran untuk kegiatan yang tidak produktif, atau proyek-proyek infrastruktur yang tidak memperhatikan kelayakan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan anggaran daerah tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau yang dapat mendongkrak perekonomian daerah. Dalam jangka panjang, pengeluaran yang tidak terarah ini bukan hanya berpotensi menambah utang daerah, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Apabila ketidakseimbangan ini tidak segera diatasi, maka akan terjadi defisit anggaran yang semakin besar dan menciptakan ketergantungan yang tidak berkelanjutan terhadap anggaran pusat.

Untuk mengatasi masalah ini, salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis

yang lebih mendalam terhadap prioritas pengeluaran. Penyusunan anggaran daerah seharusnya didasarkan pada kebutuhan mendesak masyarakat dan potensi pendapatan yang ada. Pendekatan berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran akan sangat berguna dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran diarahkan untuk mencapai tujuan yang jelas dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, pengeluaran yang tidak produktif dapat diminimalisasi, sementara dana yang ada dapat difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja yang dapat menilai efektivitas dan efisiensi setiap program yang dibiayai oleh anggaran daerah. Dengan sistem ini, setiap pengeluaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Misalnya, jika anggaran dialokasikan untuk sektor pendidikan, maka indikator kinerja dapat berupa angka partisipasi sekolah, tingkat kelulusan, atau peningkatan kualitas tenaga pengajar. Dengan demikian, pengeluaran yang dilakukan akan lebih terfokus pada pencapaian hasil yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pengelolaan PAD juga perlu diperbaiki. Pemerintah daerah harus menggali potensi pajak daerah dan retribusi dengan cara yang lebih inovatif dan efisien. Penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan daerah, seperti e-tax atau sistem pembayaran elektronik lainnya, dapat memudahkan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan potensi sektor ekonomi unggulan daerah yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, atau sektor industri lokal. Dengan memaksimalkan potensi-potensi tersebut, diharapkan PAD dapat meningkat dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran melalui mekanisme partisipatif, di mana dapat memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan yang dianggap penting. Sementara itu, sektor swasta juga dapat berperan dalam mendukung

pengembangan ekonomi daerah melalui investasi dan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya lokal. Dengan sinergi yang baik antara ketiga pihak ini, masalah ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah dapat diatasi dengan lebih efektif.

Untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran daerah benar-benar dapat diterapkan secara efisien dan efektif, diperlukan pengawasan yang ketat. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal agar setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa pengeluaran anggaran digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan.

2. Tantangan 2: Ketergantungan pada Transfer dari Pemerintah Pusat

Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat merupakan tantangan signifikan bagi Provinsi Gorontalo dalam mengelola keuangan daerah. Sejak diterapkannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia, termasuk Gorontalo, mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan dan operasional pemerintah. Namun, seiring dengan waktu, ketergantungan ini semakin menjadi masalah yang kompleks. Salah satu penyebab utama adalah penurunan alokasi dana transfer dari pusat. Penurunan ini terjadi akibat keterbatasan anggaran nasional, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti defisit anggaran negara, beban utang negara yang semakin meningkat, serta meningkatnya jumlah daerah yang menerima dana transfer. Sebagai akibatnya, meskipun kebutuhan pembangunan dan pengelolaan daerah semakin besar, pemerintah daerah sering kali kesulitan untuk memenuhi anggaran yang diperlukan.

Ketergantungan terhadap transfer ini membawa dampak serius terhadap kapasitas fiskal daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program jangka panjang secara mandiri. Dengan ketergantungan yang tinggi pada dana dari pusat, pemerintah daerah menjadi terbatas dalam merencanakan program yang berkelanjutan dan terarah. Anggaran yang diterima sering kali tidak mencakup seluruh kebutuhan daerah, atau bahkan jika mencakup, anggaran tersebut tidak cukup fleksibel untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang. Sebagai

contoh, jika ada kebutuhan mendesak yang tidak dianggarkan oleh pemerintah pusat, daerah tidak memiliki banyak pilihan selain menunggu bantuan tambahan dari pusat yang mungkin tidak segera tersedia. Ketergantungan ini juga memperburuk kemandirian fiskal daerah, yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada transfer dari pusat ini akan menghambat pengembangan dan kesejahteraan daerah, karena daerah tidak memiliki kontrol penuh atas sumber pendapatan dan pengelolaannya.

Ketergantungan terhadap transfer pusat juga mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Ketika dana yang diterima terbatas, pemerintah daerah terpaksa mengutamakan program-program yang dibiayai oleh transfer pusat, sering kali mengabaikan sektor-sektor penting lainnya yang tidak memiliki dana yang cukup. Hal ini dapat menghambat kemajuan daerah di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ketidakmampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri juga dapat memperburuk ketimpangan pembangunan antara daerah yang bergantung pada transfer pusat dengan daerah yang berhasil mengelola sumber pendapatan sendiri dengan baik. Ketergantungan ini berisiko menciptakan ketidakadilan dalam pembangunan, di mana daerah-daerah yang memiliki kemampuan pengelolaan sumber daya yang lebih baik dapat berkembang lebih pesat, sementara daerah-daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat tetap tertinggal.

Mengatasi masalah ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang memungkinkan daerah untuk mandiri dalam mengelola keuangannya. Salah satu langkah pertama yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum dimanfaatkan secara optimal. PAD merupakan sumber utama yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan tanpa harus bergantung pada transfer pusat. Beberapa sumber PAD yang bisa dimaksimalkan meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan sumber daya alam, serta sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi besar. Misalnya, sektor

pariwisata di Gorontalo memiliki potensi besar untuk menyumbang PAD yang signifikan, tetapi sejauh ini pengelolaannya masih kurang optimal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya promosi, pengembangan fasilitas wisata, serta menciptakan kemitraan dengan sektor swasta untuk mengembangkan pariwisata yang dapat menghasilkan pendapatan daerah.

Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi unggulan Gorontalo juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas kedua sektor ini, baik melalui penyuluhan kepada petani dan nelayan, pengembangan teknologi pertanian, maupun peningkatan kualitas produk yang dapat bersaing di pasar regional maupun internasional. Salah satu cara untuk menggali potensi ini adalah dengan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi produk bernilai tambah yang dapat menambah pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, retribusi dan pajak yang dikenakan pada sektor-sektor ini dapat menjadi sumber PAD yang penting jika pengelolaannya dilakukan dengan baik.

Penerapan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan juga akan sangat membantu dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem pengawasan pajak agar lebih mudah diakses oleh wajib pajak dan lebih efektif dalam memungut pajak daerah. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak, seperti sistem pembayaran pajak secara elektronik atau e-tax, dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat proses pemungutan pajak. Dengan adanya sistem yang transparan dan mudah digunakan, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar pajak, sehingga pendapatan daerah akan meningkat.

Langkah lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat adalah menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik. Kemitraan ini bisa dalam bentuk *Public-Private Partnerships* (PPP), di mana sektor swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh daerah, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, atau sistem penyediaan air bersih. Kemitraan ini tidak hanya membantu pemerintah daerah dalam hal

pembiayaan, tetapi juga mempercepat realisasi proyek-proyek penting yang akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, memastikan bahwa kebijakan yang ada mendukung kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Pemerintah daerah juga harus memperhatikan pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang efisien, daerah dapat memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja, yang memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, juga akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang.

3. Tantangan 3: Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo. Masalah ini telah menjadi perhatian utama dalam pengelolaan pemerintahan di banyak daerah di Indonesia, termasuk Gorontalo. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting karena menyangkut bagaimana anggaran daerah digunakan, serta apakah penggunaan dana tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika pengelolaan anggaran daerah tidak dilakukan secara transparan, maka potensi penyalahgunaan anggaran dan praktek korupsi menjadi lebih besar. Selain itu, ketidakjelasan informasi mengenai penggunaan anggaran dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika masyarakat merasa tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola uang rakyat, akan kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan kredibilitas pemerintah.

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran dapat berakibat buruk bagi daya tarik investasi di daerah tersebut. Investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, membutuhkan kepastian dan kejelasan dalam hal pengelolaan keuangan suatu daerah sebelum membuat keputusan investasi. Jika pengelolaan keuangan daerah tidak transparan dan akuntabel, maka investor akan enggan untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut, yang pada akhirnya akan

menghambat perkembangan ekonomi daerah. Potensi ekonomi daerah yang besar bisa terhambat hanya karena masalah ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran yang tidak tercermin dengan baik dalam laporan keuangan. Sehingga, untuk meningkatkan daya saing dan menarik minat investor, pemerintah daerah perlu serius dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Salah satu langkah yang sangat penting adalah dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah daerah harus menyediakan laporan keuangan yang jelas dan rinci mengenai penggunaan anggaran daerah. Laporan tersebut harus mencakup informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk bagaimana dana yang diperoleh dari pajak daerah, transfer dari pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Penyediaan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bagaimana uangnya digunakan dan memungkinkan untuk memberikan masukan atau bahkan mengkritisi penggunaan anggaran yang dianggap tidak efisien atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat diakses secara rutin oleh masyarakat. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media massa. Dengan perkembangan teknologi, informasi mengenai anggaran dan laporan keuangan dapat disebarkan dengan cepat dan mudah kepada masyarakat. Pemerintah daerah dapat membuat situs web resmi yang secara rutin mengunggah laporan keuangan daerah, baik yang bersifat tahunan maupun laporan-laporan anggaran yang lebih spesifik. Selain itu, informasi tersebut dapat dipublikasikan melalui media massa, seperti koran, radio, dan televisi lokal, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan lebih mudah. Forum-forum publik, seperti pertemuan antara pemerintah dan masyarakat, juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Ini akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menanyakan hal-hal yang dianggap belum jelas atau untuk memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran.

Salah satu solusi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang independen dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut. Audit independen secara berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Auditor independen yang tidak memiliki keterikatan dengan pemerintah daerah akan dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap penggunaan anggaran dan apakah pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Hasil dari audit ini kemudian dapat dipublikasikan agar masyarakat tahu apakah anggaran daerah telah dikelola dengan baik dan tidak ada indikasi penyalahgunaan dana.

Audit juga dapat membantu mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperbaiki. Dengan adanya audit yang teratur, pemerintah daerah dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem pengelolaan anggaran yang mungkin tidak terlihat oleh pihak internal pemerintah. Hal ini juga menjadi sinyal positif bagi investor, yang akan merasa lebih yakin bahwa pengelolaan keuangan daerah berada di tangan yang tepat dan tidak ada potensi risiko yang berasal dari penyalahgunaan anggaran. Dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, akan tercipta iklim investasi yang lebih kondusif bagi pengembangan ekonomi daerah.

Pengawasan internal yang baik juga sangat diperlukan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa ada sistem pengawasan internal yang baik dan dapat diandalkan untuk mengawasi penggunaan anggaran di tingkat operasional. Pengawasan internal ini dapat dilakukan oleh unit pengawasan internal di dalam instansi pemerintah, serta melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang bisa membantu mengawasi penggunaan dana yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak akan memperkecil peluang untuk terjadinya penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam setiap kebijakan yang diambil.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa atau

forum-forum publik lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan prioritas anggaran dan mengawasi penggunaannya. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki peran dalam pengelolaan anggaran daerah, yang akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan dana.

4. Tantangan 4: Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi tantangan yang signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di Provinsi Gorontalo. Meskipun pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kualitas SDM yang terlibat, banyak pegawai pemerintah daerah yang masih kurang memahami aspek-aspek teknis terkait penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Keterbatasan ini sering kali berakibat pada kesalahan dalam perencanaan anggaran, pemborosan dana, serta penurunan kualitas program dan pelayanan publik yang didanai oleh anggaran daerah. Pengelolaan anggaran yang tidak optimal juga dapat menurunkan akuntabilitas dan transparansi, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan masalah keterbatasan SDM ini agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih baik dan lebih efisien.

Kurangnya pemahaman pegawai pemerintah daerah terhadap aspek teknis pengelolaan keuangan tidak hanya berdampak pada pembuatan anggaran, tetapi juga pada proses implementasi anggaran itu sendiri. Banyak program yang tidak berjalan sesuai rencana karena ketidakmampuan dalam mengelola anggaran dengan baik. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan di bidang keuangan juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan transaksi, pengendalian anggaran, serta pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Akibatnya, tidak hanya kualitas pelayanan publik yang terganggu, tetapi juga potensi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi terhambat. SDM yang kurang terlatih juga berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran, bahkan korupsi, yang merugikan masyarakat. Hal ini menambah beban pada pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan keterbatasan SDM ini, langkah pertama yang perlu diambil adalah meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah melalui program pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif dan menyeluruh. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan daerah, seperti universitas atau lembaga pelatihan profesional. Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat mengadakan kursus, pelatihan, atau seminar yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis di lapangan. Program pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, serta teknik-teknik pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Program pelatihan yang dirancang dengan baik harus memfokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai regulasi yang berlaku, serta teknik-teknik terbaru dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelatihan ini juga dapat mencakup studi kasus yang relevan dengan kondisi daerah, sehingga pegawai dapat lebih mudah mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam konteks yang nyata. Selain itu, dengan mengadakan pelatihan secara rutin, pegawai akan terus memperbarui keterampilan, mengikuti perkembangan kebijakan dan regulasi, serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan. Ini akan memungkinkan pegawai untuk lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya, mengurangi pemborosan anggaran, serta meningkatkan kualitas program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kerja sama dengan lembaga internasional juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah. Banyak lembaga internasional yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menawarkan pelatihan dan kursus yang dapat diikuti oleh pegawai pemerintah daerah. Program-program pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga internasional dapat memberikan wawasan baru mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan di berbagai negara. Lembaga internasional juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi dan sistem informasi terbaru yang mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan. Dalam hal ini, bantuan teknis dan finansial dari lembaga internasional

dapat berperan penting dalam mempercepat peningkatan kapasitas SDM daerah.

Reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM juga sangat diperlukan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah dalam reformasi birokrasi adalah melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki kinerja terbaik, serta memberikan pelatihan lanjutan bagi pegawai yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Sistem meritokrasi yang diterapkan dalam reformasi birokrasi akan membantu memastikan bahwa pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja terbaik mendapatkan posisi yang sesuai dengan keahlian. Hal ini akan mendorong pegawai untuk bekerja lebih profesional, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Reformasi birokrasi juga dapat mencakup penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi dapat membantu mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data, pegawai akan lebih mudah dalam mengakses informasi terkait anggaran, serta melakukan analisis yang lebih cepat dan akurat. Hal ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Pemanfaatan teknologi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kolaborasi antara berbagai instansi dan lembaga di dalam pemerintahan. Dengan sistem yang terintegrasi, pegawai dapat berbagi data secara langsung, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, teknologi dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta mempermudah proses audit yang dapat dilakukan secara lebih terperinci dan akurat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih cepat dan tepat dalam menanggapi berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan.

Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah bukan hanya berfokus pada pelatihan dan pendidikan, tetapi juga pada

pembenahan struktur organisasi dan sistem birokrasi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memiliki pemahaman yang kuat tentang tugas dan tanggung jawab. Penyusunan struktur organisasi yang jelas dan efisien, serta pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing, akan membantu memperlancar proses pengelolaan keuangan. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan, kerja sama internasional, dan reformasi birokrasi, Provinsi Gorontalo dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.

5. Tantangan 5: Infrastruktur yang Tidak Memadai

Infrastruktur yang tidak memadai di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterbatasan infrastruktur, baik itu di sektor transportasi, komunikasi, maupun pelayanan publik, menghalangi pertumbuhan ekonomi yang optimal dan mengurangi daya tarik provinsi ini sebagai tujuan investasi. Infrastruktur yang buruk memperlambat distribusi barang dan jasa, menghambat akses masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi efisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat dan potensi ekonomi daerah, serta menyebabkan ketimpangan antara provinsi dengan daerah lain yang memiliki infrastruktur yang lebih maju. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Salah satu bentuk ketidakmampuan infrastruktur yang paling mencolok adalah dalam sektor transportasi. Banyak daerah di Provinsi Gorontalo yang masih sulit dijangkau karena akses jalan yang rusak, tidak terawat, atau bahkan tidak ada sama sekali. Keterbatasan infrastruktur jalan raya dan jembatan ini menghambat mobilitas barang dan orang, yang pada gilirannya merugikan sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada distribusi yang efisien, seperti perdagangan, pertanian, dan industri. Misalnya, produk pertanian yang diproduksi di daerah-daerah terpencil sering kali sulit untuk sampai ke pasar, sehingga

menyebabkan harga produk yang tinggi dan sulitnya pemasaran hasil pertanian. Di sisi lain, para pelaku usaha juga cenderung enggan berinvestasi di daerah yang memiliki infrastruktur transportasi yang buruk, karena biaya logistik yang tinggi dan waktu distribusi yang lama. Ini akhirnya memperburuk ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, yang tidak dapat mendukung secara maksimal perkembangan ekonomi daerah.

Infrastruktur komunikasi yang kurang memadai juga menjadi masalah besar di Provinsi Gorontalo. Terbatasnya jaringan internet dan komunikasi mempengaruhi efisiensi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, dalam pengelolaan anggaran daerah, ketergantungan pada sistem manual masih ada, sementara sistem digitalisasi yang lebih efisien dan transparan belum sepenuhnya diterapkan di daerah-daerah tertentu. Keterbatasan komunikasi ini juga menghambat aliran informasi yang diperlukan oleh masyarakat untuk memahami dan mengawasi penggunaan anggaran daerah. Transparansi yang kurang akibat terbatasnya akses informasi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur komunikasi juga mengurangi daya tarik Provinsi Gorontalo bagi investor asing dan domestik, yang memerlukan konektivitas yang cepat dan handal untuk beroperasi secara efektif.

Keterbatasan infrastruktur dalam sektor pelayanan publik juga sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Fasilitas dasar seperti rumah sakit, sekolah, pasar, dan tempat ibadah sering kali tidak tersebar merata atau kualitasnya kurang baik. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan misalnya, mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak di beberapa daerah. Begitu pula dengan fasilitas pendidikan yang terbatas, yang menghalangi akses anak-anak dari daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ketika kualitas pelayanan publik terganggu oleh kurangnya infrastruktur, maka kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan juga terganggu. Hal ini pada gilirannya akan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di antara masyarakat Gorontalo, yang pada akhirnya berdampak pada pengelolaan keuangan daerah yang tidak optimal.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan infrastruktur ini, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo perlu merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih terencana, berkelanjutan, dan

berbasis pada kebutuhan mendesak masyarakat. Pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan pada sektor-sektor yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta jaringan komunikasi dan internet. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mengidentifikasi dengan cermat lokasi-lokasi yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun masih tertinggal dalam hal infrastruktur. Selain itu, pemerintah daerah juga harus membuat perencanaan yang matang agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara berkesinambungan tanpa mengabaikan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang terencana juga harus mempertimbangkan faktor keberlanjutan, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, setiap proyek pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan prinsip perencanaan yang berbasis pada kajian lingkungan hidup, guna memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur juga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan mobilitas ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi.

Untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur, kolaborasi dengan pihak swasta juga sangat penting. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang mendukung kemitraan antara sektor publik dan swasta (*Public-Private Partnership/PPP*). Dalam hal ini, pemerintah daerah bisa mengajak sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Melalui kerjasama ini, pemerintah daerah tidak hanya dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengurangi beban anggaran daerah. Pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur juga dapat memperoleh keuntungan dari proyek-proyek tersebut, sementara masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari peningkatan infrastruktur yang lebih baik.

Pemerintah daerah harus memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi sumber daya alam yang

ada di Provinsi Gorontalo, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pendapatan dari sektor-sektor ini dapat dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menciptakan siklus yang saling menguntungkan, di mana pembangunan infrastruktur akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur lebih lanjut.

Dengan memahami tantangan infrastruktur yang tidak memadai dan menerapkan solusi-solusi yang tepat, Provinsi Gorontalo dapat mempercepat pembangunan daerahnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menarik investasi. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, ditopang oleh infrastruktur yang memadai, akan meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Pembelajaran dari Studi Kasus

Studi kasus mengenai pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya dan pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa pembelajaran kunci yang dapat diambil dari analisis tersebut:

1. Pentingnya Perencanaan Anggaran yang Berbasis Kinerja

Perencanaan anggaran yang berbasis kinerja sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, karena dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pendekatan ini memfokuskan pada hasil yang dicapai, bukan hanya pada alokasi dana atau jumlah anggaran yang disalurkan untuk suatu program atau proyek. Dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi prioritas anggaran yang benar-benar mendesak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menghindari pemborosan atau penggunaan dana yang tidak efisien.

Pentingnya pendekatan berbasis kinerja terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan anggaran. Ketika anggaran disusun dengan mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai, maka setiap program atau proyek akan lebih mudah dipantau dan dievaluasi. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana dana yang dikeluarkan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau sektor lainnya. Dengan demikian, masyarakat juga dapat melihat secara jelas bagaimana anggaran yang digunakan dapat mempengaruhi kehidupan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Implementasi perencanaan anggaran berbasis kinerja memerlukan pengembangan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program dan proyek. Indikator ini harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, terukur, dan realistis. Misalnya, dalam program pembangunan infrastruktur, indikator kinerja dapat berupa jumlah jalan yang dibangun atau diperbaiki dalam suatu periode tertentu, atau tingkat keterjangkauan akses transportasi yang ditingkatkan. Sedangkan dalam program kesehatan, indikator kinerja dapat berupa penurunan angka kematian ibu dan anak atau peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Pengembangan indikator yang tepat dan terukur ini akan memudahkan evaluasi dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan.

Evaluasi berkala terhadap pencapaian indikator juga sangat penting. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat apakah program atau proyek yang telah dibiayai dengan anggaran daerah telah mencapai hasil yang diinginkan. Jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target, maka kebijakan atau strategi anggaran perlu disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Evaluasi yang rutin juga membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala yang muncul selama pelaksanaan program dan mencari solusi yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, perencanaan anggaran berbasis kinerja bukan hanya tentang menyusun anggaran, tetapi juga tentang proses pemantauan dan penyesuaian yang berkelanjutan agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan optimal.

2. Diversifikasi Sumber Pendapatan

Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi salah satu langkah strategis yang sangat penting untuk mencapai kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan pada satu sumber pendapatan, seperti transfer tersebut, memiliki risiko besar terhadap stabilitas keuangan daerah, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau penurunan anggaran nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi sumber pendapatan yang ada di wilayahnya, guna memastikan kelancaran dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah dalam jangka panjang.

Salah satu cara yang efektif untuk diversifikasi pendapatan adalah dengan memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah. Banyak daerah, termasuk Provinsi Gorontalo, memiliki sumber daya alam, sektor ekonomi, dan potensi industri yang belum digali secara optimal untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui pajak. Pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak lainnya bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan jika dikelola dengan baik. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan dan analisis terhadap sektor-sektor yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan dan menciptakan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ini juga mencakup pembaruan data dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah administrasi pajak serta meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak.

Retribusi daerah seperti biaya parkir, izin usaha, dan layanan publik lainnya juga dapat dijadikan sumber pendapatan tambahan. Pemerintah daerah perlu memonitor dan mengevaluasi tarif retribusi yang ada untuk memastikan bahwa tarif tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, sambil tetap mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Penerapan sistem tarif yang progresif dan adil dapat membantu meningkatkan penerimaan tanpa memberatkan masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik dapat memberikan dampak positif

bagi pendapatan daerah. Sebagai contoh, kerja sama dalam pembangunan infrastruktur transportasi, perumahan, atau fasilitas umum lainnya tidak hanya dapat meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan melalui pajak atau retribusi yang terkait dengan proyek tersebut. Melalui model kemitraan ini, sektor swasta dapat berinvestasi dalam proyek-proyek besar yang menguntungkan kedua belah pihak, sementara pemerintah daerah tetap memperoleh bagian dari hasil pendapatan yang dihasilkan oleh proyek tersebut.

Dengan memanfaatkan berbagai sumber pendapatan ini secara optimal, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, yang sering kali terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi atau kebijakan nasional. Diversifikasi sumber pendapatan tidak hanya memperkuat posisi fiskal daerah, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu berinovasi dan melibatkan berbagai stakeholder dalam upaya diversifikasi ini, agar pendapatan asli daerah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

3. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pilar Kepercayaan Publik

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan dua pilar utama yang mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah mengelola anggaran secara terbuka dan bertanggung jawab, akan lebih mendukung kebijakan yang diambil dan merasa lebih yakin bahwa sumber daya yang digunakan akan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran harus tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini akan memberikan gambaran yang

jelas tentang bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan untuk berbagai program atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, pemerintah daerah perlu menyusun laporan keuangan yang komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Laporan ini harus mencakup informasi terkait dengan pengeluaran anggaran, sumber pendapatan, serta capaian atau hasil yang diharapkan dari setiap program yang didanai. Dengan adanya laporan yang jelas dan terbuka, masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah, serta dapat memberikan masukan atau kritik yang konstruktif.

Untuk meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang ada, seperti media sosial, situs web resmi pemerintah, dan forum-forum publik. Penggunaan media sosial yang semakin populer di kalangan masyarakat memungkinkan pemerintah untuk menjangkau lebih banyak orang dengan informasi yang cepat dan mudah dipahami. Selain itu, situs web resmi pemerintah daerah juga dapat dijadikan platform utama untuk menyebarluaskan laporan keuangan, anggaran tahunan, dan perkembangan terkini terkait dengan penggunaan dana publik. Pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan mengenai laporan yang dipublikasikan, sehingga terjadi dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Akuntabilitas, di sisi lain, mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan anggaran. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi legalitas, efisiensi, maupun efektivitasnya. Untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah perlu melakukan audit keuangan secara independen dan berkala. Audit independen akan memberikan penilaian objektif mengenai kesesuaian penggunaan anggaran dengan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar sampai pada tujuan yang diinginkan.

Dengan audit ini, masyarakat dapat memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilakukan dengan transparan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Audit independen yang dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dan

memiliki integritas yang tinggi akan memperkuat kredibilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, hasil audit yang dipublikasikan secara terbuka dapat memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana dana publik dikelola, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah akan memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Kepercayaan ini akan menjadi modal sosial yang berharga bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu kunci penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Kualitas SDM yang ada di pemerintah daerah sangat memengaruhi cara pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan para pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan seringkali menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan fiskal yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM di sektor ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan transparan.

Pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk para pegawai di bidang manajemen keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun, mengelola, dan mengevaluasi anggaran secara profesional. Banyak pegawai pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman teknis mengenai prinsip-prinsip pengelolaan anggaran, alokasi dana, serta analisis dan evaluasi keuangan. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius, maka perencanaan anggaran bisa menjadi kurang tepat dan berisiko, yang pada gilirannya akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu, pelatihan yang dirancang khusus untuk mengatasi kelemahan ini perlu diberikan secara berkala, dengan topik-topik yang

mencakup berbagai aspek manajemen keuangan seperti pengelolaan anggaran berbasis kinerja, audit internal, perencanaan fiskal, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran.

Implementasi program pelatihan dan pendidikan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti workshop, seminar, pelatihan berbasis proyek, atau bahkan program pendidikan formal yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi atau universitas. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi atau organisasi internasional yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan publik dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran dan keuangan. Kerja sama ini dapat mencakup pengiriman pegawai pemerintah untuk mengikuti kursus atau pelatihan di luar negeri atau mengundang ahli dari lembaga tersebut untuk memberikan pelatihan di tingkat daerah. Program ini juga dapat mencakup pembelajaran mengenai penggunaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan, yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, cepat, dan efisien.

Pengembangan kapasitas SDM juga memerlukan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem seleksi dan promosi pegawai, serta menekankan pada kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menilai kinerja pegawai dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk membangun budaya belajar berkelanjutan di kalangan pegawai dengan menyediakan akses yang mudah ke sumber daya pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan kapasitas SDM ini juga berhubungan erat dengan upaya meningkatkan motivasi kerja para pegawai. Jika pegawai merasa bahwa ia diberikan kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kemampuannya, akan lebih berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebaliknya, jika kurangnya keterampilan dan pengetahuan dibiarkan tanpa penanganan yang serius, maka pengelolaan keuangan daerah akan terus menghadapi kendala yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan kemandirian fiskal daerah. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan tidak hanya akan memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam

pengelolaan dana publik. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

5. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan aspek yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi di suatu daerah. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, fasilitas publik, dan sistem transportasi, dapat menjadi fondasi utama dalam memperlancar mobilitas barang dan orang, serta mempercepat proses pembangunan. Keterbatasan infrastruktur di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu hambatan signifikan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, menghambat perkembangan sektor-sektor utama, serta mengurangi daya tarik investasi. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah fasilitas, tetapi juga pada kualitas dan ketahanannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Infrastruktur harus dibangun dengan memperhitungkan dampak jangka panjang, tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak tetapi juga mempertimbangkan pertumbuhan jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan jalan dan jembatan harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat bertahan dalam waktu lama dan tidak menambah beban anggaran daerah di masa depan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang berlebihan.

Investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, dan sistem air bersih harus menjadi prioritas utama dalam anggaran daerah. Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi dapat meningkatkan aksesibilitas, membuka peluang perdagangan, dan mempercepat distribusi barang serta jasa. Hal ini akan meningkatkan produktivitas daerah dan mendorong sektor ekonomi lainnya untuk

berkembang, seperti sektor pariwisata dan industri kecil dan menengah. Pembangunan fasilitas umum yang memadai juga sangat penting untuk menunjang kualitas hidup masyarakat, seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan sistem sanitasi yang baik.

Pentingnya melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk mendanai dan mengelola proyek-proyek infrastruktur. Model kemitraan publik-swasta (*public-private partnership/PPP*) dapat membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan anggaran dengan memanfaatkan sumber daya dari sektor swasta. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur juga dapat membawa keahlian teknis dan manajerial yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proyek. Kerja sama ini memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur lebih cepat, dengan biaya yang lebih terkendali, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga harus diiringi dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang efisien setelah proyek selesai. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merencanakan sistem pemeliharaan dan perawatan jangka panjang untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap dapat digunakan dengan baik. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan menarik investasi yang lebih besar ke daerah.

6. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal. Masyarakat memiliki perspektif yang unik mengenai tantangan dan prioritas yang dihadapi di tingkat akar rumput, yang sering kali tidak dapat diidentifikasi dengan tepat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan

kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keterlibatan ini juga berfungsi untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, karena masyarakat dapat secara langsung memantau dan mengawasi penggunaan anggaran, yang berpotensi mengurangi penyalahgunaan dana.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran dapat dilihat dari pendekatan partisipatif yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan terkait prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Proses ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program-program yang dianggap paling penting, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan yang belum terakomodasi dalam kebijakan pemerintah, serta memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi yang terjadi di lapangan. Ini memungkinkan pemerintah untuk merancang anggaran yang lebih realistis dan terfokus pada masalah yang benar-benar dirasakan oleh warga.

Untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat yang efektif, pemerintah daerah perlu menciptakan mekanisme partisipatif yang terbuka dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan forum-forum diskusi atau konsultasi publik yang rutin. Forum-forum ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan saran atau kritik terhadap rencana anggaran yang akan dijalankan. Dengan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin belum terdeteksi sebelumnya dan memperbaiki kebijakan anggaran yang ada.

Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan platform daring atau aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi anggaran dan memberikan masukan secara langsung akan meningkatkan efisiensi dan inklusivitas proses partisipasi. Ini juga memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang mungkin tidak dapat menghadiri forum fisik, seperti yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu.

Implementasi pembelajaran ini dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya akan memperbaiki efektivitas anggaran, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, masyarakat merasa dihargai dan diperhitungkan, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif dalam program-program pembangunan. Hal ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan publik yang diterima oleh warga.



BAB VIII

PENUTUP

Buku referensi “Optimalisasi Sumber Daya Lokal di Provinsi Gorontalo dalam Mewujudkan Penguatan Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal” menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya lokal yang efektif dan efisien untuk mendukung kemandirian fiskal Provinsi Gorontalo. Buku ini menyajikan berbagai strategi yang perlu diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pada prosesnya, optimalisasi sumber daya lokal, seperti potensi alam, pertanian, dan pariwisata, diidentifikasi sebagai sektor-sektor yang memiliki peluang besar untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dikelola dengan baik. Penulis menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang berbasis pada potensi lokal dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta juga ditekankan, untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Selain itu, buku ini juga memberikan rekomendasi mengenai kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan sektor-sektor strategis daerah dan meningkatkan daya saing ekonomi Gorontalo. Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pengelolaan sumber daya lokal dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih berkelanjutan. Implementasi dari rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi fiskal Gorontalo dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.



DAFTAR PUSTAKA

- Affes, W., & Jarboui, A. (2023). The impact of corporate governance on financial performance: a cross-sector study. *International Journal of Disclosure and Governance*, 0123456789. <https://doi.org/10.1057/s41310-023-00182-8>
- Agla, T., Sembiring, R., & Sragih, R. (2023). Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 145–154. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Agustyawati, D. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), 72–82. <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1.257>
- Akib, H. (2009). Artikulasi Perkembangan Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Baca Universitas Pepabri Makassar*, 3(1), 1–17. <https://www.scribd.com/doc/119148085/Artikulasi-Perkembangan-Administrasi-Publik-Jurnal-BACA-2009>
- Amelia, B. (2023). Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara Di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. 1, 1–14.
- Amin, A., Juanda, B., & Rindayati, W. (2023). The Effect of Fiscal Independence and Economic Growth on Reducing Poverty and Unemployment in Indonesia. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 2(2), 97–109.
- Amri, A., Widyastuti, T., Bahri, S., & Ramdani, Z. (2023). Effect of Individual Attributes toward Financial Management Behavior through Locus of Control. *Etikonomi*, 22(2), 443–456. <https://doi.org/10.15408/etk.v22i2.26563>
- Ananda, F. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dilihat Dari Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Kantor BKD Provinsi Sumatera Barat. *Pundi*, 07(01), 77–92. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i1.457>

- Aneta, A., Maha Atma, K., & Hais, D. (2017). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Gorontalo. *Seminar IQRA*, 1(1), 1003–1019.
- Aneta, Y., & Podungge, A. W. (2021). Social Control through Public Disclosure on Tax: A New Approach to Enhance Tax Compliance. *Iapa Proceedings Conference*, 60–77. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2021.523>
- Anggara, Sahya (2016) *Administrasi Keuangan Negara*. Pustaka Setia: Bandung
- Anonymous. (2018). *Principles of Administrative Theory*.
- Anggraini, R., Rokhmawati, A., & Nurmayanti, P. (2023). Analisis Pengaruh Kebijakan Keuangan Terhadap Profitabilitas dengan Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 90–102. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.751>
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2023). Public administration and politics meet turbulence: The search for robust governance responses. *Public Administration*, 101(1), 3–22. <https://doi.org/10.1111/padm.12874>
- Aprilia, F. Y., Allisa, S., Pratiwi, D. S., Fitriah, L. D., Mendrofa, M., Wardani, A. P., Yuhertina, I., & Wilasittha, A. A. (2023). Analisis Bibliometrik Kasus Korupsi Pelaksanaan APBD. *Prociding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 483–491. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art57>
- Arredondo-Soto, K. C., Blanco-Fernandez, J., Miranda-Ackerman, M. A., Solis-Quinteros, M. M., Realyvasquez-Vargas, A., & Garcia-Alcaraz, J. L. (2021). A Plan-Do-Check-Act Based Process Improvement Intervention for Quality Improvement. *IEEE Access*, 9, 132779–132790. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3112948>
- Aspinall, Edward & Fealy, Greg (2003). *Local Power and Politics in Indonesia Decentralisation & Democratisation*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Bajra, U., & Simon, C. (2017). Audit committees and financial reporting quality: The 8th EU Company Law Directive perspective. *Economic Systems*, 42(1), 151–163. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.03.002>
- Bayrak, A. E., McComb, C., Cagan, J., & Kotovsky, K. (2021). A strategic decision-making architecture toward hybrid teams for dynamic

- competitive problems. *Decision Support Systems*, 144, 113490. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113490>
- Beest, F. Van, Braam, G., & Boelens, S. (2009). NiCE Working Paper 09-108 Quality of Financial Reporting : measuring qualitative characteristics Ferdy van Beest Geert Braam Institute for Management Research. Nijmegen Center for Economics (NiCE), 9(109), 1–41.
- Beetsma, R., Cimadomo, J., & Spronsen, J. Van. (2022). One scheme fits all: a central fiscal capacity for the EMU targeting eurozone, national and regional shocks. ECB Working Paper Series, 2666, 1–26.
- Bellofatto, A. A., & Besfamille, M. (2018). Regional state capacity and the optimal degree of fiscal decentralization. *Journal of Public Economics*, 159(January), 225–243. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.12.010>
- Benshlomo, O. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Tranformasional Terhadap Motivasi Dalam Pandangan New Public Management. *Journal of Administration and Educational Management*, 4(1), 13–24.
- Beshah B, J. K. (2014). The Plan-Do-Check-Act Cycle of Value Addition. *Industrial Engineering & Management*, 03(01), 1–5. <https://doi.org/10.4172/2169-0316.1000124>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Confiança Pública no Governo Local: Explicando o Papel das Boas Práticas de Governança. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350.
- Borg, I., & Groenen, P. J. F. (2005). *Modern multidimensional scaling* (2nd ed.). Berlin: Springer.
- Cárcaba, A., Arrondo, R., & González, E. (2022). Does good local governance improve subjective well-being? *European Research on Management and Business Economics*, 28(2). <https://doi.org/10.1016/j.iemeen.2021.100192>
- Chen, H., Han, W., & Mao, L. (2019). Regional Fiscal Competition and Corporate Environmental Information Disclosure: Provincial-Level Evidence From China. *Tropical Conservation Science*, 12, 1–5. <https://doi.org/10.1177/1940082919839919>
- Chen, S., Lakkanawanit, P., Suttipun, M., & Xue, H. (2023). Environmental regulation and corporate performance: The effects of green financial management and top management’s environmental awareness.

- Cogent Business and Management, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2209973>
- Chenhall, R. (2003). Quantitative stress measurement of elastic deformation using mechanoluminescent sensor: An intensity ratio model. *Review of Scientific Instruments*, 28(2), 127–168.
<https://doi.org/10.1063/1.5024417>
- Chien, N. B., & Thanh, N. N. (2022). The Impact of Good Governance on the People's Satisfaction with Public Administrative Services in Vietnam. *Administrative Sciences*, 12(1), 1–12.
<https://doi.org/10.3390/admsci12010035>
- Chornovol, A., Tabenska, J., Tomniuk, T., & Prostebi, L. (2020). Public finance management system in modern conditions. *Investment Management and Financial Innovations*, 17(4), 402–410.
[https://doi.org/10.21511/imfi.17\(4\).2020.34](https://doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.34)
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Christmawan, P. E. E. C., & Utami, L. R. (2022). Strategi Kemudahan Berusaha Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia Di Bidang Ekspor Dan Investasi. *Manajemen Dewantara*, 6(1), 118–131. <https://doi.org/10.26460/md.v6i1.12101>
- Dewi, T., Lidiya, H., Tsabita, H., & Michelle, C. (2021). Open Access Indonesia Journal of Social Sciences. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 4(1), 132–142.
- Dewit, A., & Steinmo, S. (2002). The Political Economy of Taxes and Redistribution in Japan. *Oxford Journals*, 5(2), 159–178.
- Dharmawan, D. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS)*, 4(2), 49–58.
<https://doi.org/10.24967/jmb.v4i2.763>
- Dian, S., Ananda, S., Andini S, R., Anisa B, A., & Anisa D, L. (2023). Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Scope Of Financial Management. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 1(3), 60–65.
<https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.196>
- Diana, P., Eforis, C., & Osesoga, M. S. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias

- Selatan. *ULTIMA Accounting*, 10(2), 96–109.
<https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i2.928>
- Dicky Perwira, O., & Melya, N. (2023). Efektifitas Manajemen Keuangan UMKM di Kota Palangka Raya Sebagai Strategi pada Masa New Normal Covid-19. *Jurnal Visi Manajemen*, 9(2), 01–07. <https://doi.org/10.56910/jvm.v9i2.277>
- Digdowniseiso, K., W, N. P. L., & Andriani, F. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 127–137. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.556>
- Dong, L. (2015). *Public Administration Theories* (1 ed.). Martin's Press LLC.
- Dong, W., Hou, X., & Qin, G. (2023). Research on the Carbon Emission Reduction Effect of Green Taxation under China's Fiscal Decentralization. *Sustainability* (Switzerland), 15(5), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su15054591>
- Du, L. (2024). Comprehensive Evaluation of Enterprise Financial Management Based on Full-Cost Accounting Economic Management Model. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1), 1–13.
<https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.01337>
- E. (2020). Managing a pool of rules for credit card fraud detection by a Game Theory based approach. *Future Generation Computer Systems*, 102, 549–561.
<https://doi.org/10.1016/j.future.2019.08.028>
- Edwin Gendong, A., Tamenno, N., & E. de Rozari, P. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai. *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3476–3495.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1156>
- Eka Pala, S., & Miftahul, A. (2020). Regional Financial Transparency Towards Independence Of Development And Good Governance. *JILS (JOURNAL of INDONESIAN LEGAL STUDIES)*, 5(2), 277–294.
- Elghaish, F., Pour Rahimian, F., Hosseini, M. R., Edwards, D., & Shelbourn, M. (2022). Financial management of construction projects: Hyperledger fabric and chaincode solutions. *Automation in Construction*, 137(November 2021), 104185.
<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104185>

- Elizabet, P. S. M., Megawati, & Juwita, R. (2023). *Pengelolaan Keuangan dan Peran E-Commerce Dalam Keberlangsungan Usaha Toko Besi UD Abadi Palembang*. 3(1), 33–36.
- Fang, Z., Li, Z., & Tao, S. (2022). Environmental Information Disclosure, Fiscal Decentralization, and Exports: Evidence From China. *Frontiers in Environmental Science*, 10(May), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.813786>
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Ferlie, E. (2017). The New Public Management and Evaluation. *The New Public Management and Public Management Studies The*, 10(2), 1–23. [https://doi.org/10.1016/S1474-7863\(07\)10001-6](https://doi.org/10.1016/S1474-7863(07)10001-6)
- Firdausijah, R. T., Alasan, A., Mustanir, A., Abdurohim, Sunariyanto, Fauzan, R., Sagen, U., & Aman, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik*. PT. Global Eksekutif Teknologi: Sumatera Barat.
- Fitriani, P. N., Malicha, I. N., Ardiansyah, S., & Dewi, N. R. (2023). Analisis Hukum Kekelangan Materi Dalam Teori Piaget Menggunakan Metode Kualitatif Observasi. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 6(pp), 497–500.
- Frank J, F., & Pamela, P. D. (2009). *Finance Capital Markets, financial management, and Investment Management*. John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved: Published simultaneously in Canada.
- Galwa, J., & Vogel, R. (2023). In search of legitimacy: conflicting logics and identities of management consultants in public administration. *Public Management Review*, 25(2), 404–428. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1974713>
- Gianini, G., Ghemmogne Fossi, L., Mio, C., Caelen, O., Brunie, L., & Damiani,
- Gideta, T., Alam, M., & Tolassa, D. (2021). The Practices and Challenges of Fiscal Decentralization: A Case of Bedelle Woreda, Oromia Region, Ethiopia. *PanAfrican Journal of Governance and Development*, 2(2), 50–80.
- Gramedia Pustaka Utama.
- Gultom Lidia, L. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah

- Kabupaten Labuhanbatu Pusat). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(11), 1266–1285. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1997>
- Halim, Abdul & Iqbal, Muhammad (2019) *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Haris. S., Pabottinggi. M., Hidayat, Syarif., Sallam. A., Ratnawati, T., Romli, L (2006). *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. LIPI Press: Jakarta Indonesia.
- Haryani, S., Akhdiyat, R., Iqbal, M., Mintarti, S., & Sari, W. I. R. (2023). Implementasi new public management (NPM) badan kepegawaian daerah (studi kasus Kabupaten B). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5(25), 330–335. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art38>
- Hendriana, T. I., Werdiningsih, R., Samsara, L., IAN, S., Lelo Sintani, M. M., Barsei, A. N., ... & Sarie, F. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Hidayat, S., Haris, O. K., Rizky, A., & Seriyati, E. (2023). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Authority of the Supreme Audit Agency (BPK) and Development Audit Agency (BPKP) in Determining State Financial. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 592–604. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2.551>
- <https://doi.org/10.32400/ja.2343.2.1.2013.50-60>
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Fiscal decentralization, economic growth, and human development: Empirical evidence. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109279>
- Ichwanudin, W., & Setyadi, S. (2019). Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Pengembangan Potensi Daerah Di Kabupaten Lebak. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(2), 282. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i2.6481>
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Indrati, M., & Handayani, R. (2022). The effect of good corporate governance on financial distress. *Fair Value: Jurnal Ilmiah*

- Akuntansi dan Keuangan, 4(10), 4726–4732.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1745>
- Irfani, A. S. (2020). Manajemen Keuangan dan Bisnis; Teori dan Aplikasi.
- Iritani, J., & Tamaoka, M. (2005). Japanese Fiscal Structure between Central and Local Governments Welfare Assessment of the Trinity Reform of Japan Jun IRITANI * Masayuki TAMAOKA **. Japanese Fiscal Structure between Central and Local Governments Japanese, 12, 23–40.
- Ishak, N., Hasibuan, R. R., & Arbani, T. S. (2020). Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System. *Bestuur*, 8(1), 19–26. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922>
- Isniah, S., Hardi Purba, H., & Debora, F. (2020). Plan do check action (PDCA) method: literature review and research issues. *Jurnal Sistem dan Manajemen Industri*, 4(1), 72–81. <https://doi.org/10.30656/jsmi.v4i1.2186>
- Jackling, B., & Sullivan, C. (2007). Financial planners in Australia: An evaluation of gaps in technical and behavioral skills. *Financial Services Review*, 16(3), 211–228.
- Jaja, T. C., & Aditya, Z. F. (2022). Promoting the Good Governance By Advancing the Role of Parliamentarians and the Term Offices Limitation (Comparing Nigeria and Indonesia). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1), 265–298. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54776>
- Janis, R. S., Sondakh, J., & Sabijono, H. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pad Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA*, 3(1), 778–786. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7552>
- Jatmiko, B., & Amalia, S. N. (2022). The Influence of the Internal Control System, Organizational Culture, Leadership Style, and Regional Financial Management System on the Implementation of Good Governance. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSIAMS 2021)*, 201(Icosiams 2021), 178–184. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211225.025>
- Jehan, S. N. (2021). Financial Curriculum Design & Management: Case of Ritsumeikan Asia Pacific University in Japan. *Financial Curriculum Design & Management: Case of Ritsumeikan Asia Pacific University in Japan*, 1(April), 67–75.

- Jinsol, P. (2022). Fiscal Decentralization and the Composition of Local Government Expenditure: Evidence from South Korea. *Public Finance Review*, 50(1), 62–90. <https://doi.org/10.1177/10911421221093142>
- Jultri, A., Made, A., & Wirshandono Y., D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5449>
- Jung, S.-M. (2021). Participatory Budgeting and Government Efficiency: Evidence From Municipal Governments in South Korea. *International Review of Administrative Sciences*, 88(4), 1105–1123. <https://doi.org/10.1177/0020852321991208>
- Jungo, J., Madaleno, M., & Botelho, A. (2022). The Effect of Financial Inclusion and Competitiveness on Financial Stability: Why Financial Regulation Matters in Developing Countries? *Journal of Risk and Financial Management*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/jrfm15030122>
- Jusdin, P. (2011). Penerapan Sistem Insentif Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 9(4), 1292–1303. <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/1799>
- Kadjintuni, Z., Tontik, D., Darman, D., Rachman, A., & Dunggio, T. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 200–210. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4124>
- Kaho, R. Josef (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Karianga, Hendra (2015). *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kencana: Jakarta.
- Keban, Yermias.T (2014) *Enam dimensi Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media: Yogyakarta.
- Khattak, M. S. (2024). The Role of Managerial Competencies in Managing Resources for Sustainable Development Strategy in SMEs. *Social Responsibility Journal*, 20(7), 1317–1344. <https://doi.org/10.1108/srj-11-2023-0634>

- Khoirunisa, I., & Sulaeman, A. S. (2022). Fiscal Decentralization: Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare? *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 213–226. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.848>
- Ki, D. H., Leem, W. Bin, & Yuk, J. H. (2019). The Effect of IFRS Adoption on the Value Relevance of Accounting Information: Evidence From South Korea. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(2), 78–88. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(2\).2019.07](https://doi.org/10.21511/imfi.16(2).2019.07)
- Kim, M.-S., & Pennington-Gray, L. (2017). Does Franchisor Ethical Value Really Lead to Improvements in Financial and Non-Financial Performance? *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 29(10), 2573–2591. <https://doi.org/10.1108/ijchm-04-2016-0188>
- Kim, S., Lee, Y., & Kim, T.-H. (2020). The Relationship Between Fiscal Decentralization and Trust in Government: Evidence From the South Korean Case. *International Review of Administrative Sciences*, 88(2), 373–389. <https://doi.org/10.1177/0020852320933325>
- Kim, Y., Kim, M. C., & Im, S. (2014). Impact of Demographic Change Upon the Sustainability of Fiscal Policy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2580638>
- Klapper, L., & Lusardi, A. (2020). Financial literacy and financial resilience: Evidence from around the world. *Financial Management*, 49(3), 589–614. <https://doi.org/10.1111/fima.12283>
- Kniec, W., & Goszczyński, W. (2022). Local Horizons of Governance. Social Conditions for Good Governance in Rural Development in Poland. *European Countryside*, 14(1), 27–50. <https://doi.org/10.2478/euco-2022-0002>
- Kuddy, A. L., Attamimi, Y., & Erari, A. (2023). Pengaruh Intensitas Pelatihan Keuangan Daerah, Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 13–19. <https://doi.org/10.55264/jumabis.v7i1.97>
- Kwon, O.-S. (2003). The Effects of Fiscal Decentralization on Public Spending: The Korean Case. *Public Budgeting & Finance*, 23(4), 1–20. <https://doi.org/10.1111/j.0275-1100.2003.02304001.x>
- Laila, A. A. (2017). Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz). Doctoral dissertation, State University of Surabaya, 1(1), 1–10.

- Lance, B., & Robertson K, T. (2023). Literature Review of Public Administration and Good Governance from 1890 to 2023. *Jurnal Transformativ*, 9(1), 43–65. <https://doi.org/10.21776/ub.transformativ.2023.009.01.3>
- Lavrovskii, B. L., Goryushkina, E. A., & Shil'tsin, E. A. (2022). Modeling the Fiscal Capacity of Regions. *Herald of the Russian Academy of Sciences*, 92(1), 25–34. <https://doi.org/10.1134/S1019331622010038>
- Lee, Y. (2004). Adequacy of Korea's tax assignment: A fiscal federalism approach. *International Review of Public Administration*, 9(2), 139–148. <https://doi.org/10.1080/12294659.2005.10805055>
- Liow, Festus Evly R.I (2023) *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini: Aceh
- Liu, H., & Huang, W. (2022). Sustainable Financing and Financial Risk Management of Financial Institutions—Case Study on Chinese Banks. *Sustainability (Switzerland)*, 14(15). <https://doi.org/10.3390/su14159786>
- Luo, W., & Liu, Y. (2022). Research on the Impact of Fiscal Decentralization on Governance Performance of Air Pollution—Empirical Evidence of 30 Provinces from China. *Sustainability (Switzerland)*, 14(18). <https://doi.org/10.3390/su141811313>
- Lynn, L. (2006). Public management: Old and new. In *Public Management: Old and New*. <https://doi.org/10.4324/9780203964774>
- Mahdi Sahi, A., Sahi, A. M., Abbas, A. F., & F. A. Khatib, S. (2022). Financial reporting quality of financial institutions: Literature review. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2135210>
- Manaf, H. A. (2016). Knowledge management and leadership in Malaysia. *Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy*, 1(1), 93–117. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.222.99/arpap/2016.006>
- Mardiasmo (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. CV. Andi offset: Yogyakarta. (Jilid II).
- Mardiasmo (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. CV. Andi Offset: Yogyakarta. (Jilid III).
- Marwan, A., & Bonfigli, F. (2022). Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia Awaludin. *Bestuur*, 10(1), 22–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59143>

- Maulani, A., Anshori, M. I., & Andriani, N. (2024). Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1415–1422. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3451>
- Maulida, M. N., Yousida, I., & Lestari, T. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Bkkbn Provinsi Kalimantan Selatan. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(02), 133–140.
- Mishchenko, S., Nuamenkova, S., Mishchenko, V., & Dorofiev, D. (2021). Innovation risk management in financial institutions. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(1), 190–202. [https://doi.org/10.21511/imfi.18\(1\).2021.16](https://doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.16)
- Mulyani, F. S. P., Fahmi, M. P., Wulandari, S., Rasyid, Y., & Ahyaruddin, M. (2022). Determinan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Peran Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 32–52. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12837>
- Murugan, M. S., & T, S. K. (2023). Large-scale data-driven financial risk management & analysis using machine learning strategies. *Measurement: Sensors*, 27(April), 100756. <https://doi.org/10.1016/j.measen.2023.100756>
- Mustanir, A., Aromatica, D., Utari, D. S., Nugroho, L., Faried, A. I., Kusnadi, I. H., ... & Wismayanti, K. W. D. (2023). *Dinamika Administrasi Publik Indonesia. Global Eksekutif Teknologi*.
- Mutiah. (2019). The Effect of Regional Financial Independence, Regional Financial Efficiency and Effectiveness of Regional Original Income on Capital Expenditure (Study in the Provincial Level Regional Government in Indonesia 2013-2017). *European Journal of Business and Management*, 11(24), 43–53. <https://doi.org/10.7176/EJBM>
- Nalukenge, I., Taurigana, V., & Joseph Mpeera, N. (2017). Journal of Accounting in Emerging Economies. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(1), 1–40. <https://doi.org/10.1108/jaar.2010.37511aaa.003>
- Nasution, F. H. (2016). Peran Administrasi Perkantoran. *Jurnal WartaDharmawangsa*, 1829–7463. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/159/154>

- Ndaparoka, D. S. R., Rantelobo, A., & Samadara, S. (2018). Model Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Kemandirian Fiskal Dan Derajat Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbd) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. *Jaka - Jurnal Jurusan Akuntansi*, 3(1), 19. <https://doi.org/10.32511/jaka.v3i1.231>
- Novie, M., Debby Ch, R., & Sri, M. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(17), 1–14.
- Nuru, F., & Mawikere, L. (2013). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Politik Terhadap Kinerja Dprd Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/Apbd. *Accountability*, 2(1), 50.
- Otto, T. (2024). Corporate Governance, Agency Costs, and Financial Performance: A Systematic Literature Review. *Intcj*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.69659/rynzhy09>
- Park, J., Butler, J. S., & Petrovsky, N. (2022). Understanding Public Participation as a Mechanism Affecting Government Fiscal Outcomes: Theory and Evidence From Participatory Budgeting. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(2), 375–389. <https://doi.org/10.1093/jopart/muac025>
- Park, K. K. (2022). Direction and Challenges of the Next Government Reorganization in the Era of Great Transformation. In *The Korean Journal of Local Government Studies* (Vol. 25, Nomor 4, hal. 291–311). The Korean Association for Local Governmen Studies. <https://doi.org/10.20484/klog.25.4.12>
- Peetz, J., Robson, J., & Xuereb, S. (2021). The Role of Income Volatility and Perceived Locus of Control in Financial Planning Decisions. *Frontiers in Psychology*, 12(May), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.638043>
- Petrovito, F., Pozzolo, A. F., Resce, G., & Scialà, A. (2023). Fiscal decentralization and income (re)distribution in OECD countries' regions. *Structural Change and Economic Dynamics*, 67(June), 69–81. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.07.002>
- Pikus, R., Prykaziuk, N., & Balytska, M. (2018). Financial sustainability management of the insurance company: Case of Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations*, 15(4), 219–228. [https://doi.org/10.21511/imfi.15\(4\).2018.18](https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.18)

- Prakasa, S. U. W., Asis, & Sahid, M. M. (2022). Reduce Corruption in Public Procurement: The Effort Towards Good Governance. *Bestuur*, 10(1), 33–42. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.51339>
- Pratik, M. P., & Vivek, A. D. (2017). Application Of Plan-Do-Check-Act Cycle For Quality And Productivity Improvement - A Review. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology*, 5(I), 197–201. https://www.researchgate.net/publication/318743952_Application_Of_Plan-Do-Check-Act_Cycle_For_Quality_And_Productivity_Improvement_A_Review
- Puswanto, A., & Kiawan, A. (2023). Perwujudan Musikal Dalam Membangun Ekspresi Estetis Pada Pertunjukan Musik Randai. 03(1), 32–39. <https://doi.org/10.24114/gsts.v2i2.48294>
- Qisthina, F. A., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2019). Analysis of Regional Financial Independence Towards Economic Growth and Human Development Index (Case Study : SWP Gerbangkertasusila Plus). *Wacana*, 22(1), 47–51. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/583/431>
- Quoc, T. N. K. (2024). Financial Statements' Reliability Affects Firms' Performance: A Case of Vietnam. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (Jeecar)*, 11(1), 143–155. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v11i1.1432>
- Rabin, Jack., Hildreth, W. Bartley & Miller, Gerald J. (2007). *Handbook of Public Administration*. Taylor & Francis Group. London, New York.
- Radaideh, R. M. H. (2022). The Impact of Good Governance on Human Development in Jordan: A Case Study. *Journal of Educational and Social Research*, 12(5), 81–95. <https://doi.org/10.36941/jesr-2022-0124>
- Realyvásquez-Vargas, A., Arredondo-Soto, K. C., Carrillo-Gutiérrez, T., & Ravelo, G. (2018). Applying the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle to reduce the defects in the manufacturing industry. A case study. *Applied Sciences (Switzerland)*, 8(11), 1–17. <https://doi.org/10.3390/app8112181>
- Ríos-Ríos, S., Ochoa-Paredes, F., Vargas-Tasayco, M., Uribe-Fernández, Y., & Chaman-Bardalez, A. (2023). Flexible strategic planning for the financial management of MSES-2019. *International Journal of*

- Advanced and Applied Sciences, 10(2), 1–6.
<https://doi.org/10.21833/ijaas.2023.02.001>
- Rizky, Z., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 47–59. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545>
- Saito, Fumihiko (2008) Foundation for local governance: Decentralization in comparative perspective. LE TEX Jelonek: Japan.
- Santoso, T., & Umar Basuki, M. (2009). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia: Aplikasi Model Mundell-Fleming. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 5(2), 108–128. <https://doi.org/10.33830/jom.v5i2.250.2009>
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local Own Revenue, Decentralization and Local Financial Independent. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>
- Saverius, D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>
- Schweizer, U. (1985). Fiscal independence, spillovers, and residential choice. *Papers of the Regional Science Association*, 56(1), 59–69. <https://doi.org/10.1007/BF01887903>
- Seddon, N., Chausson, A., Berry, P., Girardin, C. A. J., Smith, A., & Turner, B. (2020). Understanding the value and limits of nature-based solutions to climate change and other global challenges. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 375(1794), 1–12. <https://doi.org/10.1098/rstb.2019.0120>
- Setiawan, D., Choirunnisa, I. A., Daerah, K., & Daerah, K. P. (2023). Jurnal JISI POL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal JISI POL Ilmu*, 7(2), 65–84.
- Soobaroyen, T., & Poorundersing, B. (2008). The effectiveness of management accounting systems: Evidence from functional managers in a developing country. *Managerial Auditing Journal*, 23(2), 187–219. <https://doi.org/10.1108/02686900810839866>
- Sudarman, W. A., & Hidayat, W. (2020). Audit Committee and Earnings Management: the Role of Gender. *Jurnal Akuntansi*, 23(3), 379. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i3.603>

- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Alfabeta: Bandung.
- Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 146– 157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.146-157>
- Sumedrea, S. (2020). Regional Development of Financial Innovation in Eastern European Countries. *Series V - Economic Sciences*, 12(61)(2), 133–133. <https://doi.org/10.31926/but.es.2019.12.61.2.17>
- Sururudin, A., & Fathurohman. (2023). Implementasi Perencanaan Keuangan Bisnis Dan Rumah Tangga Pada Bisnis Umkm Ibu Herti. *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA*, 2(2), 7724–7726.
- Susiatiningsih, H., Setiyono, B., Puspapertiwi, S., Saputra, J., & Afrizal, T. (2021). A study of good governance innovation of javanese leadership in Indonesia. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17, 342– 350. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.34>
- Swastika, I. B. P. J., & Sari Widhiyani, N. L. (2020). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jembrana. *E- Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2724. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p02>
- Syafiie, I. Kencana (2016) *Ilmu Administrasi Publik*. Adi Mahasatya: Jakarta.
- Wantu, M. Mustapa (2012) *Beberapa Teori dalam Administrasi Publik*. Jangala Pustaka Utama: Surabaya.
- Syafiie, I. Kencana (2023) *Dilema Pemerintahan Lokal Dalam Arena Konsolidasi Demokrasi*. Samudra Biru: Yogyakarta.
- Tsoncheva, G. (2014). Measuring and assessing the quality. *Journal of University of Economics-Varna*, April, 52–64.
- Udeagha, M. C., & Breitenbach, M. C. (2023a). Can fiscal decentralization be the route to the race to zero emissions in South Africa? Fresh policy insights from novel dynamic autoregressive distributed lag simulations approach. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(16), 46446–46474. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-25306-z>

- Udeagha, M. C., & Breitenbach, M. C. (2023b). Revisiting the nexus between fiscal decentralization and CO2 emissions in South Africa: fresh policy insights. *Financial Innovation*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00453-x>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Verawati, Wiryaningtyas D, P., & Subaida, I. (2023). Pengaruh Struktur Modal Dan Non Performing Loan Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME)*, 2(3), 393–407.
- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1648>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2023). Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan & Business Sustainability pada Pengelolaan Keuangan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 852–858. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6119>
- Wiesel, F., & Modell, S. (2014). From New Public Management to New Public Governance? Hybridization and Implications for Public Sector Consumerism. *Financial Accountability and Management*, 30(2), 175–205. <https://doi.org/10.1111/faam.12033>
- Wolok, E., Yapanto, L. M., Lopian, A. L. C. P., Wolok, T., & Aneta, A. (2023). Manufacturing Industry Strategy in Increasing the Acceleration of Economic Growth in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), 1–10. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1927>
- Wulandari, R., Rochima, E., Rianto, Y., & Endyana, C. (2020). Pemetaan Topik Nilai Publik Dalam Penelitian. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 41(2), 203. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v41i2.683>
- Yeo, K. H. K., Lim, W. M., & Yii, K. J. (2023). Financial planning behaviour: a systematic literature review and new theory development. *Journal of Financial Services Marketing*, 1–24. <https://doi.org/10.1057/s41264-023-00249-1>
- Yulianadewi, I., Johanis, A. R., & Nurdiana. (2022). Analysis of Regional Financial Capability in the Context of Regional Autonomy in

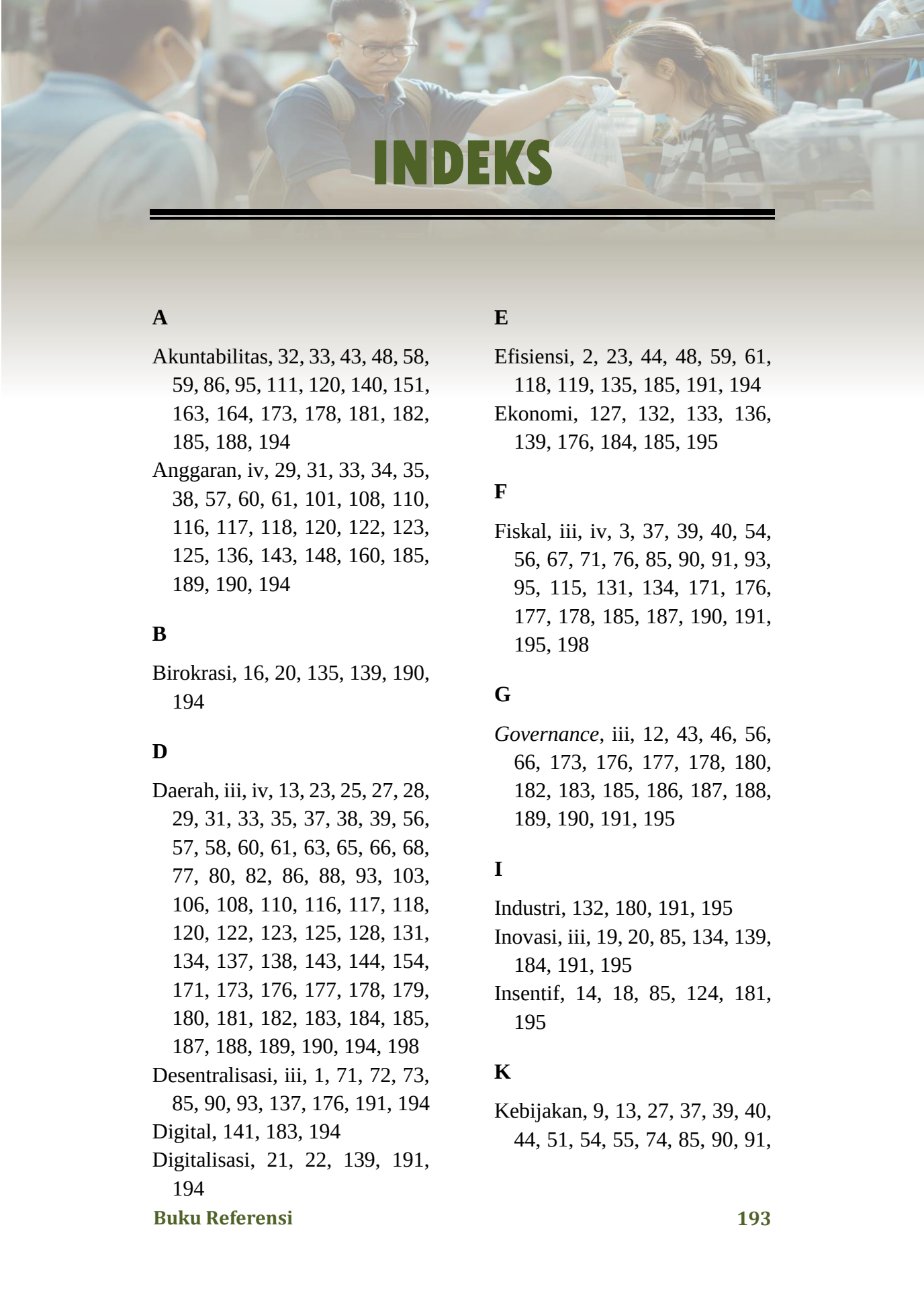
- Makassar City. *Jurnal Economic Resource*, 5(1), 143–156. <https://doi.org/10.57178/jer.v5i1.281>
- Yulis, D. Y. M., Kornita, S. E., & Widayatsari, A. (2022). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Menara Ilmu*, 16(2), 22–54. <https://doi.org/10.31869/mi.v16i2.3787>
- Zaitul, Z., Ilona, D., & Novianti, N. (2023). Good Governance in Rural Local Administration. *Administrative Sciences*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.3390/admsci13010019>
- Zakaria, Z., Lubis, Z., & Adam, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Aceh Tenggara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2186–2198. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1559>
- Zakariya, R. R. (2021). Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mengawal Penggunaan Keuangan Negara Untuk Penanganan Covid- 19 Di Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 150–164. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1133>
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas SDM Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.
- Zeng, Y. (2022). Neural Network Technology-Based Optimization Framework of Financial and Management Accounting Model. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022, 1–9. <https://doi.org/10.1155/2022/4991244>
- Zhang, Q., Nakatani, R., & Garcia Valdes, I. (2022). Fiscal Decentralization Improves Social Outcomes When Countries Have Good Governance. *IMF Working Papers*, 2022(111), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400211768.001>



GLOSARIUM

Birokrasi	Sistem pemerintahan yang mengatur administrasi dan kebijakan publik.
Desentralisasi Fiskal	Pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.
Digitalisasi	Pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan ekonomi.
Efisiensi	Penggunaan sumber daya secara optimal untuk hasil yang maksimal.
Good Governance	Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Industri Kreatif	Sektor ekonomi yang mengandalkan kreativitas dan inovasi sebagai nilai tambah.
Inklusivitas	Prinsip yang memastikan semua lapisan masyarakat terlibat dalam pembangunan.
Inovasi	Penerapan ide atau metode baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Kemandirian Fiskal	Kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada dana pusat.
New Public Management	Konsep reformasi manajemen pemerintahan yang berorientasi pada efisiensi dan pelayanan public.
Optimalisasi	Proses meningkatkan penggunaan sumber daya agar lebih efektif dan efisien.

Subsidi	Bantuan keuangan dari pemerintah untuk mendukung sektor tertentu.
Sumber Daya Lokal	Potensi yang dimiliki suatu daerah untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



INDEKS

A

Akuntabilitas, 32, 33, 43, 48, 58,
59, 86, 95, 111, 120, 140, 151,
163, 164, 173, 178, 181, 182,
185, 188, 194

Anggaran, iv, 29, 31, 33, 34, 35,
38, 57, 60, 61, 101, 108, 110,
116, 117, 118, 120, 122, 123,
125, 136, 143, 148, 160, 185,
189, 190, 194

B

Birokrasi, 16, 20, 135, 139, 190,
194

D

Daerah, iii, iv, 13, 23, 25, 27, 28,
29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 56,
57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68,
77, 80, 82, 86, 88, 93, 103,
106, 108, 110, 116, 117, 118,
120, 122, 123, 125, 128, 131,
134, 137, 138, 143, 144, 154,
171, 173, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185,
187, 188, 189, 190, 194, 198

Desentralisasi, iii, 1, 71, 72, 73,
85, 90, 93, 137, 176, 191, 194

Digital, 141, 183, 194

Digitalisasi, 21, 22, 139, 191,
194

E

Efisiensi, 2, 23, 44, 48, 59, 61,
118, 119, 135, 185, 191, 194

Ekonomi, 127, 132, 133, 136,
139, 176, 184, 185, 195

F

Fiskal, iii, iv, 3, 37, 39, 40, 54,
56, 67, 71, 76, 85, 90, 91, 93,
95, 115, 131, 134, 171, 176,
177, 178, 185, 187, 190, 191,
195, 198

G

Governance, iii, 12, 43, 46, 56,
66, 173, 176, 177, 178, 180,
182, 183, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 195

I

Industri, 132, 180, 191, 195

Inovasi, iii, 19, 20, 85, 134, 139,
184, 191, 195

Insentif, 14, 18, 85, 124, 181,
195

K

Kebijakan, 9, 13, 27, 37, 39, 40,
44, 51, 54, 55, 74, 85, 90, 91,

133, 136, 137, 174, 178, 187, 188, 195

Keuangan, iii, iv, 1, 4, 8, 23, 25, 27, 31, 58, 59, 66, 72, 86, 97, 98, 99, 105, 106, 110, 112, 140, 143, 144, 168, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 195

Kinerja, iii, 13, 17, 38, 40, 47, 66, 75, 122, 160, 181, 182, 183, 185, 187, 195

Kreatif, 132, 191, 195

L

Lokal, iii, iv, 5, 63, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 127, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 171, 188, 191, 195, 198

M

Manajemen, iv, 11, 12, 13, 20, 25, 75, 76, 85, 97, 99, 101, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 188, 195

Masyarakat, iii, 6, 8, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 54, 58, 60, 61, 68, 118, 123, 147, 168, 177, 195

O

Optimalisasi, iv, 3, 63, 64, 67, 77, 79, 82, 84, 143, 144, 145, 171, 184, 187, 191, 195, 198

P

Partisipasi, iii, 6, 8, 27, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 54, 58, 60, 61, 68, 73, 81, 84, 108, 118, 133, 140, 141, 195

Pemerintah, iii, 2, 4, 6, 13, 15, 19, 24, 28, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 73, 78, 81, 82, 83, 84, 88, 94, 105, 111, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 162, 163, 164, 166, 168, 176, 177, 178, 179, 181, 185, 187, 188, 190, 195

Publik, iii, 12, 20, 21, 74, 117, 133, 140, 163, 173, 174, 178, 179, 181, 184, 188, 189, 195

S

Sistem, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 49, 86, 94, 96, 104, 109, 119, 139, 140, 156, 173, 174, 176, 179, 180, 181, 188, 190, 195

T

Teknologi, iii, 20, 23, 24, 25, 86, 94, 119, 129, 134, 169, 178, 184, 195

Transparansi, 34, 35, 43, 47, 57, 58, 120, 121, 140, 151, 158, 163, 178, 185, 195

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si.

Peneliti Administrasi Publik, lahir di Gorontalo pada tanggal 4 Juli 1978. Lulus Program Doktor Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar pada tahun 2014. Sejak tahun 2005 Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Sejak tahun 2019 hingga saat ini menjabat sebagai Koordinator Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Bidang keilmuan Manajemen, Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik, dan Kebijakan Publik.



Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si.

Lahir di Gorontalo pada tanggal 27 Desember 1959, telah menjadi Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 1986 dengan kepakaran pelayanan publik di bidang Administrasi Publik. Pernah menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2019-2023.



Dr. Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si.

Lahir di Monano, Bone Bolango, 24 Maret 1979. Lulus S3 di Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo 2022. Saat ini sebagai Dosen di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial UNG.



Dr. Danial Ibrahim, S.E., M.M.

Lahir di Gorontalo pada tanggal 2 November 1973, Lulus di Program Doktor Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2024. Sebelumnya menjabat Plt Kasubbag Keuangan pada Badan Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta pada tahun 2005, hingga menjabat berbagai posisi penting di bidang keuangan daerah. Pengalaman meliputi berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan keuangan daerah, termasuk Kepala Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris Dinas pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2021, diangkat menjadi Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo pada Maret 2023 – 12 Desember 2024, hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo.



Pebriyanto A. Hulinggi, S.A.P., M.AP.

Lahir di Lemito Utara pada tanggal 17 Oktober 1997. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2020, selanjutnya pada Jenjang Magister (M.AP) selesai pada Tahun 2023 Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, hingga saat ini sebagai Pengajar di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.



Putri Warsono, S.A.P.

Lahir di Gorontalo pada tanggal 7 Maret 2001. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2023.

Buku Referensi

KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

PEMANFAATAN SUMBER DAYA LOKAL SEBAGAI SOLUSI

Buku referensi “Optimalisasi Sumber Daya Lokal di Provinsi Gorontalo dalam Mewujudkan Penguatan Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal” ini membahas bagaimana Provinsi Gorontalo dapat mengoptimalkan sumber daya lokalnya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencapai kemandirian fiskal. Berdasarkan potensi besar yang dimiliki Gorontalo, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya. Melalui berbagai analisis, kajian teori, serta studi kasus, buku referensi ini memberikan panduan konkret bagi pemerintah daerah, pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Buku referensi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.



 mediapenerbitindonesia.com
 +6281362150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitidn

